



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

#### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.



8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. sebagai Instrumen untuk menentukan KUA, serta penentuan PPAS dalam rangka Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2021; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan Perangkat Daerah.



## BAB II RKPD

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2021.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
  - Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - Bab VII : Penutup
- (4) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2021 yang disusun berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
  - a. Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021; dan
  - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021:

### Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah wajib menggunakan RKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Bappeda paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

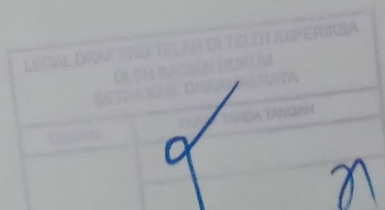
SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR...11





# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4. Sistematika Penulisan RKPD	I-5
1.5. Maksud Dan Tujuan	I-9
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-7
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-17
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-56
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-58
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-59
<b>BAB III    KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2021	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-4
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-8
<b>BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-6
4.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	IV-11
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-16
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-16
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-17
4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	IV-25

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
6.1	Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah	VI-9
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VII-1</b>



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (jiwa)	II-5
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	II-6
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	II-8
Tabel 2.5	Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-9
Tabel 2.6	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) KAbupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018)	II-10
Tabel 2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (ADHK Tahun 2010)	II-11
Tabel 2.8	Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-13
Tabel 2.9	Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014 s/d 2018	II-12
Tabel 2.10	PDRB Pendapatan Perkapita Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 201 s/d 2018	II-13
Tabel 2.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-14
Tabel 2.12	Capaian AMH, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-16
Tabel 2.13	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2014 s/d 2018	II-18
Tabel 2.14	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-18
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-20
Tabel	Perkembangan Ruang Kelas Pendidikan dengan	

2.16	Kondisi Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	
Tabel 2.17	Angka Kematian Balita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-22
Tabel 2.18	Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-22
Tabel 2.19	Prevalensi Stunting Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-23
Tabel 2.20	Persentase Puskesmas Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-23
Tabel 2.21	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-24
Tabel 2.22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-24
Tabel 2.23	Cakupan Pelayanan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-25
Tabel 2.24	Cakupan Penanganan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur>15 tahun keatas)	II-25
Tabel 2.25	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.26	Cakupan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.27	Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.28	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-27
Tabel 2.29	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwewenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	II-28
Tabel 2.30	Rasio Nagari yang Sudah Dilalui Jalan Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29
Tabel 2.31	Persentase Jalan Lengkap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29
Tabel	Akses Air Minum Layak Kabupaten Dharmasraya	II-29



2.32	Tahun 2014 s/d 2018	
Tabel 2.33	Akses Sanitasi Layak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-30
Tabel 2.34	Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-30
Tabel 2.35	Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-31
Tabel 2.36	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-32
Tabel 2.37	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-33
Tabel 2.38	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-34
Tabel 2.39	Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-34
Tabel 2.40	Indikator Bidang Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-35
Tabel 2.41	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-36
Tabel 2.42	Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-37
Tabel 2.43	Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-38
Tabel 2.44	Indikator Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-39
Tabel 2.45	Indikator Bidang Perhubungan 2014 s/d 2018	II-40
Tabel 2.46	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-41
Tabel 2.47	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-42
Tabel 2.48	Nilai Realisasi dan Jumlah Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-42
Tabel 2.49	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-43
Tabel 2.50	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-44
Tabel 2.51	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-44
Tabel 2.52	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-45

Tabel 2.53	Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-46
Tabel 2.54	Indikator Bidang Pariwisata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-47
Tabel 2.55	Nilai dan KOntribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK) Tahun 2014 s/d 2018	II-47
Tabel 2.56	Produksi dan Produktivitas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-48
Tabel 2.56	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-52
Tabel 2.57	Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-49
Tabel 2.58	Produksi dan Populasi Ternak Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-50
Tabel 2. 59	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-51
Tabel 2.60	Indikator Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-52
Tabel 2.61	Indikator Bidang Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-52
Tabel 2.62	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-53
Tabel 2.63	Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-53
Tabel 2.64	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-55
Tabel 2.65	Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan Indikator Pembangunan	II-59
Tabel 3.1	Kondisi EKonomi Makro Nasional Tahun 2016 s/d 2018 dan Prediksi tahun 2019 s/d 2020	III-2
Tabel 3.2	Kondisi EKonomi Makro Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2018 dan Prediksi tahun 2019 s/d 2020	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	III-4
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-5
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-11
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-12
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-12
Tabel 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-8

Tabel 4.2	Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-17
Tabel 4.3	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/sasaran Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021	IV-23
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.6	Tema Pembangunan Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya	IV-35
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-36
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	IV-37
Tabel 4.9	Kesesuaian Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-39
Tabel 5.1	Rekap Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020	V-2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	VI-2
Tabel 6.2	Realisasi dan Proyeksi Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021	VI-8
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VI-12

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Potensi Pengembangan Wilayah	II-1
Gambar 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018 (ADHK Tahun 2010)	II-11
Gambar 2.3	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018	II-15
Gambar 2.4	Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan dan Pengembangan Modal Daerah (Assets-Based Development)	II-58
Gambar 4.1	Strategi Pembangunan Nasional	IV-7



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai kebutuhan daerah, kemampuan, potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang strategis dikarenakan penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu RKPD 2021 menjadi tahun penutup pelaksanaan Visi Misi Bupati Kabupaten Dharmasraya Periode 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun proses penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 juga mempertimbangkan dampak perkembangan sosial, ekonomi pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dengan tidak mengesampingkan pendekatan penyusunan perencanaan yang teknokratis (metode dan kerangka berpikir ilmiah) dan partisipatif (mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan), pendekatan politis (mengakomodasi kepentingan politik), pendekatan *top down planning* (mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi) dan pendekatan *bottom up planning* (mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat melalui jenjang pemerintahan) dengan memperhatikan substansi holistik-tematik, integratif dan spasial. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disinergikan dan

diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan, serta menjaga sinergi pusat dan daerah. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2021 juga dilandasi dengan 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan gender dan *good governance*.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat;
  19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
  20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor xx Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

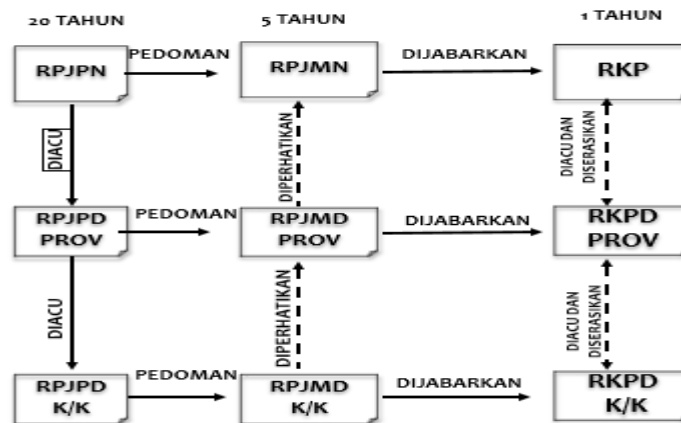
Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 mempedomani dan mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- Penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.
- Mengacu dan menyelaraskan terhadap dokumen : RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya.

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota**



Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya 3 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta satu dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian yang pernah dilakukan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKPD**

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2021.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.



## **BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2019, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2020 sebagai bahan acuan.

### **2.1.      Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Sub bab ini memuat beberapa bahasan yaitu:

#### **2.1.1.      Aspek Geografi dan Demografi**

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

#### **2.1.2.      Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek ini menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

#### **2.1.3.      Aspek Pelayanan Umum**

Aspek ini menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terdiri dari fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

#### **2.1.4.      Aspek Daya Saing Daerah**

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

### **2.2.      Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

#### 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

memuat permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2021 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

#### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

## **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2021 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH

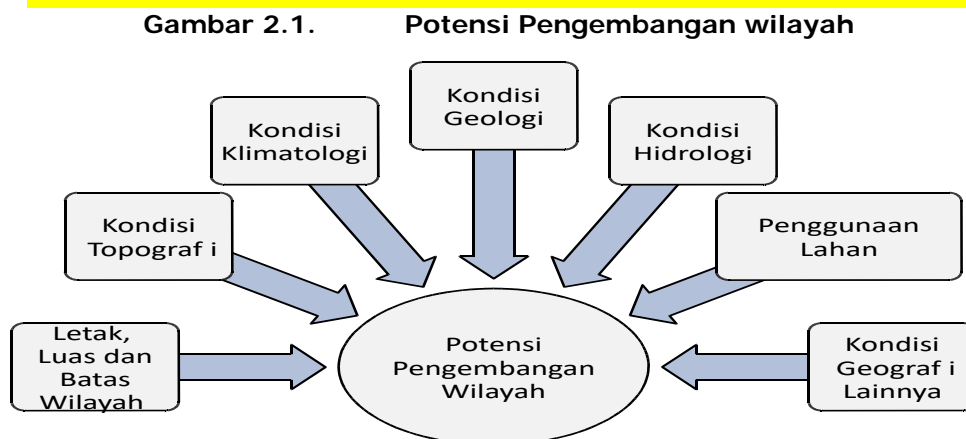
Dalam perumusan maupun penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data, grafik, analisis, hasil tinjauan lapangan serta didukung oleh foto/gambar. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi daerah. Gambaran umum kondisi daerah disajikan dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah.

Data dan analisis gambaran umum daerah disusun secara series dari tahun 2015 sampai tahun 2019 serta tergantung pada ketersediaan data yang ada disertai sumber data untuk mendukung penyajian bab berikutnya seperti : permasalahan, isu strategis, serta sampai kepada penjabaran visi, visi dan program bupati dan wakil bupati yang akan disusun secara sistematis. Data yang disajikan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Selain itu juga dilakukan penyelarasan dengan mempedomani indikator pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal ini dapat dijadikan tolak ukur/*benchmark* pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan daerah yang lebih luas.

#### 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

###### a. Kondisi geografi





Untuk melihat sekilas gambaran fisik wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Dharmasraya, yang disajikan berdasarkan unsur kondisi geografi yaitu :

- Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi  $00^{\circ}48'25,4''$ - $1^{\circ}41'40,3''$  LS dan  $101^{\circ}8'32,5''$ - $101^{\circ}53'30,2''$ BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 km<sup>2</sup> (296.113 ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km<sup>2</sup> (302.599) ha.

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 nagari, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- Kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya**

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (derajat)	Luas	
		(ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
<b>Jumlah</b>		<b>302.599</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi  
Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.
- Kondisi geologi  
Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat di daerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut - Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera *Fault Zone* yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.
- Kondisi hidrologi  
Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. Sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku)

mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 dapat disajikan secara umum sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 ha (1,34%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7.290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 ha, dan hutan tanaman seluas 6.115 ha.

3. Pemukiman

Luas kawasan pemukiman 7.552 Ha (2,45% dari luas wilayah). Kawasan pemukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan pemukiman didorong oleh perkembangan pemukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 ha (7,02%).

- Wilayah rawan bencana, sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.
- (a) Banjir. Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai
- (b) Kebakaran, bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kekeringan ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

#### b. Kondisi demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019 (jiwa)**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-laki	115.515	118.801	122.116	125.278	125.278
2	Perempuan	107.597	110.512	113.360	116.293	116.293
<b>Jumlah (jiwa)</b>		<b>223.112</b>	<b>229.313</b>	<b>235.476</b>	<b>241.571</b>	<b>241.571</b>
<b>Rasio jenis kelamin (persen)</b>		<b>107,36</b>	<b>107,5</b>	<b>107,72</b>	<b>107,73</b>	<b>107,74</b>
<b>Pertumbuhan penduduk (persen)</b>		<b>2,86</b>	<b>2,69</b>	<b>2,62</b>	<b>2,69</b>	<b>2,59</b>
<b>Rata-rata pertumbuhan (persen)</b>		<b>2,91</b>				

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015 sampai tahun 2019

mengalami peningkatan yaitu dari 223.112 jiwa di tahun 2015 menjadi 247.579 jiwa di tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,59 %. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.3 Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Sungai Rumbai	47,63	1,61	25.535	10,457	536,11
3	Koto Besar	488,19	16,49	25.879	10,71	53,01
2	Asam Jujuhan	257,72	8,70	18.736	7,76	72,70
4	Koto Baru	251,35	8,49	34.405	14,24	136,88
5	Koto Salak	464,39	15,68	16.956	7,02	36,51
7	Tiumang	129,18	4,36	11.754	4,87	90,99
6	Padang Laweh	59,76	2,02	8.175	3,38	136,80
8	Sitiung	87,68	2,96	26.762	11,08	305,22
9	Timpeh	237,93	8,04	15.425	6,39	64,83
10	Pulau Punjung	482,50	16,29	49.103	20,33	101,77
11	IX Koto	454,80	15,36	8.841	3,66	19,44
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>2.961,13</b>	<b>100</b>	<b>241.571</b>	<b>100</b>	<b>81,58</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Pada tabel di atas, Dharmasraya memiliki luas wilayah 2.961,13 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 241.571 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 488,19 km<sup>2</sup> atau 16,49% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 47,63 km<sup>2</sup> atau 1,61% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 49.103 jiwa atau 19,44 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 8.175 jiwa atau hanya 3,38% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kabupaten

Dharmasraya sebesar 81,58 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 536,11 jiwa/km<sup>2</sup>, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 19,44 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Sebelum masuk kepada indikator teknis pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, maka akan ditinjau terlebih dahulu indikator makro berupa indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator makro lainnya antara posisi Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga IPM ini dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM merode baru yang berbeda dengan perhitungan IPM hingga tahun 2013. Mulai tahun 2014 indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan dalam perhitungan IPM, namun diganti dengan indikator lain yaitu harapan lama sekolah. Adanya perbedaan indikator dan rumus perhitungan IPM juga tidak seperti IPM sebelumnya. IPM metode baru terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator angka harapan hidup, kemudian dimensi pengetahuan yang diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terakhir adalah dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita disesuaikan. Untuk melihat posisi capaian IPM Kabupaten Dharmasraya terhadap 19 kab./kota dan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :



**Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No.	Kab./Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	rangking
1	Kepulauan Mentawai	64.68	12.76	7.08	6,429.00	61.26	19
2	Pesisir Selatan	70.73	13.31	8.25	9,444.00	70.08	11
3	Solok	68.34	13.03	7.85	10,309.00	69.08	14
4	Sijunjung	66.02	12.36	8.1	10,395.00	67.66	16
5	Tanah Datar	69.73	14.32	8.45	10,709.00	72.14	10
6	Padang Pariaman	68.58	13.62	7.86	11,158.00	70.59	12
7	Agam	72.17	13.86	8.85	9,780.00	72.37	8
8	Limapuluh Kota	69.7	13.28	7.98	9,842.00	69.67	13
9	Pasaman	67.18	12.79	7.86	8,599.00	66.46	18
10	Solok Selatan	67.58	12.7	8.16	10,505.00	68.94	15
<b>11</b>	<b>Dharmasraya</b>	<b>71.1</b>	<b>12.42</b>	<b>8.46</b>	<b>11,431.00</b>	<b>71.52</b>	<b>9</b>
12	Pasaman Barat	67.67	13.4	8.06	9,180.00	68.21	17
13	Kota Padang	73.57	16.51	11.34	14,728.00	82.68	1
14	Kota Solok	73.45	14.31	11.02	12,337.00	78.38	4
15	Kota Sawah Lunto	69.87	13.16	9.97	10,238.00	72.39	7
16	Kota Padang Panjang	72.77	15.05	11.45	11,013.00	78	5
17	Kota Bukit Tinggi	74.22	14.96	11.32	13,586.00	80.71	2
18	Kota Payakumbuh	73.61	14.25	10.72	13,464.00	78.95	3
19	Kota Pariaman	70.15	14.53	10.37	12,958.00	76.7	6
	Sumatera Barat	69.31	14.01	8.92	10,925.00	72.39	
	Nasional	71,34	12,95	8,34	11.299	71,92	
Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2020							

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2019 mencapai 71,52, naik dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 70,86, dan berada sedikit di bawah IPM provinsi yang berada pada angka 72,39. Dilihat dari perbandingan indikator pembentuk IPM, indikator angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan berada di atas provinsi, namun pada dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih berada di bawah provinsi.

Melihat kondisi tersebut, maka ke depannya, percepatan pembangunan bidang pendidikan mesti mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan bidang lainnya, sehingga Dharmasraya mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.

### **2.1.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah)**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.5 Indikator Ekonomi Makro Daerah  
Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,75	5,42	5,45	5,32	4,98
1.2.	Indeks Gini	0,36	0,30	0,25	0,26	0,28
1.3.	Laju inflasi provinsi	1,08	5,02	2,03	2,60	1,66
1.4.	PDRB per kapita	34,83	36,77	39,42	41,05	41,80
1.5.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	7,17	7,16	6,68	6,42	6,29

Sumber : BPS Dharmasraya, tahun 2020

Masing masing indikator di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

#### **1. Pertumbuhan PDRB**

Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Biasanya perhitungan pertumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas

dasar harga konstan (ADHK). Untuk melihat pertumbuhan PDRB ini ditinjau dari :

**Tabel 2.6 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,03	29,74	30,73	29.74	29.74
B	Pertambangan dan Penggalian	9,87	9,03	7,27	7.06	7.06
C	Industri Pengolahan	5,89	6,34	6,09	5.84	5.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0.02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0.01	0.01
F	Konstruksi	12,88	12,62	13,39	13.80	13.80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,18	13,19	14,10	14.43	14.43
H	Transportasi dan Pergudangan	5,83	6,13	5,99	6.12	6.12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,82	0,97	0.99	0.99
J	Informasi dan Komunikasi	5,19	7,15	5,89	6.10	6.10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,19	2,24	2.20	2.20
L	Real Estat	2,20	2,09	2,20	2.22	2.22
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0.02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,87	5,98	5,83	6	6
P	Jasa Pendidikan	2,55	2,39	2,82	2.90	2.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,58	1,67	1.74	1.74
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,69	1,70	0,76	0.81	0,81
T O T A L		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 sektor terbesar yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian sebesar 29,74 persen (angka ini menurun dari 31,04 di tahun 2014) selanjutnya sektor perdagangan di posisi kedua dengan kontribusi 14,43 persen (angka ini naik dari 12,62 di tahun 2014) disusul oleh sektor konstruksi sebesar 13,80 persen (naik dari 11,95 di tahun 2014) berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 7,06 (turun dari 10,90 di tahun 2014) dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan 6,12. Diantara kelima lapangan usaha tersebut, dua lapangan usaha peranannya berfluktuatif namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan

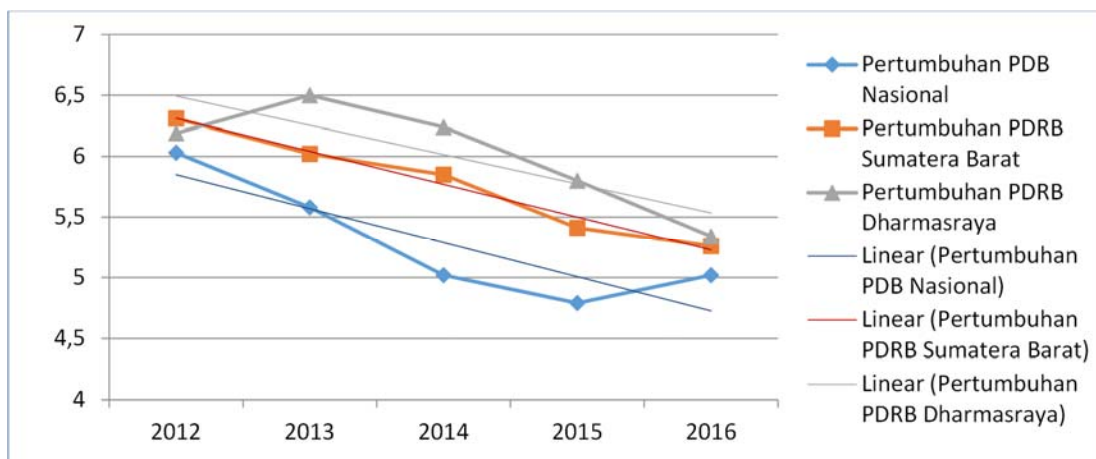
pertambangan dan penggalan adalah berkurangnya hasil dari pertambangan dan penggalan, serta banyaknya usaha pertambangan dan penggalan yang melanggar ketentuan AMDAL sehingga ditutup oleh pemerintah dan pembatasan ekspor mineral oleh pemerintah.

**Tabel 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019 (ADHK Tahun 2010)**

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan PDB Nasional	4,79	5,02	5,07	5,17	5,02
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	5,53	5,27	5,29	5,14	5,05
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	5,75	5,42	5,45	5,32	4,98

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019 (ADHK Tahun 2010)**



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,02 % hingga 6,34%, namun perkembangannya hingga tahun 2016, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya lebih rendah, sedangkan Sumbar masih tumbuh di atas nasional.

## 2. Indeks Gini (Gini rasio)

Indeks gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio

dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

**Tabel 2.8 Indeks Gini Rasio  
Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya  
tahun 2015 s/d 2019**

No.	Indeks Gini	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nasional	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38
2	Provinsi Sumatera Barat	0.34	0.33	0.32	0.32	0,31
3	Kabupaten Dharmasraya	0.36	0.30	0.25	0.26	0,28

Sumber : sumbar.bps.go.id, tahun 2020

Berdasarkan data di atas, maka terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2015 hingga 2019 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

### 3. Laju inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2015. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

**Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019**

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72
2	Sumatera Barat	10,87	5,02	2,11	2,60	1,67
3	Kota Padang	0,85	2,11	1,45	0,16	1,72
4	Kota Bukittinggi	2,79	1,37	0,43	0,41	1,31

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2015 sampai dengan 2016 nilai inflasi Provinsi Sumbar berada di atas nasional, namun pada tahun 2019 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagai angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

#### 4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB.

**Tabel 2.10 PDRB Pendapatan Perkapita  
Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2015 s/d 2019 (Rp juta)**

No.	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.	PDRB perkapita Nasional (non migas)	45,14	47,96	51,89	56	59,1
1.2.	Provinsi Sumatera Barat	34,41	37,21	40,32	42,75	45,78
1.3.	Kabupaten Dharmasraya	34,83	36,77	39,50	41,05	41,80

Sumber : <http://www.bps.go.id>, tahun 2020

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terlihat selalu berada di bawah provinsi dan angka nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya berada di bawah rata-rata ekonomi provinsi dan nasional. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

#### 5. Tingkat Kemiskinan

Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,29 persen di tahun 2019. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat

kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

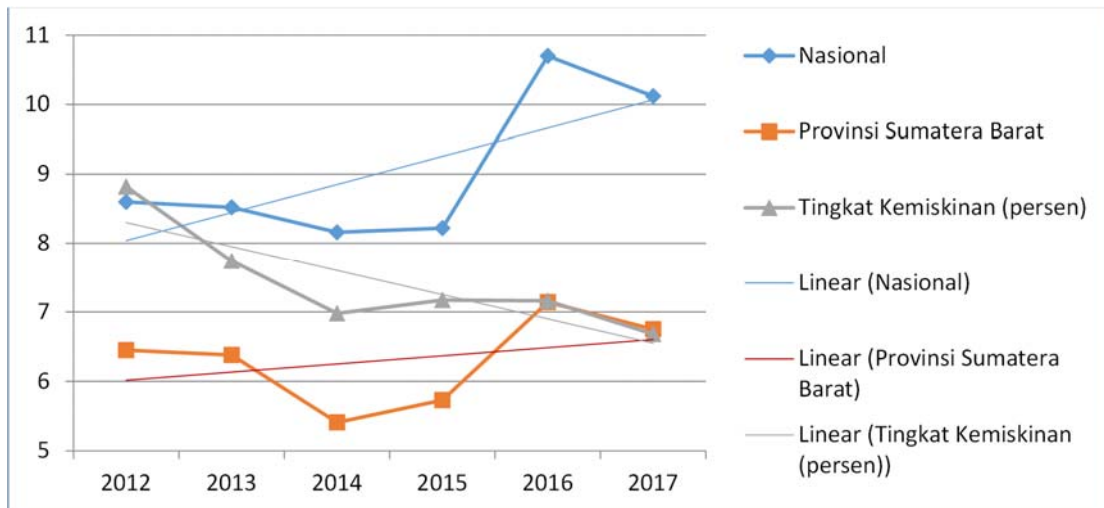
**Tabel 2.11 Tingkat kemiskinan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	8,22	10,70	10,12	9,82	9,22
Provinsi Sumatera Barat	7.31	7.09	6.87	6.65	6,42
Tingkat Kemiskinan (persen)	7,17	7,16	6,68	6,42	6,29
<i>Jumlah Penduduk miskin (jiwa)</i>	15.890	16.240	15.630	15.418	15.490
<i>Jumlah penduduk (jiwa)</i>	223.112	229.313	235.476	241.571	241.579

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Tahun 2020



**Gambar 2.3. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya 2015 s/d 2019**



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional, dan Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari garis tren pada grafik, maka garis kecenderungan penurunan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih tajam dibandingkan dengan nasional dan provinsi, sehingga untuk ke depannya ekspektasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik. Pada tahun 2015, ketiga wilayah menunjukkan perkembangan yang negatif yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk miskin. Peningkatan tersebut disebabkan lebih oleh kondisi ekonomi internasional dan regional, terutama penurunan komoditi perkebunan.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan sosial untuk bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2015-2018 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM merupakan menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM

secara umum dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

**Tabel 2.12** Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019

No	Kabupaten Dharmasraya					
	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka melek huruf	99,69	99,85	99,29	99,93	99,14
2	Harapan Lama Sekolah	12,36	12,39	12,40	12,41	12,42
3	Angka rata-rata lama sekolah	8,03	8,23	8,24	8,4	8,46
4	Angka partisipasi kasar					
	- APK SD/MI	110,42	112,43	110,44	112,06	108,54
	- APK SMP/MTs	90,93	82,17	81,36	90,62	91,70
5	Angka Partisipasi Murni					
	- APM SD/MI	100	98,24	98,87	99,31	99,24
	- APM SMP/MTs	78,33	72,61	73,88	77,17	76,88

Sumber: BPS Sumatera Barat, Tahun 2020

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas di Dharmasraya. Untuk kondisi 2018 saja angka ini sudah menunjukkan angka 99,93 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 0,07%, hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar penduduk Dharmasraya mampu untuk membaca dan menulis serta menyerap informasi dengan baik. Namun angka ini masih dibawah Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Barat

Periode 2015 hingga 2019, harapan lama meningkat dari 12,36 tahun 2015 menjadi 12,42 tahun 2019. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, harapan lama sekolah mencapai 12,42 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SD.

Pada angka rata-rata lama sekolahpun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir sebesar 0,90% dari 8,03 di tahun 2015 menjadi 8,46 di tahun 2019, perubahan ini sejalan dengan perubahan perhitungan IPM dengan menggunakan metode baru.

Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, nilainya selalu berada di atas angka 100, artinya terdapatnya siswa SD/MI yang bersekolah di Dharmasraya berasal dari daerah lain, angka ini selalu naik dari 110,42 di tahun 2015 menjadi 108,54 di tahun 2019. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 90,93 di tahun 2015 menjadi 90,93 di tahun 2019.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, terakhir pada angka 99,31 namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 77,17 dan 55,55. Sehingga kedua tingkatan pendidikan ini masih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan tingkat SD/MI. Meningkatnya APK maupun APM tingkatan SMP/MTs selain didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan, juga didukung oleh program pusat maupun daerah dalam berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dukungan beasiswa dari badan amil zakat bagi siswa kurang mampu sekaligus peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sehingga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat serta jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi.

Adanya selisih yang cukup besar antara capaian APK dengan APM untuk setiap tingkatan sekolah, menunjukkan adanya ketidak tepatan usia anak yang bersekolah dengan usia sekolah yang seharusnya. Melihat hal ini maka kebijakan yang dilakukan mestinya adalah mengarahkan penerimaan siswa baru sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

## 2. Bidang Kesehatan

### - Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

**Tabel 2.13      Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2015 s/d 2019 (tahun)**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kematian bayi (AKB)	20,15	13,3	12	13,8	9,4
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	153	98,6	209	102	108

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, angka kematian bayi semakin menurun, tertinggi tercatat sebesar 20,15 di tahun 2015, dan terendah pada angka 9,4 di tahun 2019. Angka ini telah mencapai target SDG's tahun 2030 sebesar 12 per 1000 KH yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi.

Angka kematian ibu cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tertinggi tahun 2017 sebesar 153 dan terendah tahun 2016 sebesar 98,6. kondisi ini belum memenuhi target SDGs tahun 2030 yaitu Kematian ibu kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian yang cenderung naik turun disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pemeriksaan kehamilan hanya dilakukan saat menjelang melahirkan sehingga meningkatkan resiko bagi ibu dan bayi, adanya penyakit menular yang menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, belum optimalnya peran kader serta kondisi geografis di beberapa daerah yang menyebabkan petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan.

#### - **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM.

Dilihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan cukup relevan dengan kondisi yang ada, naiknya capaian AHH ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan IPM Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari perkembangannya, yaitu dari 70,16 tahun pada tahun 2015 menjadi 71,1 tahun pada tahun 2019

**Tabel 2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019 (tahun)**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Harapan Hidup	70,16	70,30	70,44	70,73	71,1

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

### **2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

#### **1. Kebudayaan**

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multi-etnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya

berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

## **2. Pemuda dan Olahraga**

Setiap tahun Kabupaten Dharmasraya berpartisipasi dalam kegiatan (*even*) Tour De Singkarak. Hal ini perlu diikuti dengan pembinaan olahraga semakin baik dari tahun ke tahun. Diharapkan dari tahun ke tahun hendaknya lahir atlit-atlit berprestasi di kancah Nasional ataupun Internasional.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum disajikan berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 5 urusan pendukung ditambah dengan bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah dan urusan kesatuan bangsa dan politik yang masih dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan bangsa dan Politik, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar.

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib**

##### **A.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar adalah : pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

#### **1. Bidang Pendidikan**

Mulai tahun anggaran 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan kependidikan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian penyajian indikator kinerja dan analisa hanya menampilkan hingga tingkat pendidikan dasar saja. Secara umum Kabupaten Dharmasraya memiliki fasilitas pendidikan sebanyak 153 SD, 6 unit MI atau SD dan MI sebanyak 159 sekolah, sedangkan untuk SMP tercatat sebanyak 36 SMP, 19 MTs atau SMP dan MTs tercatat sebanyak 55 sekolah. Untuk tingkat SD terdapat 2 sekolah SD swasta dalam bentuk SDIT yang terdapat di Kec. Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru, hingga

tahun 2018, masih terdapat 1 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atau sederajat, yaitu Kecamatan Padang Laweh. Sedangkan pendidikan tingkat menengah mulai Tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

**Tabel 2.15            Indikator Pendidikan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka partisipasi sekolah					
	- APS 7-12 Tahun	100	98,24	98,70	99,31	99,45
	- APS 13-15 Tahun	94,77	96,63	96,32	96,65	96,05
2	Angka melanjutkan tingkat SD/MI ke SMP/MTs	n/a	n/a	n/a	125,81	134,31
3	Angka mengulang tingkat SD/MI	n/a	n/a	n/a	3,81	3,12
4	Angka mengulang tingkat SMP/MTs	n/a	n/a	n/a	0,73	0,54
5	Angka kelulusan tingkat SD/MI	100	100	100	100	100
6	Angka kelulusan tingkat SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Pendidikan Tahun 2020

APS menunjukkan persentase penduduk yang dikelompokkan pada usia jenjang pendidikan yang diserap oleh sistem pendidikan berdasarkan kelompok umur tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang dijalannya.

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,45, artinya dilihat dari angka capaian, maka hampir semua penduduk usia 7-12 tahun ditampung oleh sistem pendidikan, namun pada APS 13-15 tahun, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 96,05, ini artinya masih membutuhkan campur tangan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung sistem pendidikan untuk penduduk usia tersebut. Dilihat dari keterkaitan dengan indikator lain, seperti angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah, rendahnya APS 13-15 dibandingkan APS 7-12 dapat disebabkan oleh faktor putus sekolah serta angka melanjutkan yang masih kurang dari tingkat SD/MI ke SLTP, serta dukungan faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah, tenaga kependidikan, dan lainnya.

## 2. Bidang Kesehatan

Untuk melihat perkembangan dan capaian pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator berikut :

### a) Angka Kematian Balita (Akaba)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, yang dinyatakan dengan angka kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

**Tabel 2.17 Angka Kematian Balita  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kematian balita	15	10	25	12	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

AKABA selama lima tahun terakhir berfluktuatif yaitu sebesar 15 per 1.000 KH tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 25 per 1.000 KH tahun 2017 dan turun lagi 11 per 1.000 KH di tahun 2019. Beberapa penyebab kematian pada balita antara lain penyakit infeksi, ISPA dan diare pada balita, kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada balita, serta rendahnya pemberian imunisasi pada balita.

### b) Prevalensi Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- rendah = di bawah 10 %
- sedang = 10-19 %
- tinggi = 20-29 %
- sangat tinggi = 30 % atau lebih

**Tabel 2.18 Prevalensi Gizi Buruk  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi Gizi Buruk	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%

Sumber Dinas Kesehatan, Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, secara keseluruhan dari tahun 2015 ke tahun 2019 status gizi buruk pada kategori rendah. Langkah yang telah diupayakan untuk mengurangi kasus gizi buruk antara lain melalui program gerakan 1000 HPK di nagari, penyuluhan gizi, peningkatan cakupan penimbangan balita, intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di pemberian makanan tambahan dan pemulihan bagi balita dengan gizi kurang dan revitalisasi gizi masyarakat.

c) Prevalensi Stunting

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius.

**Tabel 2.19 Prevalensi Stunting  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Prevalensi stunting	n/a	30	25	15	7,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting menunjukkan kecendrungan menurun dari tahun 2016 ke tahun 2019. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Dharmasraya melakukan penyuluhan pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, edukasi pola asuh orang tua terhadap balita serta program pengembangan lingkungan sehat berupa akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar pada masyarakat.

d) Persentase Puskesmas Terakreditasi

Fasilitas kesehatan puskesmas sudah baik, dari 11 kecamatan, saat ini sudah terdapat 14 puskesmas.

**Tabel 2.20 Persentase Puskesmas Terakreditasi  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Puskesmas Terakreditasi	-	13	42,86	85	93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020



e) Persentase Rumah Sakit Akreditasi Utama

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Periode lima tahun terakhir, persentase rumah sakit menunjukkan peningkatan dari akreditasi dasar pada tahun 2016 menjadi akreditasi utama di tahun 2018 (bintang 4), sedangkan RSUD Sei Rumbai dalam proses menuju terakreditasi dikarenakan baru beroperasi di tahun 2019.

**Tabel 2.21 Persentase Rumah Sakit Akreditasi Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Utama	n/a	Dasar	n/a	100	n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

f) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular (TBC) dan DBD)

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah dilakukan pengembangan *Early Warning and Respons System* (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa).

**Tabel 2.22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	51	53,7	67,07	49,7	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	141	174	220	192	535
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	276	324	328	386	535
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	135	349	60	39	29
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	135	349	60	39	29

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Pada akhir tahun 2015 Dharmasraya mengalami KLB kasus DBD dengan adanya yang korban meninggal dunia. Kejadian DBD ini masih berlanjut hingga awal tahun 2016 dengan adanya pasien rawat inap penyakit DBD di RSUD Sungai Dareh. Namun dari tahun 2016 ke tahun 2019 menunjukkan penurunan dikarenakan dinas kesehatan dan pihak terkait telah melakukan berbagai himbauan dan *fogging* pada titik-titik kejadian masyarakat yang terjangkit DBD.

Sedangkan untuk kasus TBC BTA, terdapat beberapa kasus yang terkait dengan keengganan pasien suspect TBC yang tidak melapor dan datang ke Puskesmas sehingga dilakukan kunjungan rumah ke rumah, sehingga pada tahun 2019, 100% pasien TBC yang terlayani termasuk juga kasus DBD. Untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini perlu adanya peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih sehat (PHBS) bagi masyarakat, terutama di lingkungan yang ada masyarakat kasus TBC BTA.

- g) Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV  
Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.23 Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	n/a	90	95	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Kasus HIV/AIDS ditemukan melalui pelaksanaan screaning pada populasi beresiko penyakit HIV/AIDS. Beberapa titik yang dipantau terdapat di Kecamatan Pulauunjung dan Kecamatan Koto Baru yang dilaksanakan dua kali setahun. Kondisi capaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2016 terhadap tahun 2019 dikarenakan penyebaran penyakit HIV dan AIDS dipengaruhi oleh faktor letak daerah, perilaku sosial masyarakat pada beberapa titik lokasi hiburan yang dipantau, penyalahgunaan narkoba dan meningkatnya perilaku menyimpang.

- h) Cakupan Penangan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun keatas)

**Tabel 2.24 Cakupan Penangan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun keatas)**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Penangan Penderita Hipertensi	n/a	85	80	93	100
2.	Cakupan Penangan Penderita Diabetes Melitus	n/a	n/a	79	82,11	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Perkembangan cakupan Penangan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun cenderung meningkat lima tahun terakhir dikarenakan perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik selain itu penderita Hipertensi dan penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun tidak menyadari jika dirinya menderita Hipertensi dan Diabetes Melitus sehingga datang pada kondisi tingkat lanjut. Guna mengatasi hal ini deteksi dini, edukasi dan perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting ditanamkan pada masyarakat.

- i ) Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat

**Tabel 2.25 Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat	n/a	80	85	85,4	93,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 namun belum mencapai target standar pelayanan minimal menurut PMK No 4 Tahun 2019 dikarenakan masyarakat lebih memilih memasing pengidap gangguan jiwa berat (ODGJ) dibanding melakukan pengobatan serta kurangnya kepemilikan kartu JKN penderita ODGJ.

- j) Persentase Kejadian Luar biasa yang ditangani < 24 jam

Pada tahun 2019, terjadi 2 kasus kejadian Luar Biasa keracunan pangan yaitu bulan Agustus dan Desember. Agustus di jorong Koto Tuo nagari Siguntur Kecamatan Sitiung, dengan jumlah penderita keracunan 68 orang, dua orang diantaranya meninggal dunia. Desember, keracunan pangan di pondok pesantren Ulul Abab Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru dengan jumlah penderita keracunan

sebanyak 47 orang. Sedangkan pada tahun 2018 hanya terjadi satu kasus yaitu keracunan pangan pada 7 orang murid SDN 03 di wilayah kerja Puskesmas Sungai Rumbai.

k) Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit dilihat dari tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit antara lain :

**Tabel 2.26 Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Akreditasi rumah sakit		Dasar		Utama	
2.	Bed Occupancy Rate (BOR)	54,82	56,8	60,1	60,1	66,1
3.	Average Length of Stay (AVLOS)	4,34	4,2	4,3	4,2	4,4
4.	Turn Over Internal (TOI)	2,75	3	3	3	1,8
5.	Bed Turn Over (BTO)	59,96	60	65,3	60,5	70,4
6.	Net Death Rate (NDR)	8,92	0,007	0,007	0,009	0,011
7.	Gross Death Rate (GDR)	33,94	0,026	0,026	0,030	0,031

Sumber : RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang memiliki 11 (sebelas) sub urusan, yaitu : Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, Penataan Ruang. Urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan pembangunan sebagian besar infrastruktur daerah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya. Jika ditinjau dari kondisi daerah serta dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (nasional dan provinsi) maka kebutuhan pembangunan untuk infrastruktur Dharmasraya masih membutuhkan penanganan yang masih besar. Tak heran sebagai daerah otonom yang relatif baru hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Untuk melihat perkembangan pembangunan yang ditinjau dari indikator kinerja untuk urusan pemerintahan bidang PUPR dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- Proporsi Jalan kabupaten dalam kondisi baik  
Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang terdiri dari bidang kebina-margaan dan bidang ciptakarya. Pekerjaan yang terkait yaitu pembangunan jalan, jembatan, penanganan sampah, irigasi dan penataan lingkungan perumahan. Berdasarkan data dasar jalan, Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 3 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 60,62 km; jalan Provinsi panjang 67,9 km; jalan kabupaten 1042,85 km, sehingga panjang total jalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 1171,37 km.

**Tabel 2.27 Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66,70	38,94	52,21	53,76	31,38
	Panjangjalankondisibaik	787	454,62	613,67	53,76	367,61
	PanjangJalan (Km)	1.180	1.167,52	1.175,37	627,75	1.171.37
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	86,71	31,20	46,23	49,41	32,54
	Panjangjalankabupatendalamkondisibaik	898	323,11	46,23	515,35	339,41
	Panjangseluruhjalankabupatendidaerahtersebut	1.036	1.036	1.042,85	1.042,85	1.042,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

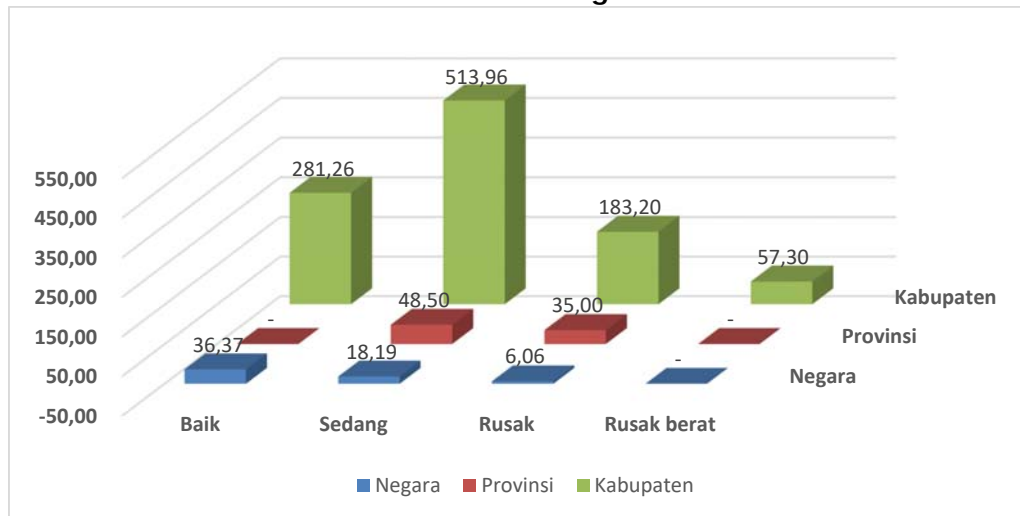
Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2.28 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020**

Kondisi Jalan	Status			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	13,00	15,20	339,41	367,61
Sedang	44,62	43,20	175,94	260,14
Rusak	2,00	2,50	432,13	436,63
Rusak berat	1,00	7,00	95,37	103,37
<b>Total</b>	<b>60,62</b>	<b>67,90</b>	<b>1042,85</b>	<b>1.171.37</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

**Gambar 2.4. Panjang jalan menurut kondisi dan pemerintah yang berwenang**



- Akses Air minum layak  
Upaya untuk meningkatkan akses air minum diantaranya dengan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS ataupun PAMSIMAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

**Tabel 2.29 Akses Air minum layak  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Akses Air minum layak	n/a	14,53	16,26	19,36	19,67

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

- Akses Sanitasi layak  
Akses layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Untuk mengatasi permasalahan di sektor sanitasi, pemerintah Kabupaten Dharmasraya ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melakukan penilaian resiko kesehatan lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA).

**Tabel 2.30 Akses Sanitasi layak  
kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Akses Sanitasi layak	71,03	39,99	39,79	40,01	69,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

#### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas pemukiman. Pembangunan tersebut meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak dan terjangkau yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Selain tiga bentuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas pada kawasan pemukiman, kab/kota juga memiliki kewajiban dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan pemukiman, dimana berdasarkan UU 23/2014 kewenangan kabupaten/kota adalah pada kawasan pemukiman yang memiliki luas kawasan kurang dari 10 Ha serta termasuk penanganan kawasan pemukiman kumuh.

Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu/terintegrasi antara berbagai bentuk pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan pemukiman, maka diharapkan dapat berdampak pada peningkatan indikator kinerja pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

**Tabel 2.31** Indikator bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan permukiman layak huni	n/a	n/a	82,5	83,32	88,69
Cakupan Rumah Layak Huni	92	94	88	89	91,98
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n/a	n/a	7	20,54	22,53
Persentase permukiman yang tertata	n/a	n/a	71	64,29	65,34
Persentase lingkungan permukiman kumuh	27	27	17	12	10,94
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	60	68,23	77,75

## 5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan kewenangan pada urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 sub bidang, yaitu sub bidang ketertiban dan sub bidang kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sub bidang bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketiga hal tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan daerah yang aman, nyaman sekaligus dapat menjadi daya tarik dalam menciptakan iklim investasi dan percepatan perekonomian daerah.

Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk yang terdiri dari multietnis dan berbagai suku, hal ini terutama dipengaruhi oleh histori daerah yang memiliki kawasan transmigrasi, adanya migrasi penduduk tinggi serta terletak di jalur lintas sumatera, sehingga dengan potensi tersebut maka perlu menjaga iklim aman dan nyaman menjadi tantangan yang cukup menantang.

Pada sisi kebencanaan, Dharmaraya cenderung memiliki kontur daerah yang datar serta memiliki kawasan hutan dan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang cukup luas, sehingga kejadian bencana yang sering terjadi adalah berupa banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan kawasan pemukiman. Untuk itu hal yang perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pergantian musim hujan dan musim kemarau.

**Tabel 2.32 Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase cakupan penegakan PERDA	n/a	80	80	80	80
Cakupan pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	n/a	100	100	100	100
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat	n/a	48 kali	48 kali	48 kali	44 kali
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	n/a	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja Tahun 2020

## 6. Bidang Sosial

Perkembangan indikator bidang sosial di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terlihat positif yang terlihat adanya percepatan, hal ini terlihat dari peningkatan persentase Penderita Masalah



Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun persentase penanganan terhadap PMKS. Bantuan sosial yang diberikan setiap tahunnya cenderung naik, sehingga jumlah cakupan PMKS juga menurun. Saat ini telah ada panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 2 buah, sejalan dengan kegiatan pembangunan maka diperlukan program-program kemandirian sehingga para PMKS dapat berkarya ditengah-tengah masyarakat dan hidupnya lebih mandiri. Guna mendukung hal ini diperlukan program pembinaan kader-kader dan peningkatan jumlah pembina sosial.

**Tabel 2.33 Indikator Bidang Sosial  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	persentase PMKS yang tertangani	74,53	66,26	99,86	88,62	90
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	9.566	9.566	93.146	56.018	65.106
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	12.835	14.437	93.275	63.211	72.340

Sumber : Dinas SosP3KB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

## **Bidang Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

### **1. Bidang Tenaga Kerja**

Daya saing tenaga kerja merupakan kata kunci dalam peningkatan kinerja bidang ketenaga kerjaan, dengan semakin membaiknya pembangunan ekonomi daerah, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meskipun angka ini masih berfluktuasi dan masih dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Untuk itu ke depan pasar tenaga kerja semakin dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, berkeahlian dan kerketerampilan, oleh sebab itu perlu berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Usaha itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja sekaligus hendaknya dapat langsung disalurkan pada dunia kerja.

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 65,50 % dengan tingkat pengangguran 5,80% pada tahun 2019. Tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun dari tahun 2015 yang berjumlah 3,51%. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun terhadap total jumlah angkatan kerja yang ada.

**Tabel 2.34 Indikator Bidang Tenaga Kerja  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,51	3,38	3,69	3,94	5,80
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,88	66,50	66,96	64,53	65,50

Sumber : Dinas Sosnakertrans Tahun 2020 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan prosesnya di pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan dilakukan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Sedangkan untuk perlindungan anak dan perempuan dilakukan agar tersedianya sistem perlindungan anak dari berbagai kekerasan terhadap anak serta perlakuan lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak perempuan dan kelompok marginal

Berdasarkan pengaduan yang diterima, rasio KDRT menunjukan angka yang fluktuatif dari 0 % hingga 0,002% di tahun 2019 sedangkan rasio perempuan korban kekerasan menunjukan korban tertangani seluruhnya. Namun hal ini bukan berarti tidak terdapat kasus kekerasan perempuan lagi dimasyarakat sebagaimana yang dikatakan para ahli bahwa kasus ini merupakan puncak gunung es yang sewaktu-waktu dapat meletus. Oleh sebab itu bidang yang menangani harus proaktif melakukan sosialisasi akan hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 2.35 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,29	88,29	88,91	88,26	88,30
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47,47	48,01	48,91	50	50
3	Persentase keaktifan focal point Perangkat Daerah	n/a	n/a	44,11	44,11	100
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	73,51		85,71	85,71	90,47
5	Menuju Kota layak anak	n/a	n/a	142 point	250 point	500 Point
6	Rasio KDRT	0	0	0,02	0,01	0,002

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
7	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	n/a	n/a	n/a	100	100
8	rasio anak korban kekerasan yang tertangani	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3APKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan BPS Sumatera Barat Tahun 2020

### 3. Bidang Pangan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sudah menjadi isu nasional untuk ditetapkan areanya. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki Bendungan Batanghari dengan debit 30.000 meter kubik diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Oleh sebab itu perlu ditetapkan lokasi-lokasi yang akan menjadi areal LP2B. Saat ini telah terinventarisir 2079, 4 Ha lahan yang terpetakan untuk dijadikan LP2B, 4698,5 Ha yang sudah terdata, sehingga ada 2590,3 Ha lahan cadangan untuk pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dari 33.766 Ha lahan potensi yang bisa dikembangkan dari lahan kering dan rawa. Penetapan ini nantinya dikukuhkan melalui perda. Oleh sebab itu perlu peran aktif pemerintah daerah untuk mewujudkan dan mensosialisasikannya.

**Tabel 2.36 Indikator Bidang Pangan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan Energi Protein perkapita (gram)	237,67	78,58	87,9	83,90	90,21
2	Penguatan Cadangan Pangan (ton)	55,22	25,00	30,00	14,08	18,1
2	Skor Pola Pangan Harapan (%)	75,9	76,50	80,40	80,40	89,4

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

Keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada sumbangan energi dari sembilan kelompok pangan utama yaitu antara lain padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah. Lima tahun terakhir PPH terus meningkat dari 75,9 di tahun 2015 dan 89,4 di tahun 2019, ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dalam bentuk sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan.

### 4. Bidang Pertanahan

Kepastian akan hak tanah bagi masyarakat merupakan salah satu unsur keamanan, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir

ini terlihat beberapa kasus pertanahan membutuhkan penanganan yang baik, namun kasus tersebut makin lama makin menurun. Oleh sebab itu bidang pertanahan harus proaktif dalam memberi kepastian hukum berupa sertifikasi lahan bagi masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi program nasional, karena masih terdapat lahan-lahan yang dimiliki masyarakat belum memiliki sertifikat.

**Tabel 2.37 Indikator Bidang Pertanahan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	64	65	64,83	65,88	66,35
2.	Persentase penyelesaian kasus tanah pemerintah	0	100	40	100	88,88

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

## 5. Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Dharmasraya yang saat ini tumbuh dengan pesat perlu pengendalian terhadap dampak pembangunan dengan melakukan pengontrolan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang terjadi. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang menjamin baik air, tanah, dan udara dan kawasan sumber daya lahan Kabupaten Dharmasraya masih layak untuk kehidupan. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi saat ini masih ada yang belum tertangani. Oleh sebab itu bidang lingkungan harus proaktif menjaga lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sosialisasi penggunaan ruang yang ramah lingkungan sambil terus mengawasi kualitas lingkungan. Kasus-kasus saat ini terutama tambang liar pada daerah hulu sangat merugikan masyarakat dan sektor lain terutama yang terkait dengan penyediaan air minum, perikanan, dan irigasi pertanian.

**Tabel 2.38 Indikator Bidang Lingkungan Hidup  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	62,33	63,58	62,52	55,51
2.	Persentase timbulan sampah yang tertangani	2,07	2,09	1,77	22,21	51,97
	Volume sampah yang ditangani (ton)	4.416	4.680	3.720	39.705,78	86.345
	Volume produksi sampah (m <sup>3</sup> )	213.776	224.314	209.520	2.091,20	35.060,29
3.	Jumlah kawasan sumber daya lahan yang harus dilindungi	n/a	n/a	n/a	1	1

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Jumlah Kawasan Sumber daya air yang harus dilindungi	n/a	18	22	1	1
4.	Persentase menurunnya lahan kritis	n/a	n/a	n/a	100	96

Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Adapun salah satu sumber pencemaran berupa besarnya volume sampah yang tidak tertangani, Walaupun kondisinya volume sampah yang ditangani meningkat setiap tahun, namun masih diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi volume sampah akhir dalam bentuk kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga jumlah pada Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) akan semakin berkurang. Dimasa yang akan datang perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup perlu penanganan 3R yang terpadu dikembangkan di setiap kecamatan.

#### 6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis layanan yang dilaksanakan untuk bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengeluarkan 4 (empat) jenis dokumen kependudukan, diantaranya Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Keempat dokumen ini menggambarkan peristiwa penting bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan adanya terdatanya status kependudukan ini akan memperjelas kondisi dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan.

**Tabel 2.39 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	94	96	97	98	98,58
2.	persentase kepemilikan KTP-el	90,00	92,00	95,00	97	99,23
3.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	n/a	n/a	n/a	5	27,40
4.	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	65	75	80	82	85,73
5.	Jumlah pengurusan akta kematian	100	300	350	750	603
6.	Tingkat akurasi data base kependudukan	75	90	92	95	96,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Pelayanan identitas warga negara berupa Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya persentase penduduk yang memiliki KK dan KTP di Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya. Selain itu, pada saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) semakin dipermudah dengan adanya mobil pelayanan keliling Capil. Peningkatan kepemilikan e-KTP dan KK selama lima tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP dan KK hal ini ditunjang juga oleh program nasional KTP elektronik sehingga terdapat data base penduduk dan KTP berbasis NIK.

Pada pemilikan KIA, penerbitan akta kelahiran dan pengurusan angka kematian juga menunjukan angka yang cukup signifikan dikarenakan semakin gencarnya sosialisasi pentingnya pemilikan KIA, akta kelahiran termasuk akta kematian sebagai data dasar kependudukan yang turut berperan dalam meningkatkan tertib administrasi negara khususnya keakuratan data kependudukan.

## 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada disetiap nagari telah ada (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada. Namun hal ini tidak diiringi dengan kelompok binaan PKK. Dari jumlah PKK yang tersebar di Dharmasraya sebanyak 64 dan dalam kondisi aktif seluruhnya, maka kelompok yang dibina hanya 3 (tiga) PKK. Ibu-ibu memegang peran penting dalam pembangunan maka dimasa yang akan datang pembinaan PKK akan penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama diperdesaan.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu hamil, balita dan bayi saat ini berjumlah 257 buah. Posyandu sangat penting artinya bersama sarana kesehatan lainnya untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi serta gizi buruk. Pada tahun 2015 jumlah posyandu aktif sebanyak 77% dan yang tidak aktif sebanyak 23%. Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan posyandu oleh tenaga kesehatan yang pada sebagian wilayah di Kabupaten Dharmasraya masih dirasa kurang.

**Tabel 2.40 Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	n/a	55,77	26,92	23,08	23,07

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Persentase profil desa dan kelurahan (Prodeskel) yang dimanfaatkan dalam pembangunan nagari	n/a	57,69	67,31	76,92	100
3.	Persentase nagari memiliki BUM-Nag aktif	n/a	23,08	76,92	82,69	100
4.	Persentase kelompok PKK yang aktif	100	100	100	100	100
5.	Persentase strata Posyandu yang mandiri	n/a	44,9	46,94	48,37	41,46
6.	Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan	n/a	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3APKB dan Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menindaklanjuti relatif masih tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih tingginya angka kelahiran, maka diperlukan koordinasi antara penyuluh KB dan tenaga kesehatan di nagari termasuk sosialisasi pentingnya KB.

Perkembangan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan faktor ekonomi dan tingkat pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui bahwa pelayanan KB di Puskesmas gratis (khususnya daerah perbatasan).

Peserta KB yang tidak mendapat pelayanan (*unmet need*) masih banyak terdapat. Oleh sebab itu peran kader dan penyuluh KB sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) terutama mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan berkala maupun secara mandiri.

**Tabel 2.41 Indikator Bidang Keluarga Berencana  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	n/a	n/a	n/a	n/a	79,54
2.	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)	n/a	n/a	n/a	11,54	10,75

Sumber : DinsosP3KB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 9. Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan terkait dengan kelancaran arus transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas yang tinggi seiring dengan pembangunan

Kabupaten Dharmasraya menuntut Bidang perhubungan menyediakan rambu-rambu dan peraturan untuk keselamatan para penumpang, pengemudi dan pejalan kaki. Dengan adanya kelengkapan rambu-rambu tersebut, pemeriksaan secara reguler faktor keamanan berlalu lintas terutama kendaraan yang melaju di jalan negara, provinsi dan kabupaten bersama-sama kepolisian diharapkan bisa menekan angka kecelakaan sekaligus mendidik masyarakat berdisiplin lalu lintas.

**Tabel 2.42 Indikator Bidang Perhubungan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kasus kecelakaan	88	91	76	61	87
2.	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	n/a	50	50	67	109
3.	Persentase keterpasangan marka jalan	n/a	n/a	n/a	0,064	0,064
4.	Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	n/a	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	6 kecamatan
5.	Jumlah trayek angkutan umum	n/a	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
6.	Jumlah terminal	n/a	1 terminal	1 terminal	2 terminal	1 terminal
7.	Jumlah Fasilitas Perpajakan Umum	n/a	6	6	6	6
8.	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	n/a	n/a	n/a	C	C
9.	Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	n/a	75	77	80	60

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

#### 10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Cukup pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia menuntut adanya perubahan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah, adanya website sebagai wadah dalam memberikan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini sudah terdapat web site milik pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu web ini harus terkait dengan bidang-bidang lainnya sampai pada level nagari sehingga dapat dikembangkan satu web yang terintegrasi pada pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Updating data dapat perlu dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dimasa yang akan datang



diharapkan web yang terintegrasi ini dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik.

**Tabel 2.43 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	n/a	0,0	32,43	51,35	51,35
2	Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	n/a	0	15,30	46,10	46,10
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari	n/a	0,0	12	21	21
4	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	n/a	0	54,05	67,56	67,56

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

#### 11. Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Dilihat berdasarkan data keragaan, jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 mengalami peningkatan dari 200 koperasi menjadi 204 koperasi di tahun 2019. Namun jumlah koperasi aktif menurun dari 93 koperasi aktif pada tahun 2015 menjadi 80 koperasi aktif di tahun 2019. Terkait dengan hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya pembinaan, baik dalam aspek kelembagaan dan SDM, produksi, pembiayaan, hingga aspek pemasaran. Terkait dengan jumlah pelaku usaha mikro (UMKM) naik kelas atau *scallling up* sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk UMKM, intervensi yang diberikan diantaranya dalam bentuk fasilitasi standarisasi UMKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk

**Tabel 2.44 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase koperasi aktif	47	54	45	38,42	39,22
jumlah koperasi sehat	n/a	5	7	15	25
Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	n/a	15	20	25	34

Sumber : Dinas Kopperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 12. Bidang Penanaman Modal

Modal yang ditanam di Kabupaten Dharmasraya terlihat sangat pesat yang dibuktikan dengan pembangunan oleh pihak swasta melebihi pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pada lokasi-lokasi strategis yaitu di kiri-kanan jalan negara. Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi sumber daya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan Dharmasraya sangat diminati oleh para investor terutama dalam bidang pertanian, dan jasa. Penanaman modal dimasa yang akan datang diharapkan muncul dari berbagai komponen masyarakat dalam bentuk ventura maupun sharing dengan pihak-pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat berupa koperasi dan badan usaha milik desa/nagari.

**Tabel 2.45 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai realisasi Investasi	144.240.000.000	156.805.000	163.766.000	167.035.200	221.086.289.380
2.	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	11	51	55	59	495
3.	Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)	n/a	15	14	14	14

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2015 sampai 2019. Kedepan perlu pemuda didorong untuk berorganisasi sehingga pemuda mempunyai wadah untuk mengembangkan potensinya. Keberhasilan menyelenggarakan Porda Sumatera Barat dengan

tersedianya GOR yang representatif dapat mendorong pembangunann dibidang keolahragaan di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi keolahragaan.

Berdasarkan perkembangan data, terlihat masih minimnya pembinaan kepemudaan dan bidang olah raga di masyarakat. Sehingga ke depan perlu peningkatan pembinaan khususnya cabang olah raga serta atlit berprestasi. Dengan adanya sarana sport center yang telah dibangun maka perlu penggunaan secara optimal.

**Tabel 2.46 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase cabang olahraga yang aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	90
2.	peringkat dalam event tahunan	-	-	-	-	-
3.	jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali	-	-	-	-	-
4.	Jumlah pemuda berperestasi	-	85	15	113	112

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

#### 14. Bidang Statistik

Mulai tahun 2015, penyelenggaraan statistik dasar dalam bentuk produk buku Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Dharmasraya tidak lagi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya. sehingga kedua jenis keluaran tersebut tetap ada namun langsung dikeluarkan oleh BPS. Dengan adanya perubahan tersebut maka ke depan yang akan dilakukan oleh pemda adalah dalam bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Statistik  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	n/a	n/a	0	75	80

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

#### 15. Bidang Persandian

Bidang persandian merupakan bidang urusan pemerintahan yang lahir berdasarkan pembagian urusan pada Undang-Undang 23/2014. Bidang persandian bertujuan untuk Pengamanan Informasi pemerintah serta

penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan mulai tahun 2017.

#### 16. Bidang Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multi-etnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sejarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan budaya sejarah sesuai dengan kewenangan daerah terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya.

**Tabel 2.48 Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah cagar Budaya yang dilestasikan	n/a	n/a	n/a	n/a	8
	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	19
4.	Jumlah Grup Kesenian Daerah Yang di Lestasikan	n/a	n/a	n/a	n/a	30

Sumber : Dinas Budparpora, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa yang tampak (*tangible*) maupun yang tidak tampak (*intangible*) perlu mendapatkan perhatian yang lebih dimasa yang akan datang karena banyaknya peninggalan budaya yang ada di Dharmasraya sehingga identitas Dharmasraya dapat dimunculkan.

#### 17. Bidang Perpustakaan

Masih kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengindikasikan budaya membaca saat ini kurang. Hal ini terasa dengan semakin sedikitnya waktu yang digunakan untuk membaca terutama anak-anak dan remaja dibanding waktu yang digunakan untuk hal lain terutama *gadget* dan teknologi informasi. Keberadaan pustaka yang menarik bagi anak-anak dan remaja maupun

dewasa dan orang tua penting artinya dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat. Saat ini jumlah kunjungan-kunjungan ke perpustakaan daerah sangat rendah. Walaupun terjadi peningkatan dalam kunjungan pada tahun 2015. Oleh sebab itu koleksi buku, faktor pelayanan di perpustakaan, dan kenyamanan selama di perpustakaan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan.

**Tabel 2.49 Indikator Bidang Perpustakaan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	n/a	17.136	22.447	129.500	157.579
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah	n/a	213	324	300	460
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling	n/a	16.923	11.882	5.885	7.889
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah	n/a	n/a	10.241	120.230	148.310
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari	n/a	n/a	n/a	335	654
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM	n/a	n/a	n/a	385	266
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	n/a	4,04	2,94	7,35	8,09

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 18. Bidang Kearsipan

Pengelolaan bidang kearsipan di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku adalah 2 Perangkat Daerah. Dalam Hal ini bukan berarti perangkat daerah lainnya belum sepenuhnya mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan kata lain penyimpanan dilakukan di Perangkat Daerah masing-masing, oleh sebab itu bidang kearsipan strategi agar seluruh perangkat daerah dapat mengelola arsip secara baku sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 2.53 Indikator Bidang Kearsipan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengelolaan arsip secara baku (persen)	89,19	8,11	7,89	7,89	7,89
	Jumlah perangkat daerah yang telah	33	3	3	3	3

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
	menerapkan arsip secara baku					
	Jumlah perangkat daerah	37	37	38	38	38
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	n/a	0	1,92	3,85	5,77

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 89,19% di tahun 2015 ke 7,89% di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan metode penghitungan yang dilakukan pada tahun 2015 didasarkan pada Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya. Mulai tahun 2016 metode penghitungan menggunakan kriteria perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dari total Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

## **Layanan Urusan Pilihan**

### **1. Bidang Pariwisata**

Kepariwisataan masih belum berkembang secara baik di Kabupaten Dharmasraya. Namun di sisin lain Dharmasraya memiliki Potensi-potensi wisata, apabila dikembangkan dapat menjadi daya dukung dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, terutama wisata sejarah dan wisata alam. Diantara kegiatan kepariwisataan yang dapat dikembangkan yaitu membuka akses ke objek wisata potensial dan mengadakan event budaya yang didukung oleh masyarakat yang multietnis. Saat ini telah ada rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten yang akan menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah pariwisata budaya terutama peninggalan kerajaan Dharmasraya dan pariwisata alam terutama dikiri kanan pinggir Sungai Batanghari serta pengembangan potensi wisata lainnya.

**Tabel 2.54 Indikator Bidang Pariwisata  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah destinasi pariwisata daerah	n/a	30	33	35	15
2	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	n/a	108	135	168	713

Sumber : Dinas Budparpora, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 2. Bidang Pertanian

Perkembangan bidang pertanian dapat dilihat dari nilai dan kontribusi produk yang dihasilkan. Produk Domestik Regional Bruto bidang pertanian menampilkan jumlah produksi pertanian dari berbagai sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dicermati bahwa nilai produksi setiap sub sektor selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut dikarenakan faktor ekstensifikasi atau intensifikasi pertanian karena pertanian sangat berkaitan erat dengan lahan.

**Tabel 2.55 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>						
	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	1.739,01	1.833,70	1.929,50	2.007,36	2.108,21
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.6379,94	1.6379,94	1.725,42	1.800,13	1.894,53
	a. Tanaman Pangan	200,55	200,55	203,30	215,87	224,39
	b. Tanaman Hortikultura	22,39	22,39	23,17	23,91	23,58
	c. Tanaman Perkebunan	1.276,89	1.276,89	1.354,31	1.412,16	1.493,58
	d. Peternakan	10,21	10,21	109,28	112,40	116,00
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	33,89	33,89	35,33	35,78	36,98
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	101,62	101,62	106,94	104,33	106,86
	3. Perikanan	92,14	92,14	97,14	102,90	106,82
	<b>TOTAL PDRB</b>	<b>5.821,73</b>	<b>6.156,75</b>	<b>6.490,29</b>	<b>6.884,13</b>	<b>7.208,32</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

Lahan yang dapat diolah di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan luas lahan kabupaten sangatlah tinggi karena lahan yang terkendala misalnya kawasan lindung sangat sedikit terdapat di Dharmasraya. Sumber daya lahan telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dari tabel kontribusi terlihat bahwa sumbangan setiap sub sektor hampir sama setiap tahun, namun jika dibanding dengan sektor lainnya sektor pertanian kontribusinya semakin menurun. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan jumlah produksi pada masing-masing sub sektor sekaligus konsentrasi pada jenis komoditas paling potensial dikembangkan dari sub sektor tersebut. Pertanian tanaman pangan, integrasi perkebunan dan peternakan serta pengembangan potensi perikanan merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.

### -sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2015 sampai tahun 2019. Langkah menetapkan lahan pangan

berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat tepat untuk mengembalikan lahan-lahan potensial yang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain, terutama pada daerah irigasi teknis sungai Batanghari, sehingga dapat mewujudkan Dharmasraya sebagai lumbung padi nasional. Ketahanan tidak hanya menyangkut tanaman pangan untuk makanan pokok tetapi juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu integrasi perkebunan dengan peternakan (sapi) perlu ditingkatkan terutama pada perkebunan besar.

**Tabel 2.56 Produksi dan Produktivitas  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Keterangan		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produksi</b>						
-	Produksi Padi Sawah (ton)	57.356	59.282	58.265	58.848	68,70
-	Produksi Jagung(ton)	887	2.590	10.000	15.500	5.259
-	Produksi Kedelai (ton)	7	78	80	80	32
-	Hortikultura : Duku (ton)	1.499	6.661	6.785	6.727	985
-	Hortikultura : Jeruk (ton)	765,8	200	200	340	348
-	Hortikultura : Cabe (ton)	177,7	185	190	198	651,80
<b>Produktivitas</b>						
-	Produktivitas Padi Sawah (Kui/Ha)	4,7	4,8	4,4	4,3	46,17
-	Indeks panen padi (kali)	n/a	1,85	1,85	1,85	2,2
-	Luas panen padi (Ha)	12.117	12.358	13.168	13.826	14.774
<b>Luas /Populasi</b>						
-	Luas sawah (hektar)	6.497	6.669	6.785	6.805	6.094

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2020

#### -sub sektor perkebunan

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

**Tabel 2.57 Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Keterangan		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produksi</b>						
-	Karet (ton)	32.784,5	36.135	29.019	29.832,14	29.615,41



Keterangan		2015	2016	2017	2018	2019
-	Sawit (ton)	74.020	84.867	108.593	85.741,40	104.626
-	Coklat (ton)	1.258,04	549,94	2.553,85	2.324,70	2.400,87
<b>Produktivitas</b>						
-	produktivitas sawit (Ton/Ha)	2,43	2,76	3,46	2,68	4,67
-	produktivitas karet	0,85	0,93	0,71	0,71	0,866
<b>Luas /Populasi</b>						
-	luas perkebunan sawit (kebun rakyat)	30.495,19	30.704	31.413	32.042	32.397,64
-	luas perkebunan karet (kebun rakyat)	38.432,5	38.908	40.974	41.793	40.911,90
-	luas perkebunan kakao	1.984,81	4.058	3.903	3.981	3.773,90
-	panjang jalan usaha tani	n/a	5	5	10	2,77
-	panjang jalan produksi	n/a	35	50	65	40,86
<b>Kelembagaan</b>						
-	Kelompok tani naik kelas	n/a	5	20	30	86
-	Penumbuhan kelembagaan petani	n/a	5	5	5	013

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2020

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

#### -sub sektor peternakan

Dari delapan komoditi sub sektor peternakan, hampir semua komoditi mengalami perkembangan populasi positif, dan hanya itik yang tida

terjadi pengurangan. Perkembangan sapi potong didorong oleh berkembangnya integrasi sapi-sawit serta adanya berbagai skim kredit dari perbankan dan juga didukung kebijakan pemerintah untuk terus mendorong perkembangan sapi. Untuk populasi ayam petelur maupun buras juga terjadi peningkatan yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam peternakan ayam, khususnya ayam pedaging

**Tabel 2.58 Produksi dan Populasi Populasi Ternak Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produksi</b>					
- produksi daging (ton)	931,942	1.072	1.072	1.093	13.402,42
<b>Luas /Populasi</b>					
- populasi sapi/kerbau (ekor)	46.758	48.279	48.303	48.327	141.100

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2020

### 3. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor perdagangan menyumbang sekitar 13,38% s/d 14,43% terhadap total PDRB pada tahun 2015 sampai 2019 atau kontribusinya mengalami kenaikan kontribusi yang tetap tetapi jumlah produksi kegiatan sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya. Perdagangan terkait dengan penyediaan pasar. Pengembangan UMKK dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan komitmen pemerintah untuk merenovasi pasar-pasar tradisional di setiap nagari atau kecamatan dan pelarangan pemodal besar masuk pada sektor *retail* (eceran). Oleh sebab itu dimasa yang akan datang komitmen ini perlu diteguhkan dengan cara merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.59 Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pasar dalam kondisi baik (persen)	n/a	18	20	22	27,02
Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	n/a	8	8	8	8

Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Alat UTTP bertanda terasah (unit)	n/a	300	400	500	722

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

#### 4. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2015 sampai 2019 meningkat, namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan yang lebih tinggi dari jumlah PDRB keseluruhan, sehingga kontribusi sektor industri terlihat menurun. Perkembangan industri hilir berbahan baku sumber daya alam yang dihasilkan dari Kabupaten Dharmasraya perlu didorong sehingga terjadi peningkatan nilai tambah yang besar dari kegiatan hilirisasi tersebut.

**Tabel 2.60 Indikator Bidang Perindustrian  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	n/a	2	2	5	6,62
2	Persentase Pertumbuhan Industri IKM	n/a	7	7	7	7,59
3	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	n/a	10	11	21	25

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

#### 5. Bidang Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi penempatan transmigran dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Saat ini program tersebut sudah selesai dilakukan dan lokasi-lokasi transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya ke Pemerintah Kabupaten. Berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya, maka masih tersedia alokasi lahan seluas 1000 hektar yang dapat digunakan untuk transmigrasi dan selebihnya dapat digunakan untuk relokasi penduduk yang mendiami kawasan lindung.

**Tabel 2.61 Indikator Bidang Transmigrasi  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terbangunnya kawasan transmigrasi	0	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	0

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## 6. Bidang Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya berfluktuatif, terlihat berdasarkan data produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 sebesar 19.909 ton, produksi perikanan tangkap 395 ton ditahun 2017 menurun menjadi 15.360 untuk produksi perikanan budidaya, 201,8 untuk perikanan tangkap. Selanjutnya meningkat lagi hingga tahun 2019 menjadi 19.909 ton produksi perikanan budidaya dan 215,1 produksi perikanan tangkap. Perkembangan produksi perikanan tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok nelayan (petani ikan) berupa bantuan bibit dan cetak kolam.

**Tabel 2.62 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2019**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan budidaya	19.909	19.754	15.360	16.816	18.976
2	Produksi perikanan tangkap	395	273,6	201,8	191,7	215,1

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## Penunjang Urusan

### 1. Bidang Perencanaan Pembangunan

Di tahun 2015, dari 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah terpenuhi, namun dokumen perencanaan yang diacu oleh dokumen rencana di bawahnya terutama untuk kesesuaian program dalam RPJMD dengan RKPD belum sepenuhnya sesuai. Sehingga ke depan perlu adanya usaha untuk peningkatan kualitas dokumen serta menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, sehingga program yang ada di dalam RPJMD dapat dilaksanakan dan terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

**Tabel 2.63 Indikator Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Rangking 2 se Kab/kota	Rangking 3 se Kab/kota	Harapan 3 se Kab/Kota	-
2.	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah					96
4.	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	-	20%	25%	30%	23,07
5.	Persentase ketersediaan data perencanaan data pembangunan	-	75	80	90	90
6.	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	-		75	80	93,06

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

## **2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2019  
 TRIWULAN IV  
 KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket				
								I		II		III		IV				15=13/6 x100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17									
			URUSAN WAJIB		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1			PENDIDIKAN																						
			DINAS PENDIDIKAN																						
A			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	19.677.064.614	-	2.144.237.242	-	3.324.362.600	-	571.155.840	-	926.833.601	-	591.981.411	-	1.147.663.189	-	3.237.634.041	-	5.904.112.242	-	204		
B			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran	1.370.000.000		183.887.550		856.985.600	-	14.672.400	-	83.715.200	-	621.776.300	-	118.402.200	-	838.566.100	-	296.947.550	-	18	-	
C	Meningkatkan Demokrasi		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	25.437.601.500	-	811.144.237	-	2.402.044.050	-	-	-	396.757.000	-	913.709.300	-	1.211.384.793	-	2.521.851.093	-					
D			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun		38.665.987.250	-	4.695.038.950	-	37.452.575.150	-	63.558.983	-	10.708.689.444	-	10.961.038.453	-	14.908.805.822	-	36.642.092.702	-	5.279.086.986	-	108		
E			Program Pendidikan Non Formal		2.276.180.000	-	340.987.500	-	461.142.000	-	-	-	34.818.500	-	56.802.300	-	332.756.000	-	424.376.800	-	375.806.000	-	84		
F	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		9.724.370.000	-	764.761.412	-	6.199.739.000	-	24.521.790	-	1.696.660.263	-	193.834.061	-	3.727.787.017	-	5.642.803.091	-	2.507.142.675	-	121		
G			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		156.950.000.000	-	18.742.199.500	-	3.952.980.000	-	-	-	3.385.233.250	-	59.664.400	-	470.259.900	-	3.915.157.550	-	22.127.432.750	-	95		
TOTAL								54.649.828.400	-	673.908.979	-	17.232.707.258	-	13.398.806.325	-	21.917.058.921	-	53.222.481.377	-	36.490.528.203	-	630			
Rata-rata capaian kinerja (%)								1%		31,63%		24,52%		40,10%		97,39%									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								Tepat waktunya pelaksanaan kegiatan di lingkup OPD Dinas Pendidikan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja								Kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan TA 2019 di lingkup OPD Dinas Pendidikan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								Lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kegiatan yang maksimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								Lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan setiap kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan																	
2			DINAS KESEHATAN																						
1	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	###	7.232.000.000	##	3.968.902.939	####	4.579.325.100	-	177.921.601	-	1.816.502.164	-	1.102.449.818	-	1.345.964.740	-	4.442.838.323	-	5.963.326.704	-	317	-
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.759.000.000	##	907.796.443	####	1.177.898.500	-	71.514.775	-	73.934.650	-	65.152.100	-	956.904.349	-	1.167.505.874	-	2.075.302.317	-	3	-
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	###	100.000.000	##	138.086.515	####	100.562.849	-	-	-	44.264.733	-	4.880.000	-	51.295.609	-	100.440.342	-	182.351.248	-	2	
			Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	###	220.000.000	85	219.635.134	87	166.808.900	-	4.985.000	-	39.153.829	-	21.763.616	-	100.083.131	-	165.985.576	-	263.773.963	-	1	
			Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan penguatan kompetensi SDM kesehatan	100	537.000.000	##	-	####	59.655.000	-	12.850.000	-	23.965.750	-	3.711.000	-	18.718.500	-	59.245.250	-	-	-	-	
			Program Jaminan Persalinan	Cakupan Jaminan Persalinan	###	2.500.000.000	##	688.069.168	####	1.916.000.000	-	1.464.500	-	330.519.450	-	304.636.415	-	439.043.616	-	1.075.663.981	-	1.020.053.118	-	0	-
			Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Kelompok kesehatan lansia yang dilayani	75	82.000.000	72	28.748.250	73	15.955.000	-	-	-	4.143.750	-	10.050.000	-	1.034.750	-	15.228.500	-				
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			2.145.000.000		182.381.722		151.601.400				60.981.400	-	40.041.750	-	48.985.750	-	150.008.900	-	243.363.122	-	0,11	
			Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	AKI ( / 100.000 KH )	280	2.020.000.000	##	63.253.950	####	67.405.000	-	-	-	14.946.750	-	20.598.500	-	31.789.250	-	67.334.500	-	78.200.700	-	####	
			Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			205.000.000																			
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat			1.348.671.100		157.723.695		141.000.000	-	8.233.500	-	29.519.454	-	47.860.421	-	54.811.440	-	140.424.815	-	195.476.649	-	0,14	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)		SKPD	Ket			
								I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17			
					K	Rp	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Persentase kesehatan anak sekolah baru	100	224.000.000	97	19.620.000	98	4.012.000				1.275.000		1.834.750		3.109.750		19.620.000					
2	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan		Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	100	6.344.000.000	85	1.449.370.573	###	1.907.959.782	-	294.498.406	78.571.250	1.275.080.852		1.648.150.508		1.743.868.979		0,27					
			Program Pengawasan obat dan makanan	Persentase sarana dibina yang tidak menggunakan bahan berbahaya	75	520.000.000	65	69.274.600	70	76.411.000		21.404.500	17.224.500	-	37.697.000		76.326.000		90.679.100		0,17				
			Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan	100	8.850.000.000	100	3.221.345.637	100	2.797.995.000		1.131.080.232	514.779.350		861.167.550		2.507.027.132		4.352.425.869		0,49				
			Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	100	22.050.000.000	100	10.746.485.859	###	4.906.743.304		271.848.300	1.682.949.357	2594120746		4.548.918.403		11.018.334.159		0,50					
			Program Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase puskesmas yang mendapatkan BOK	100	4.500.000.000	##	7.346.742.702	###	10.087.971.000		40.946.665	4.237.286.538	2.208.753.432		3.323.758.160		9.810.744.795		11.624.975.905		2,58			
			Program Kemirraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat mendapat jaminan kesehatan (Total Coverage)	100	11.375.000.000	80	4.396.414.352	90	5.372.885.400	-	2.683.633.650	7.084.750	2.659.590.341		5.350.308.741		7.080.048.002		0,62					
			Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Daerah Terpencil, Daerah Sulit dan Perbatasan	70	802.000.000	65	48.179.750	65	27.835.150			903.750	26.909.500		27.813.250		48.179.750		0,06					
			Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rs/ps paru-paru/rs mata	Puskesmas yang statusnya ditingkatkan menjadi RS	1	58.000.000.000			1	14.517.574.440	-	905.199.517	6.727.056.556	5.844.097.154		13.476.353.227		905.199.517		0,02					
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	###	23.409.933.500	##	10.091.929.787	###	12.800.516.803		422.583.401	3.259.462.346	2.528.745.312		5.845.810.588		12.056.601.647		13.773.975.534		0,59			
3	Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1.340.900.000		123.542.750		308.193.300		15.245.000	26.397.500	21.506.750		122.903.500		186.052.750		165.185.250		0,12			
			Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular			543.000.000		32.109.000		85.136.000	-	26.900.750	3.454.750		54.491.500		84.847.000		59.009.750		0,11				
			Program Upaya kesehatan masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas	4	1.130.500.000	3	67.089.850	3	253.945.000		8.604.750	151.040.750	16.857.500		53.102.750		229.605.750		226.735.350		0			
TOTAL								61.642.191.984		776.631.942		15.530.042.919	14.351.402.654	-	24.430.808.037		57.686.976.405			###	###				
Rata-rata capaian kinerja (%)								1,26%		21,19%		23,28%	###		30,63%		93,58%								
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								Tepat waktunya pelaksanaan kegiatan di lingkup OPD Dinas Kesehatan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja								Kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan TA 2019 di lingkup OPD Dinas Kesehatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								Lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kegiatan yang maksimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								Lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan setiap kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan																	
3			DINAS PURA																						
			Urusan Wajib/pilihan/penunjang urusan pemerintahan																						
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum																						
A			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.431.191.100		855.449.000		297.700.754	1,6	1.472.657.471	1.172.391.864		###		4.412.346.994		3.200.700.325						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket					
								I		II		III		IV				15=13/6 x100%								
								9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17										
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
B			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur		20.000.000	111.000.000	12.000.000	0,0	3.000.000		75.412.884	3.990.000	###	94.402.884	###	35.000.000									
C			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		69.778.743.000	49.374.346.335	16.998.900	0,6	256.544.034		15.555.986.743	-	27.241.504.454	#####	43.071.034.131		70.052.285.934								
D			Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan		24.094.984.300	48.712.699.411	5.770.250	0,4	4.086.507.198		7.888.971.576	-	30.643.276.748	####	48.103.210.141	###	68.731.947.037								
E			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		4.323.879.800	3.646.750.000	-	0,6	912.516.500		836.522.750	-	1.857.651.750	#####	3.606.691.000	###	5.236.396.300								
F			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya		10.203.193.200	6.011.666.700	0	27.058.157	0,3	297.324.191	2.440.498.546	-	2.757.667.390	#####	5.522.548.284	###	10.527.575.548								
G			Program Pengembangan Tata Ruang	Meningkatnya Pengembangan Tata Ruang		2.300.295.650	840.350.000	-	0,0	1.283.000	#####	1.283.000	##	1.283.000	#####	1.283.000	###	2.301.578.650								
H			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong		2.752.818.000	2.802.200.000	-	0,0	5.166.500		32.962.000	-	2.667.642.000	#####	2.705.770.500	###	2.757.984.500								
I			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya Sarana dan prasarana Kebinamargaan		3.573.535.000	1.437.550.000	0	137.092.750	0,2	285.986.250	451.008.900	-	680.627.600	#####	1.417.622.750	-	3.996.614.000								
J			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan		5.419.312.500	7.671.850.000	-	0,0	11.224.000		305.880.400	-	5.797.256.050	#####	6.114.360.450	###	5.430.536.500								
K			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah			13.594.892.600	10.824.624.444	0	4.081.000	0,3	307.489.950	5.289.623.306			#####	10.256.193.664	###	13.906.463.550								
L			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			5.338.837.500	6.496.487.500	0	826.403.260	0,3	1.020.422.647	2.419.339.295	-	2.006.023.194	#####	6.272.188.396	###	7.185.663.407								
M			Program Perencanaan Tata Ruang			-	71.150.000	0	1.000.000	0	11.735.000	0	1.260.000	-	42.821.978	#####	56.816.978	###	12.735.000							
N			Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi			-	118.363.650	0	1.000.000	0	15.767.000	0	12.151.464	-	22.568.000	#####	16.767.000	###	16.767.000							
TOTAL								142.882.324.442	0	1.329.105.071	5	8.687.623.741	####	36.483.292.728	##	73.722.312.164		131.983.721.766			###	###				
Rata-rata capaian kinerja (%)								0,93%			6,08%		25,93%		51,60%		92,37%									
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								Tepat waktunya pelaksanaan kegiatan di lingkup OPD																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan Ta 2019 di lingkup OPD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								Lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kegiatan yang maksimal																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								Lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan setiap kegiatan di lingkup OPD																		
4			Perkimian																							
A	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	###	1.655.040.000	878.297.450	-	777.381.440	2	77.768.841	5	381.255.495	8	505.405.085	-	198.812.150		699.305.785	15	1842726871	0	6,44			
B	Meningkatnya sarana dan prasarana		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	###	4.147.800.000	204.835.700	###	161.453.000		16.125.000	0	50.414.500	1	68.302.500	-	89.886.550	-	158.189.050		339.677.700					
C	Meningkatnya disiplin aparatur		Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	###	80.000.000		###	19.762.500				69%	13.680.000	###	13.680.000		18.000.000	69%	13.680.000						
D	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur	###	120.000.000	9.500.000	###	15.000.000	###	7.675.000	51%	7.675.000	51%	7.675.000	##	7.675.000		7.675.000	2	32525000					



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket		
								I		II		III		IV			13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12				15=13/6 x100%	
								9	10	11	12	13=(9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17								
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
E	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni		Program Pengembangan perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	####	1.500.000.000		243.941.450		204.262.500	-	-	-	24.699.450	-	61.288.400		142.434.550		203.722.950	-	-		
F	Meningkatnya jumlah rumah yang memiliki MBR yang memiliki hunian/tempat tinggal		Program Pengembangan perumahan	Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki tempat tinggal	####	300.000.000.000		341.250.530		813.515.000	###	85.217.962	32%	256.542.874	45%	362.626.130		392.364.824		754.990.954	87%	1.045.637.496		
G	Meningkatnya lingkungan hunian yang sehat dan aman		Program Pemberdayaan komunitas perumahan	persentase peningkatan permukiman yang tertata		20.000.000.000		824.740.000		2.967.114.000	-	-	0%	11.033.400	0%	926.696.898		2.024.512.062		2.951.208.960	-	-		
H	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan pemerintah		Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase jumlah lahan bersertifikat	####	500.000.000		79.381.500	####	160.155.000	###	18.314.125	55%	87.425.875	81%	129.458.244		27.852.750		157.310.994	1	314.579.744		
I	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan daerah		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	persentase kasus tanah Pemerintah yang terselesaikan	1	400.000.000		80.303.000		109.207.000	0	5.661.150	0	14.852.650	0	18.352.850		76.217.550		94.570.400				
TOTAL								5.227.850.440		210.762.078	7	833.899.244		2.093.485.107	###	2.973.435.436	-	5.044.974.093	3	418.851.794				
Rata-rata capaian kinerja (%)									4,03%		15,95%		40,04%		56,88%			96,50%						
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								Tepat waktunya pelaksanaan kegiatan di lingkup OPD																
Faktor penghambat pencapaian kinerja								Kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan TA 2019 di lingkup OPD																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								Lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kegiatan yang maksimal																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								Lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan setiap kegiatan di lingkup OPD																
S			Satpol PP																					
A			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.422.013.500	-	1.219.831.940	-	4.603.599.925	-	825.595.274	70	1.463.062.294		1.663.960.380	-	615.433.523	6	4.568.051.471	16	2.430.316.473			
B			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		735.014.000	-	413.778.930	-	370.918.800	-	69.645.655	-	66.718.870	-	136.039.150	-	95.413.838	1	367.817.513	1	298.379.220			
C			Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur						30.000.000	-	3.175.000	-	4.490.000		9.258.000	-	12.979.371	0	29.902.371	-	-			
D			Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		2.217.873.450	##	52.525.000	####	972.839.000	-	131.744.000	-	377.783.968	-	185.548.500	-	192.726.000	2	887.802.468	2	365.759.968			
E			Program pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal		137.976.000	3 kl	56.475.000	1 kali	60.697.000	-	463.500	-	30.137.500	-	28.317.300	-	56.500	0	58.974.800	0	30.601.000			
F			Program pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal		9.438.325.000	113	320.067.250	48	123.338.000	6 kl	17.294.000	-	33.555.250	-	59.513.150	-	6.925.000	0	117.287.400	0	370.916.500			
TOTAL								6.161.392.725		1.047.917.429	70	1.975.747.882		2.082.636.480	-	923.534.232	10	6.029.836.023	19	3.495.973.161				
Rata-rata capaian kinerja (%)									17,01%		32,07%		33,80%		14,99%			97,86%						
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								Tepat waktunya pelaksanaan kegiatan di lingkup OPD																
Faktor penghambat pencapaian kinerja								Kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan TA 2019 di lingkup OPD																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								Lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kegiatan yang maksimal																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								Lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan setiap kegiatan di lingkup OPD																
G			Dinas SOSPAAPPB																					
A			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	####	907.550.000		849.458.298		1.416.420.526		213.296.654		599.733.487		912.601.150		499.578.129		1.412.179.279		2.575.089.580	2,8	

	TOTAL	7.134.705.826	606.987.536	2.211.189.101	4.303.212.682	2.703.070.768	7.006.283.450	152.278.013
	Rata-rata capaian kinerja (%)	8,51%	30,99%	60%	37,89%	90,20%		
	Prediktor Kinerja							
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							
	- Faktor perembat pencapaian kinerja:							
	- Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:							
	- Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya:							



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket				
								I		II		III		IV				13=(8+9+10+11)				14= 6 + 12		15=(13/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13	14	15	16	17						
9			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
			Program pelayanan administrasi perkantoran		5.321.810.530	1.645.016.380	1.165.399.650	126.054.628	-	357.820.805	-	219.640.050	-	442.091.591	-	1.145.607.074	-	2.254.946.441	-	42					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.121.638.098	0	802.062.498	1.295.055.600	7.470.000	-	265.779.250	-	986.547.250	-	23.261.500	-	1.283.058.000	946.683.748		45					
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		116.694.002	0	56.694.002	15.000.000	7.675.000	1 kali	1.714.000	2 kali				9.389.000	73.758.002		63						
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		10.237.993.695	0	4.664.632.445	1.467.760.000	0	496.146.586		352.110.012				848.256.598	6.009.035.629		59						
TOTAL								3.943.215.250	-	637.346.714	0	977.424.067	0	1.206.187.300	-	465.353.091	-	3.286.310.672	2.106.530.471						
Rata-rata capaian kinerja (%)									16,15%			24,79%		30,59%		11,80%		83,34%							
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								Komponen kepegawaian pada OPD telah terisi 80 %																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Diperlukan ketertarikan anggaran terhadap semua kegiatan rutin di Kecamatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								Diperlukan penyusunan RPJMD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								Diperlukan penyusunan RPJMD																	
10			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI																						
			Program pelayanan administrasi perkantoran		257.095.400	-	229.493.664	853.735.600	171.757.280		271.679.176		185.014.079	218.170.589	845.080.624	-	516.763.920	-	19	Dinas PMD					
			Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur		25.000.000	-	205.661.718	195.332.000	80.610.050		36.763.000		35.179.500	42.707.146	195.259.696	-	323.034.768	-	WDIV/01	Dinas PMD					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20.000.000	1 Tk	7.820.000	19.000.750	10.210.000		2.720.000		5.950.000	-	18.880.000	-	20.750.000		1	Dinas PMD					
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		954.084.800	-	1.060.343.836	557.028.050	53.235.750		103.195.280		219.823.485	178.611.700	537.300.965	-	1.213.466.116			Dinas PMD					
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		515.000.000	###	102.346.163	136.658.000	13.361.000		33.497.900		58.722.250	30.076.750	135.657.900	-	149.205.063		0	Dinas PMD					
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		-	-	-	37.343.250	17.622.000		18.095.000	-	850.000	9.172.000	-	8.322.000			Dinas PMD						
			Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		976.000.000	1 Tk	694.350	913.843.850	59.540.750		470.927.000		196.333.350	186.265.546	913.066.646	-	531.162.100			Dinas PMD					
			Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya				49.824.050	74.240.000	61.100.000		6.293.750		2.663.500	4.065.250	74.122.500	-	117.217.800	-	-	Dinas PMD					
TOTAL								2.787.181.500	-	467.436.830	-	943.171.106	-	703.686.164	-	560.748.981	-	2.775.041.081	807.090.863						
Rata-rata capaian kinerja (%)									16,77%			33,84%		25,25%		23,71%		99,56%							
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								Komponen kepegawaian pada OPD telah terisi 80 %																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Diperlukan ketertarikan anggaran terhadap semua kegiatan rutin di Kecamatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								Diperlukan penyusunan RPJMD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								Diperlukan penyusunan RPJMD																	
11			DINAS PERHUBUNGAN																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10.677.254.522	2.066.582.100	2.479.766.450	348.893.413	34	585.773.098	154	480.947.429	936.263.844	326	2.351.877.784	3.001.248.611		28							
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.794.690.900	465.161.550	798.252.800	16.655.000	23	144.274.500	1	39.312.300	26	548.418.300	44	748.660.100	626.091.050		35						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		338.206.800	99.370.537	57.715.500	14.607.400	19.095.000		14.692.300	1	3.370.000	-	51.764.700	133.072.937		39	Ditubuh						
			PERHUBUNGAN		6.984.330.600	1.664.011.950	656.265.400	10.222.230		58.836.250					69.048.500	1.731.060.450		25							
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1.011.474.750	-	61.874.750	0	676.500	-	-	-	1	56.858.000	0	57.534.500	676.500		0						
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ		853.498.500	192.103.750	169.373.850	0	7.309.000	1	12.299.000	0	6.930.000	0	5.608.000	2	32.146.000	211.711.750		25					
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		4.407.761.700	1.210.362.800	116.456.000	0	2.236.750	1	46.527.250	3	47.903.500	0	9.336.250	1	106.003.750	1.259.126.800		24					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket				
								I		II		III		IV				13=(8+9+10+11)				14= 6 + 12		15=(13/6 x100%)	
								9	10	11	12	13	14	15	16			17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					711.595.650	261.545.400	105.496.650	-	-	-	107	103.351.500	2	1.761.250	109	105.112.750	261.545.400		37						
TOTAL								2.788.936.000	88	390.378.063	60	807.968.848	268	693.137.029	88	1.561.615.644	481	3.453.099.584	1.791.019.637						
Rata-rata capaian kinerja (%)								10,30%					19,29%		41,22%		91,14%								
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								Komponen kepegawaian pada OPD telah terisi 80 %																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja								Diperlukan ketersediaan anggaran terhadap semua kegiatan rutin di Kecamatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								Diperlukan ketersediaan anggaran terhadap semua kegiatan rutin di Kecamatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								Diperlukan penyusunan penyusunan RPJMD																	
12			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		678.868.500	-	1.084.046.000	-	1.489.239.850	-	210.795.375	-	375.032.037	-	354.601.453	-	511.482.205	-	1.451.911.070	-	2.822.558.302				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		757.920.000	-	130.524.800	-	241.403.000	-	1.160.000	-	99.764.000	-	15.478.000	-	168.339.700	-	238.996.700	-	340.137.800				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		65.000.000	-	21.172.450	-	30.350.000	-	12.417.400	-	14.564.715	-	1.270.000	-	2.010.000	-	30.262.115	-	88.824.080				
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		150.000.000	-	529.420.700	-	918.240.000	-	13.189.500	-	205.655.232	-	22.723.360	-	653.617.100	-	895.185.192	-	1.003.023.024				
			program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi		240.000.000	-	57.779.800	-	64.058.500	-	-	-	12.651.500	-	9.010.000	-	40.949.500	-	62.611.000	-	92.092.800				
			Program kerjasama informasi dengan mass media		90.000.000	-	41.450.750	-	97.500.000	-	1.131.000	-	25.283.250	-	32.754.587	-	37.424.536	-	59.168.837	-	105.574.837				
			program peningkatan kualitas pelayanan informasi				127.656.300																		
			program pengembangan data/informasi/statistik sosial		278.500.000	-	-	-	120.230.000	-	12.320.500	-	27.167.750	-	34.335.300	-	46.079.146	-	119.902.696	-	125.632.300				
			Pengembangan statistik sektoral		150.000.000		116.434.000		87.255.000	-	-	-	8.685.750	-	14.261.750	-	64.060.750	-	87.008.250	-	148.067.250				
			program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah		550.000.000	-	129.507.250	-	98.820.000	-	7.224.000	-	18.485.500	-	17.129.250	-	52.908.655	-	95.747.405	-	205.279.500				
			program persandian daerah			-	-	-	5.700.000	-	-	-	3.824.250	-	-	-	1.730.000	-	5.554.250	-	7.648.500				
TOTAL								3.152.796.350	-	258.237.775	-	791.113.984	-	501.563.700	-	1.578.601.592	-	1.046.347.515	-	184.912.350					
Rata-rata capaian kinerja (%)								8,15%				25,09%		19,91%		50,07%		96,62%							
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								Komponen kepegawaian pada OPD telah terisi 80 %																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja								Diperlukan ketersediaan anggaran terhadap semua kegiatan rutin di Kecamatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								Diperlukan ketersediaan anggaran terhadap semua kegiatan rutin di Kecamatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								Diperlukan penyusunan penyusunan RPJMD																	
13			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan																						
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	964	4.780.230.627	88	1.966.002.634	332	962.388.750	88	181.732.760	30	264.799.430	-	259.864.760	-	252.627.859	60	959.024.809	562	2.412.534.824	58,30	50,47	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		245	2.044.242.539		529.140.900	124	176.000.000	3	26.261.052	45	82.892.450	-	47.695.700	-	18.973.800	48	175.823.002	3	638.294.402	1,22	31,22	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	375.000.000	-		50.000.000	2	24.433.251	4	25.525.000	-	-	-	-	6	49.958.251	-	-	-			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	375.000.000	-		-	-									-	-	-	-			
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi	4	1.543.867.313		180.255.628											-	-	-	180.255.628	-	11,68	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100	115.450.000		-	-	-								-	-	-	-	-	-		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket			
								I		II		III		IV				15=13/6 x100%						
								9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Program pelayanan administrasi perkantoran				1.289.332.675	185.126.567		331.014.631	29	283.654.454	-	471.834.261	-	1.271.629.913		516.141.198						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				224.060.500	5	38.049.000	11	110.422.300	3	15.910.500	-	120.539.600	-	223.830.400		148.471.300					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				21.800.000	-	-	2	8.975.000	-	3.990.000	-	6.195.000	-	19.160.000		8.975.000					
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				21.975.000	-	-		4.830.900	3	3.930.000	-	12.700.000	-	21.460.900		4.830.900					
			Program Pengembangan dan Keserasan Kebijakan Pemuda				1.338.061.000	-	-	1	143.225.000	-	591.812.340	-	584.235.100	-	1.319.272.440		143.225.000					
			Program peningkatan peran serta kepemudaan				335.270.500	-	-	110	109.620.000	-	104.554.600	-	89.290.950	-	303.465.550		109.620.000					
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga				520.259.000	1	28.992.500	1	9.900.000	-	22.791.319	-	452.930.403	-	514.614.222		38.892.500					
			Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga				3.184.362.000	1	29.600.000	99	2.854.058.000	-	41.000.900	-	251.786.900	-	3.176.445.800		2.883.658.000					
			Program Pengembangan nilai budaya				148.093.250	-	13.538.850	1	4.570.000	-	39.305.000	-	90.655.400	-	148.069.250		18.108.850					
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				159.385.000	1	13.870.050	1	33.348.500	-	40.957.084	-	71.127.112	-	159.302.746		47.218.550					
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.522.305.000	2	28.641.500	4	66.575.648	-	111.360.493	-	1.256.647.514	-	1.463.225.155		95.217.148					
			Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya				74.169.000	-	-	2	25.369.000	-	-	-	47.105.000	-	72.474.000		25.369.000					
			Program pengembangan pemasaran pariwisata				717.043.950	3	36.474.500	3	42.930.527	-	184.928.988	-	446.037.500	-	710.371.515		79.405.027					
			Program pengembangan destinasi pariwisata				1.953.737.000	1	19.671.143	2	88.438.452	-	559.790.190	-	1.094.014.384	-	1.761.914.169		108.109.595					
			Program Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif				10.260.250	-	-	1	1.920.000	-	5.437.000	-	1.775.000	-	9.132.000		1.920.000					
TOTAL								11.520.114.125	##	393.964.110	239	3.835.197.958	35	2.009.422.868	-	4.990.874.124	-	11.174.368.060		131.665.250				
Rata-rata capaian kinerja (%)									3,42%		33,29%		17,44%		43,38%		97,00%							
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
16			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi Sarana dan Prasarana Kerja	3.200.231.199	##	855.506.449	144	712.850.500	##	116.762.525	33	190.542.937		149.685.530	-	235.483.514	65	692.474.506	319	1.162.811.911	42	36	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur	2.593.913.565	12	1.727.471.565	20	286.602.600	3	48.655.200	9	108.681.900		64.563.750		55.518.000	12	277.418.850	24	1.884.808.665	32	73	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		-	-	0	36.250.000	2	18.323.100	4	7.915.100	-	-	-	8.629.381	6	34.867.581					
			Program Perubahan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun	643.654.750	96	156.832.750	92	127.935.000	##	33.438.000	40	37.637.750	-	42.042.500	-	14.719.500	92	127.837.750	188	173.502.350	43	27	
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpot dan tertata	954.256.550	10	129.683.050	4	85.283.000	1	21.206.000	1	28.485.500	1	6.070.750	1	29.433.250	4	85.195.500	12	179.374.550	46	19	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket				
								I		II		III		IV				13=(8+9+10+11)				14= 6 + 12		15=(13/6 x100%)	
								1	2	3	4	5	6	7	8			9	10			11	12	13	14
K	Rp	K	Rp RKPd	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp					
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajaran Melalui Perpustakaan	1.369.595.400	##	286.274.450	####	284.011.850	##	27.959.600	1.531	136.183.000	4635	56.141.250	####	59545500	####	279.829.350	###	450.417.050	0	33		
TOTAL									1.532.932.950	##	266.344.425	1.618	509.446.187	####	318.503.780	##	403.329.145	####	1.497.623.537		97.036.900				
Rata-rata capaian kinerja (%)											17,87%		33,23%		20,78%		26,31%		97,20%						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya:																									
17			DINAS PERTANIAN																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.523.907.635	-	2.742.725.800	485.858.230	-	671.180.394	-	572.402.874	-	911.627.748		2.641.069.246	-	8.896.245.987						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.583.294.697		1.124.616.000	-	256.855.676	-	510.887.676	-	154.172.000		868.352.676		868.352.676		4.761.977.725					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			104.460.664		22.700.000	8.513.000		9.783.000		22.623.000				22.623.000		145.379.664						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Informasi																						
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			1.927.833.500		292.068.700	-	11.139.250	-	175.629.747	-	213.647.347	-	286.780.297		286.780.297		2.328.249.844					
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			1.709.138.465		550.472.400	-	80.538.200	-	226.899.100	-	453.716.450	-	547.251.150		547.251.150							
			Program peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan			282.001.850																			
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan			29.681.057.746		5.362.870.200	-	149.847.070	-	1.122.839.461	-	3.684.573.228	-	5.226.712.128		5.226.712.128	-	34.067.197.763					
			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan			2.574.700.152		2.001.795.500	-	57.214.220	-	201.752.572	-	799.238.304	-	1.842.963.584		1.842.963.584	-	3.632.905.248					
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			1.589.918.500		415.772.000	-	79.113.006	-	180.896.022	-	272.295.942	-	413.558.812	-	413.558.812	-	2.122.223.470					
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			2.796.119.550	-	1.091.420.400	-	93.718.000	-	234.435.250	-	436.684.112	-	1.039.293.504	-	1.039.293.504	-	3.560.956.912					
			Pengembangan Agribisnis Pertanian			792.736.300	-	102.771.700	-	12.942.000	-	72.308.500	-	88.850.750	-	100.510.750	-	100.510.750	-	966.837.550					
			Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan			7.609.375.650	-	875.031.550	-	4.066.500	-	12.131.500	-	109.409.600	-	862.104.650	-	862.104.650	-	7.734.983.250					
			Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan secara berkelanjutan			396.051.006													396.051.006						



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket	
								I		II		III		IV				15=(13/6 x100%				
								9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=(13/6 x100%	16	17						
					K	Rp	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saling, Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian			242.881.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.881.950				
			Program kesehatan masyarakat veteriner			161.089.650	-	31.425.500	-	9.758.750	-	16.921.250	-	19.021.250	-	30.165.000	-	45.701.250	-	206.790.900		
			Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			191.623.380												191.623.380				
			Pengembangan Tanaman Buah dalam Pdt			191.623.380												191.623.380				
					TOTAL			14.613.669.750	-	1.249.563.902	-	3.435.664.472		6.826.634.857		12.129.320.299		14.135.416.797	-	69.254.304.649		
					Rata-rata capaian kinerja (%)					8,55%		23,51%		46,71%		83,00%		96,73%				
					Predikat kinerja																	
					Faktor pendorong keberhasilan kinerja																	
					Faktor penghambat pencapaian kinerja																	
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																	
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																	
18			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	801.170.000	-	-	-	-	-	28.485.113		772.684.887	-	-				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	117.430.000	-	-	-	-	-	113.630.200		113.630.200	-	-				
			ProgramPeningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			70.447.000		156.739.000						85.817.538		85.817.538		101.361.227				
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja			111.634.000		313.864.250	-	82.154.500	1.052	114.069.128	###	141.451.377	-	146.998.461	-	288.449.838		337.675.005		
			Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan			34.460.000		71.474.950	7	3.394.250	8	17.646.900	119	18.347.650	-	21.487.500	-	39.835.150		39.388.800		
			Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja			935.000.000		402.826.500	-	-	-	385.742.900	4	385.742.900	-	-	-	385.742.900		385.742.900		
			Padat karya infrastruktur	8		935.000.000		402.826.500	5			385.742.900	4	385.742.900				385.742.900		771.485.800		
			Program Pengembangan Wilayah Tertinggal			61.203.150		137.336.000	###	-	51	14.542.200	76	15.562.200	-	367.962.500	-	398.066.900		30.104.400		
					TOTAL			2.000.840.700	###	85.548.750	1.111	512.001.128	###	561.104.127	-	622.765.999	-	1.197.912.326	-	894.272.332		
					Rata-rata capaian kinerja (%)					4,28%		26,59%		28,04%		0,31100227		59,87%				
					Predikat kinerja																	
					Faktor pendorong keberhasilan kinerja																	
					Faktor penghambat pencapaian kinerja																	
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																	
					Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																	
19			INSPEKTORIAT																			
			Program pelayanan Adm perkantoran			- 12		961.032.495	-	840.004.150	1	66.520.315	2	97.061.621	6	340.515.590	-	488.325.239	-	828.840.829	-	1.465.130.021
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			818.069.884	-	127.097.605		90.232.500	0	11.632.000	-	21.109.000	-	55.148.500	-	35.058.000	-	90.206.500	-	182.246.105
			program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan			-	-	1.409.511.500	-	1.124.195.350	-	-	1	265.998.000	2	431.981.000	-	670.005.359	-	1.101.986.359	-	2.191.285.750

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)		SKPD	Ket		
								I		II		III		IV			14= 6 + 12		15=13/6 x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17								
			program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan		1.793.135.350	378.729.200	62.770.000	0	19.804.900	0	11.304.000	-	-	29.641.571	-	60.750.471	-	409.838.100						
			program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		57.609.900	10.651.600																		
TOTAL								2.117.202.000	1	97.957.213	3	394.872.621	8	827.645.090	-	1.223.030.169	-	2.081.784.159	-	629.380.850				
Rata-rata capaian kinerja (%)									4,63%		18,65%		39,09%		57,77%		98,33%							
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
20			BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	6.799.255.899	848.458.999	-	1.467.121.400	215.677.535		230.649.245	-	308.087.589	-	686.000.965	-	1.440.415.334	-	1.602.873.368	-		4		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	4.223.633.303	-	370.012.672	-	229.164.600	41.775.000	40.647.817	-	118.014.909	-	28.397.659	-	228.835.385	-	250.930.398	-				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN mengikuti diklat/bimtek	326.281.563	40.697.200	80.375.000	28.881.249	diklat	2.325.000	-	19.489.850	-	29.336.639	-	80.032.738	-	91.393.299	-		0			
			Program Pengembangan Data/Informasi		-	58.811.200	36.563.200	595.800	-	11.324.400	-	11.138.700	-	12.456.800	-	35.515.700	-	81.870.100	-					
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	9.425.300.170	1.808.808.955	-	1.917.046.200	-	152.524.673	246.488.506	-	1.251.569.304	-	248.703.338	#####	1.899.285.821	####	3.459.391.438					
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran dan target RKPD terhadap RPJMD	828.000.000	1	58.127.950	-	217.170.200	-	11.604.250	-	31.448.700	-	11.279.000	-	160.395.250	-	112.455.900	-				
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase pencapaian sasaran dan target RKPD terhadap RPJMD	2.527.828.692	2	268.730.104	2	412.277.500	0	27.208.050	WIV/OI	133.643.500	-	86.558.576	-	160.326.690	#####	407.736.816	####	326.653.112	13%		
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1.632.214.000	2	120.030.500	1	42.073.000	0	8.055.103	0	16.063.450	-	6.195.800	-	10.884.600	-	41.198.953	3	150.344.853	1	WIV/OI	
			Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan zoning tata ruang (RTRW, RDR, dan zoning regulation)	3.889.783.400	3	266.891.450	-	614.052.300	-	28.482.282	-	110.707.726	-	143.851.074	-	268.772.183	#####	551.813.265	####	445.399.132	13%		
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase perencanaan penyediaan pengolahan air baku	693.537.438	1	117.588.950	-	51.248.900	-	1.610.000	-	10.174.600	-	6.051.400	-	32.725.900	-	50.561.900	1	135.424.950	-	0	
			Program Perencanaan Fisik dan Prasarana	Persentase pencapaian sasaran dan target pembangunan layanan	568.250.000		15										0		0		-			
TOTAL								5.067.092.300	0	516.413.942	WIV/OI	833.472.944	-	1.962.236.202	-	1.638.000.024	#####	4.957.851.112	####	6.656.740.550				
Rata-rata capaian kinerja (%)									10,19%		16,45%		38,73%		32,33%		97,84%							
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
21			BADAN KEUANGAN DAERAH																					
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.321.760.690	-	329.878.924	-	577.298.870	-	595.148.032	-	734.243.920	-	2.236.569.746	-	1.502.325.826	-	-			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			443.966.200	-	30.434.000	-	108.666.000	-	197.232.500	-	81.219.750	-	417.552.250	-	336.332.500	-				
			Program Peningkatan Kapasitas	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat			156.168.500	-	100.966.295	-	25.473.000	-		-	30.123.300	-	155.962.595	-		-				
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penyel. Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah			3.857.077.860	-	312.217.191	-	668.101.540	-	1.085.144.547	-	1.613.202.053	-	3.678.665.331							
TOTAL								6.778.973.250	772.836.410	-	1.378.518.410	-	1.877.525.079	-	2.458.788.023	-	6.488.749.922	###	1.616.292.076					
Rata-rata capaian kinerja (%)									11,40%		20,35%		27,70%		36,27%		95,72%							
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
22			BKPSDM																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja	-	4.140.909.783	719.468.086	708.459.200	-	82.424.014	-	96.000.133	-	236.945.912	-	284.890.181	-	700.260.240	-	1.119.318.313				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)		SKPD	Ket		
								I		II		III		IV											
								9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=(13/6 x100%	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=(13/6 x100%	16	17									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur	-	784.406.150		88.762.250		113.588.000	-	52.780.000	-	17.123.800	-	13.270.800	-	24.900.000	-	108.074.600		158.666.050			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya Kapasitas Aparatur	0	8.252.655.260		141.583.860		1.117.883.600	-	8.184.250	-	121.670.200	-	456.508.839	-	508.305.450	-	1.094.668.739		271.438.310			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	-	5.509.363.280		1.060.962.084		1.022.941.650	-	88.260.378	-	111.143.927	-	178.620.010	-	450.847.932	-	828.872.247		1.282.119.639			
			Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi		9.512.913.912		278.910.750		267.590.400	-	216.056.050	-	20.996.761	-	10.945.000	-	18.334.687	-	266.332.498		515.963.561			
			Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural	438	8.976.760.676		115.673.300		205.500.400		188.829.000		5.010.000		10.945.000		450.000		205.234.000		309.512.300			
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	665	536.153.236		163.237.450		62.090.000		27.227.050		15.986.761		17.884.687		61.098.498		206.451.261					
TOTAL								3.230.462.850	-	447.704.692	-	366.934.821	-	896.290.561	-	1.287.278.230	-	2.998.208.324	-	3.347.505.873					
Rata-rata capaian kinerja (%)										13,86%		11,36%		27,74%		39,85%		92,81%							
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
24			SEKRETARIAT DEWAN																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan perkantoran	-	30.644.185.744	-	8.290.951.134	-	3.442.992.000		441.913.071	-	1.090.011.976	-	718.673.411		894.517.543	-	3.145.116.001					
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana & prasarana aparatur		7.937.965.600		4.031.407.749	-	1.751.111.500		43.550.372	-	557.438.167	-	15.215.087		751.903.892	-	1.324.557.146	-	4.647.611.375	-		
			Program Peningkatan disiplin aparatur			724.750.000	-	148.970.000	60 stel	463.500.000							440.880.000	-	440.880.000						
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengelolaan peningkatan kompetensi aparatur		170.000.000	-	70.000.000	18 orang	381.488.500	-	81.284.800	-	13.418.500	-	63.286.400	-	28.782.400	-	186.772.100	-	105.487.300			
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas kompetensi Anggota DPRD		26.609.597.500	-	16.191.427.500	-	16.549.831.500	-	2.830.753.785	-	3.845.154.022	-	4.194.518.779	-	4.368.111.231	-	15.238.537.797	-	27.061.854.066			
TOTAL								22.588.923.500	-	3.197.502.008	-	5.506.022.665	-	4.991.693.677	-	6.484.195.066	-	20.335.863.044	-	31.814.952.741	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)										15,04%		24,37%		22,10%		28,71%		90,03%							
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
25			KECAMATAN PULAU PUNUNG																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.464.057.276		1.387.006.700	-	506.728.900	-	54.307.440	-	165.364.170	-	88.399.589	-	198.283.293	-	506.354.492	-	1.781.787.899			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			182.000.000	0	366.360.000		28.783.550	-	3.690.000	-	20.634.000	-	650.000	-	3.809.550	-	28.783.550		391.334.000			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			73.850.000		24.850.000																	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			49.000.000	0	29.000.000		9.000.000											29.000.000				
			Program Pengembangan Wawasan Kelangkaan																						
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			109.152.000	0	62.182.000		15.613.800							15.610.000	-	15.610.000		62.182.000				
TOTAL								560.126.250	-	37.997.440	-	185.998.170	-	89.049.589	-	217.702.843	-	550.748.042	-	2.264.303.899	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)										10,35%		33,21%		15,90%		38,87%		96,33%							
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
26			KECAMATAN SITIUNG																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.016.695.619		2.780.648.540	8888	379.011.200	-	57.288.000	-	133.724.950	-	100.047.000	-	88.741.950	-	378.529.400	-	3.086.084.490			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		SKPD	Ket					
								I		II		III		IV			13=(8+9+10+11)				14= 6 + 12		15=13/6 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		924.685.556	-	291.443.000	-	65.108.800	-	34.955.000	-	19.736.000	-	7.643.000	-	2.714.400	-	65.048.400	-	355.476.500				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		283.500.000		82.000.000	-	11.250.000	-	-	-	-	-	11.250.000	-	-	-	11.250.000	-	-				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		87.000.000	-	5.000.000												5.000.000						
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																						
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		196.011.437	-	117.170.850	-	8.730.000	-	1.800.000	-	1.800.000	-	5.000.000	-	-	-	8.600.000	-	125.770.850				
TOTAL								464.100.000	-	94.043.000	-	155.260.950	-	123.940.000	-	91.456.350	-	463.427.800	-	579.413.350	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
27			KECAMATAN KOTO BARU																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.771.808.000	-	991.766.543	-	511.191.510	-	46.851.008	-	166.960.996	-	128.325.535	-	379.275.011	-	507.600.546	-	1.333.904.082		35%		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		714.541.000		136.206.200	-	67.971.079	-	7.739.000	-	11.817.000	-	28.750.879	-	19.616.200	-	67.923.079	-	201.783.079		26%		
			Program peningkatan Disiplin Aparatur		261.700.000	-	89.903.636	-	7.000.000	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000		96.903.636		37%		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		118.417.200	-	6.930.000	-	9.800.000	-	6.360.000	-	-	-	900.000	-	9.750.000	-	9.750.000	-	14.190.000		12%		
TOTAL								595.962.389	-	66.950.008	-	178.777.996	-	186.376.414	-	438.641.211	-	592.271.625	-	1.846.780.797	-	-	1		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
28			KECAMATAN SUNGAI RUMBAI																						
			Program pelayanan administrasi perkantoran		2.637.143.062		1.108.238.462		381.721.400	2	72.749.480	-	104.257.373	-	100.857.427	-	103.198.733	-	381.063.013		1.386.502.742				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur		1.051.298.360	1	241.558.360	4	64.245.000	-	582.000	-	47.522.000	-	5.806.000	-	8.095.000	-	62.005.000	-	295.468.360				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		190.967.800	###	95.967.800	###	17.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	2.000.000	-	17.000.000	-	110.967.800				
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		36.721.000	0	8.721.000	1	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	11.721.000				
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa		59.138.700	2	47.168.700	2	8.750.000	1	8.750.000	-	-	-	-	-	-	-	8.750.000	-	55.518.700				
			Program Koordinasi kecamatan (tahun 2020 dan tahun 2021)																						
TOTAL								474.716.400	3	82.081.480	-	154.779.373	-	121.663.427	-	113.293.733	-	471.818.013	-	20.485.700	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
29			KECAMATAN SEMBILAN KOTO																						
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		240.000.000			-																	
			Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah event olahraga	240.000.000			-																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)		SKPD	Ket		
								I	II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17					
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Program pengembangan wawasan kebangsaan			400.000.000			0	0														
			program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/dilayani		400.000.000																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.790.833.675	-	314.159.565	-	365.080.100	###	64.919.150	-	179.176.701	-	257.428.276	-	105.618.880	-	363.047.156	-	810.019.192		
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor			1.374.128.702		106.443.722		75.038.800	###	17.007.600	-	35.014.450	-	63.213.050	-	11.591.500		74.804.550		229.667.322		16,7
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			113.577.068		30.520.000		11.550.000	-	-				11.550.000		11.550.000				42.070.000		37
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			46.628.050		-																
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.			208.052.323		6.022.900		17.153.500	-	7.891.600		11.149.100		14.249.100		1.790.000		16.039.100		39.312.700		19
TOTAL									468.922.408	###	80.818.339	-	215.340.251	-	546.440.426	-	119.030.380	-	405.440.806	-	58.154.300	-	87	
Rata-rata capaian kinerja (%)									15,16%		48,07%		73,90%		25,38%		99,28%							
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
30			KECAMATAN TIMPEH																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			510.002.700	-	362.069.450	-	437.985.950	-	67.746.400	-	133.733.900	-	107.095.250	-	128.042.050	-	436.617.600	-	944.284.700		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			156.520.000	-	49.384.000	-	28.520.000	-	2.520.000	-	7.066.000	-	10.355.500	-	8.530.000	-	21.405.500	-	81.431.500		
			Program peningkatan Disiplin Aparatur					21.000.000																
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																					
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			49.500.000	-	11.872.500	-	13.012.000	-	252.000	-	12.760.000	-	-	-	-	-	13.012.000	-	38.148.500		77%
			Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga																					
			Program pengutan kelembagaan dan pemberdayaan melalui gerakan PKK																					
			Program pengembangan wawasan kebangsaan																					
TOTAL									479.517.950	-	70.518.400	-	151.559.900	-	117.450.750	-	136.572.050	-	471.035.100	-	1.061.864.700	-	1	
Rata-rata capaian kinerja (%)									14,71%		32,02%		24,49%		28,48%		98,23%							
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								
31			KECAMATAN KOTO SALAK																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.177.372.036	-	346.367.944	-	517.704.100	-	85.845.000	-	202.897.974	-	124.054.850	-	104.698.183	-	517.496.007	-	759.165.768		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			548.503.448	-	41.800.000	-	23.500.000	-	-	-	8.475.000	-	11.430.000	-	3.586.000	-	23.491.000	-	61.705.000		
			Program peningkatan Disiplin Aparatur			360.447.277		10.500.000		4.500.000		-				4.500.000		4.500.000				15.000.000		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			74.000.000		-	0															
			Pendidikan dan pelatihan Formal	Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten		74.000.000		-	0															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)	SKPD	Ket				
								I		II		III		IV										
								9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		156.057.471	-	8.382.800	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	3.500.000	-	11.882.800					
			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	80.570.257		8.382.800		3.500.000		3.500.000		-	-			3.500.000		11.882.800					
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Kecamatan	75.487.214		-		-		-		-				-		-					
			Program pembeaan dan pemasyarakatan olahraga																					
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kegiatan kompetensi olahraga																				
			Program penguatan kelembagaan dan pemberdayaan melalui gerakan PKK																					
			Gerakan PKK	Meningkatkannya peran aktif TP PKK																				
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		-		16.500.000		-															
			Dukungan penyelenggaraan MTQ	Terselenggaranya MTQ tingkat kabupaten	396.831.500		16.500.000																	
TOTAL								549.204.100	-	89.341.000	-	211.372.974	-	189.984.430	-	108.234.181	-	148.987.007	-	89.461.800				
Rata-rata capaian kinerja (%)								16,27%		38,49%		25,49%		19,72%		99,96%								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								
32			KECAMATAN ASAM JUJUAN																					
			Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.970.402.500	##	829.804.536	###	469.705.500	-	-	-	194.712.210	-	129.808.140	-	143.680.580	-	468.200.930	###	1.154.324.886			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		54.000.000		4.500.000																	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor		937.657.380		106.118.500		30.095.000	-	-	-	8.069.700	-	5.379.800	-	15.765.150	-	29.214.650					
			Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		246.899.520										-									
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		99.615.000	##	30.850.000	-	13.400.000	-	-	-	5.640.000	-	3.760.000	-	3.999.999	-	13.399.999	-	-			
			Program Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa		138.880.980	2	18.430.200	-	7.000.000	-	-	-	4.200.000	-	2.800.000	-	-	-	7.000.000					
TOTAL								520.200.500	-	-	-	212.621.910	-	141.747.940	-	163.445.720	-	517.815.579	30	2.234.710				
Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00%		40,87%		27,25%		31,42%		99,54%								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								
33			KECAMATAN KOTO BESAR																					
			Program Pelayanan Adm Perkantoran		3.421.635.189		485.852.750		509.465.644	0	89.145.955		155.728.765		95.583.800		168.218.824		508.677.344		826.311.270			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		565.869.938		33.764.800		30.110.000	0	1.290.000		16.433.000	0	7.834.000		4.553.000	0	30.110.000	0	59.321.800			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		67.500.000				250.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		169.866.291	2	17.891.250		5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000					
TOTAL								544.825.644	1	96.435.955	-	172.161.765	0	103.417.800	-	172.771.824	0	543.787.344	7	183.512.100				
Rata-rata capaian kinerja (%)								17,52%		31,60%		18,98%		31,71%		99,81%								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018		SKPD	Ket								
								I	II	III	IV			(%)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17									
					K Rp	K Rp RKPD	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
34			KECAMATAN PADANG LAWEH																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.661.308.665	-	349.070.000	-	394.411.500	2	89.304.900	2	99.295.632	3	126.391.783	-	77.725.600	-	392.717.915	-	664.062.315				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	523.269.798	-	58.767.600	-	46.077.371	0	6.262.000	1	24.827.200	0	5.226.000	-	9.732.150	-	46.047.350	-	95.082.800				
			Program peningkatan Disiplin Aparatur	NA	159.250.000		19.250.000																		
			Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	NA	29.500.000		-																		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	NA	51.880.000	-	15.500.000	-	13.320.000	1	8.290.000	-	-	1	4.040.000	-	990.000	-	13.320.000	-	27.830.000				
TOTAL								453.808.871	4	103.856.900	4	124.122.832	4	135.657.783	-	88.447.750	-	452.085.265	-	159.388.800	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)									22,89%			27,35%		29,89%		19,49%		99,62%							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									
35			KECAMATAN TULAMANG																						
			Program pelayanan administrasi perkantoran		2.701.999.050	2	396.311.000	12	502.989.300	2	135.532.383	2	117.658.804	3	146.495.017	-	117.934.822	-	468.631.026						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur		1.051.298.360	0	32.653.600	2	24.004.950	1	2.980.000	0	8.649.491	0	11.045.453	-	343.400	-	23.018.344	-	55.328.544				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		190.967.800	0	51.000.000	1	19.275.000	-	-	-	-	1	19.275.000	-	-	-	19.275.000	-	70.275.000				
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		36.721.000	0	-																		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	2	59.138.700	1	15.135.000	2	16.518.000	0	1.500.000	-	-	-	-	-	14.908.500	-	16.408.500	-	16.635.000				
TOTAL								562.787.250	4	140.012.383	2	126.368.295	4	170.815.470	-	133.186.722	-	527.332.870	-	430.834.144	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)									24,88%			22,44%		31,42%		23,07%		93,70%							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									





### 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perumusan dan Identifikasi permasalahan pembangunan lebih utama mengangkat analisa permasalahan pembangunan yang dianalisa berdasarkan capaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya.

Dalam kondisi daerah kalau dilihat pada beberapa aspek pembangunan memerlukan percepatan pembangunan tetapi memiliki kekayaan sumberdaya alam maka permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya daerah untuk dapat secara sinergis memacu pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantara berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan (*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah.

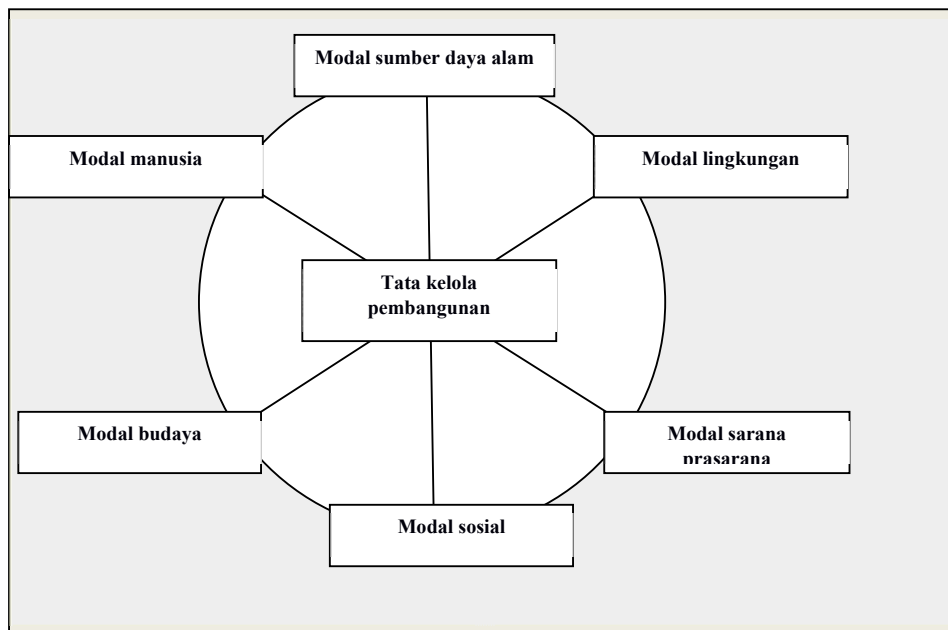
- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.
- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, modal alam untuk memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- c. **Modal sosial** berupa berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat seperti organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan) atau organisasi yang bersifat fungsional (seperti kelompok tani, koperasi), dan organisasi sosial lainnya (seperti karang taruna, berbagai perkumpulan olahraga dan sosial). Organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kegiatan ekonomi berbasis sosial.
- d. **Modal budaya** yang bersifat intangible berupa nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersamadan bersifat tangibel berupa

peninggalan sejarah fisik dan tradisi budaya. Keberlanjutan budaya, manifestasi fisiknya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.

- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas lahan akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan ekonomi seperti irigasi, pasar, jalan dan berbagai prasarana dan sarana; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; dan sarana pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.
- g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal menyangkut berbagai aspek seperti kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan dukungan sistem informasi, keandalan proses dan prosedur perencanaan, dukungan peraturan yang lengkap didukung lembaga pelaksana yang efektif, dan koordinasi pembangunan yang baik. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

**Gambar 2.5:**

**Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (*Assets-Based Development*)**



Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan dengan demikian bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.

Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah yang terdapat pada Bab 2 dan kondisi yang ada saat ini antara lain :

Tabel 2.65 Permasalah Kabupaten Dharmasraya Dikaitkan dengan Indikator Pembangunan

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	<b>Indikator makro</b>				
	<b>IPM</b>				
		masih relatif rendahnya IPM daerah dibanding provinsi dan nasional	<b>kab</b> 69,84 (2015) 70,25 (2016) 70,40(2017) 70,86 (2018) 71,52(2019) <b>prov</b> 69,98 (2015) 70,73 (2016) 71,24 (2017) 71,73(2018) 72,32(2019) <b>nasional</b> 69,55 (2015) 70,18 (2016) 70,81 (2017) 2018(71,39) 2019 (71,92)	relatif masih rendahnya IPM Kab. Dharmasraya dibandingkan IPM Provinsi Sumbar, Namun berada di atas IPM Nasional. masih relatif rendahnya capaian indikator pada bidang pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan capaian provinsi Sumatera Barat	perlu langkah percepatan pembangunan dalam sektor pendidikan
	<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	melambatnya pertumbuhan PDRB	6,50 (2013) 6,34 (2014) 5,75 (2015) 5,42 (2016) 5,45(2017) 5,70(2018) 4,98(2019)	hal ini disebabkan dominan oleh adanya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalan yang memegang peran cukup besar sekitar 10,58% dari nilai PDRB ADHK, selanjutnya juga adanya pertumbuhan yang melambat disektor industri pengolahan (3,5%) dan sektor pengadaan listrik dan gas (1,93%) perlambatan juga dipengaruhi oleh dampak perlambatan perkembangan ekonomi secara nasional/regional	perlu mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor dominan untuk mendorong perkembangan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor industri, khususnya skala usaha IKM mikro yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pelatihan dan fasilitasi kredit IKM/UKM
	PDRB perkapita Dharماسraya berada di bawah nasional	34,8 juta (2015), 36,77 juta (2016) 39,5 juta (2017) 41,80(2019) prov 34,1 (2015) 37,21(2016) 40,32(2017) nasional 35,1 juta (2015) 47,96 juta(2016) 51,89 juta(2017)	PDRB perkapita nasional Dharماسraya lebih tinggi dari rata-rata sumbar, namun berada di bawah PDB perkapita nasional	mendorong sektor-sektor dominan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		Masih adanya penduduk miskin	7,17 (2015), 7,16(2016) 6,68(2017) 6,42(2018) 6,29)2019) prov 7,31(2015) 7,09(2016), 6,87(2017) 6,65(2018), 6,42 (2019) nas 8,22 (2015) 10,7 (2016) 10,12 (2017) 9,82(2018) 9,22 (2019)	jumlah penduduk miskin fluktuatif dari tahun sebelumnya, namun berada di bawah angka provinsi dan nasional	perlu strategi dalam penanggulangan kemiskinan dan rencana aksi yang berpatokan kepada karakter kemiskinan yang dialami oleh masing-masing KK/jiwa
<b>URUSAN WAJIB</b>					
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
	Bidang pendidikan				
		rendahnya APM maupun APK di tingkat SMP/MTs dibanding tingkat SD/MI	APK SD/MI 108,61 (2015) 112,43(2016) 110,44(2017) 110,99(2018)	relatif rendahnya capaian APK maupun APM di tingkat SMP/MTs jauh di bawah SD/MI	untuk meningkatkan APK dan APM SMP/MTs ini perlu didorong dengan peningkatan sarpras di tingkat SMP/MTs serta

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
			APK SMP/MTs 90,93 (2015) 76,19(2016) 81,35(2017) 90,62(2018)		perlu adanya peningkatan mutu pendidikan
			APM SD/MI 100 (2015) 98,23(2016) 98,87(2017) 99,31(2018) APM SMP/MTs 78,33 (2015) 76,19 (2016) 73,88(2017) 77,17(2018)	- adanya indikasi sebagian tamatan SD/MI melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ke luar daerah atau mengalami putus sekolah.	
		masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Kab (2019) ARLS 8,46, HLS 12,42 prov ARLS 8,92, HLS 14,01	ARLS dan HLS merupakan 2 (dua) indikator yang digunakan untuk menghitung IPM, kedua indikator ini berada di bawah rata-rata sumbar dan masih jauh dari target yang harus dicapai untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun	mendorong peningkatan ARLS dan HLS melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan serta mutu pendidikan
	Bidang kesehatan				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		Masih ditemukan kematian bayi meski angka menurun	AKB : 20,15 (2015), 13,3 (2016), 12 (2017), 13,8 (2018) Prov : 27	tingginya jumlah kematian bayi yang terjadi mulai tahun 2012 hingga tahun 2015, dan angka ini tergolong besar di sumbar	meningkatkan penyuluhan kepada ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan rutin, serta peningkatan keterampilan tenaga medis terkait (khususnya bidan)
		belum semua Puskesmas terakreditasi dan akreditasi RSUD	Akreditasi Puskesmas 13 % (2016) 42,86%(2017) 86%(2018) 93% (2019)  Akreditasi RS Dasar (2014) Dasar (2016) Utama(2018)	perlu dilakukan untuk untuk pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui sebuah sistem perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan, serta penerapan manajemen risiko	melakukan penilaian dan fasilitasi terhadap penilaian Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
		masih ditemukannya balita gizi buruk	2011 :101 org, 2015 14 org	masih ditemuinya balita gizi buruk meski angkanya relatif menurun.	pemberian makanan tambahan bagi balita khususnya yang berasal dari KK miskin
		adanya prevelensi stunting	30 (2016), 25 (2017) 15(2018), 7,6 (2019)	masih ditemukannya kasus prevelansi stunting	perlunya usaha penanggulangan kejadian prevelansi stunting dan peningkatan gizi balita



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
					terutama berasal dari keluarga miskin
		masih ditemukannya kasus baru TB	188(2015), 174(2016), 220(2017), 192 (2018)	Masih ditemui kasus TB	perlunya menjaga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui menjaga kebersihan lingkungan dan PHBS lainnya
		terjadinya KLB DBD	135 (2015) 349(2016) 60(2017) 19(2018)	KLB ini terjadi di tahun 2013 dan tahun 2014	
		adanya kasus HIV/AIDS	HIV 13 kasus, AIDS 12 kasus (2014), HIV 6 kasus, AIDS 1 kasus (2015), 6 kasus (2016) 6 kasus (2018), 4 kasus (2019)	Dharmasraya terletak di daerah perbatasan antara 3 provinsi dan lalu lintas nasional serta terdapatnya tempat hiburan malam	perlunya monitoring dan penyuluhan terhadap remaja dan pelaku hiburan malam untuk menjaga penularan danantisipasi penyakit HIV/AIDS
	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang				
a	- pekerjaan umum				
		menurunnya jalan kondisi mantap/kondisi baik	76,14 (2014), 66,70 (2015), 38,94 (2016) 52,21 (2017), 53,76 (2018)	menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan dominan banyaknya kendaraan yang memiliki melebihi muatan dan meningkatnya volume kendaraan bermuatan berat	pengaturan tonase muatan kendaraan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih kurangnya Proporsi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	86,71 (2015), 31,20 (2016), 46,23 (2017), 49,41 (2018)	menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan dominan banyaknya kendaraan yang memiliki melebihi muatan dan meningkatnya volume kendaraan bermuatan berat	pengaturan tonase muatan kendaraan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
		masih rendahnya cakupan masyarakat yang mendapatkan air minum/air bersih	14,53 (2016) 16,26 (2017) 19,36 (2018)	Keterbatasan ketersediaan lahan dan dana masyarakat dalam program partisipasi penyediaan air bersih	Kelengkapan pemenuhan persyaratan oleh masyarakat dalam program penyediaan air bersih
		masih kurangnya pelaksanaan sanitasi layak	39,99 (2016) 39,79 (2017) 40,01 (2018)	masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang disediakan dan penanganan limbah	mengurangi timbunan sampah dan pengoptimalan pengangkutan sampah ke TPS
				masih terdapatnya daerah genangan	
		adanya kerusakan jaringan irigasi serta belum semua areal persawahan dialiri irigasi teknis		Kurangnya pemeliharaan terhadap jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan
b	- penataan ruang				
		Dokumen Tata Ruang Yang Sudah legal hanya RTRW sementara untuk pembangunan dibutuhkan rencana tata ruang yang memiliki skala besar		Belum ditetapkan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan	dalam proses penetapan Perda
	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih terdapatnya rumah tidak layak huni		Kesenjangan sosial serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah layak huni	Sosialisasi dan bantuan penyediaan rumah standar layak huni
		Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog)		Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak	
		Belum terpenuhinya standar perumahan dari segi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)		Kurangnya pengawasan dari investor terhadap developer/pihak pengembang perumahan dalam hal penyediaan PSU	Fasilitasi dari pemerintah terhadap investor
		Belum terbebasnya pemukiman dari kawasan kumuh		Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Sosialisasi
		Belum tertatanya pemukiman secara layak, terutama di daerah tertinggal		Belum ditetapkannya RDTR Kawasan	dalam proses penetapan Perda
	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
		Adanya kasus penyakit masyarakat		Dharmasraya terletak di daerah perbatasan antara 3 provinsi dan lalu lintas nasional serta terdapatnya tempat hiburan malam	Penertiban tempat hiburan malam
		Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran			
	Bidang sosial				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	belum seluruhnya PMKS yang tertangani	penyandang PMKS, diantaranya : 8.609 KK miskin, lansia 2.132 orang, penyandang disabilitas 606 orang, suku anak dalam 74 jiwa	penanganan hanya berkisar 13 s/d 74% dari PMKS yang ada sertameningkatnya kejadian bencana alam dan sosial meningkat	
	data KK miskin yang masih belum seutuhnya akurat dan belum memperlihatkan karakteristik kemiskinan		masih kurangnya pemanfaatan data kemiskinan dalam perumusan kebijakan pembangunan	merumuskan kebijakan pembangunan khusus pada pengurangan angka kemiskinan berdasarkan penyebab/karakternya dan updating data kemiskinan secara berkala
	belum memadainya prasarana dan sarana pada pelayanan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	2 panti asuhan	daya tampung panti asuhan yang melebihi dari kapasitas seharusnya	penambahan gedung dan sarana pendukung

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana	kejadian bencana 2015 : banjir 3 kali, kebakaran 5 kali, angin putting beliung 1 kali	Pengurangan dampak bencana dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, baik pangan, penanganan gangguan kesehatan serta bantuan lainnya, baik berupa dana bantuan sosial maupun dari bentuk kegiatan di perangkat daerah terkait	pembentukan kampung/nagari siaga bencana, dan bantuan sosial
	<b>urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</b>				
	Bidang tenaga kerja				
		angka partisipasi angkatan kerja cenderung menurun	69,21 (2010), 65,88 (2015), 66,50 (2016), 66,96 (2017), 64,53 (2018), 65,50(2019)	pertumbuhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berada di atas pertumbuhan penduduk angkatan kerja, sehingga banyak lapangan kerja yang belum terisi	hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pemuda/pencari kerja sesuai dengan bakat dan lapangan kerja yang tersedia
		Meningkatnya tingkat pengangguran	3,51 (2015) 3,38 (2016) 3,69(2017) 3,94 (2018) 5,80(2019)	naik turunnya jumlah pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya harga komoditi sub sektor perkebunan yang memegang peran cukup dominan dalam perekonomian daerah	menyediakan lapangan pekerjaan pada sektor yang memiliki prospek lebih baik dan konsisten terhadap perubahan gejolak ekonomi
	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	masih rendahnya indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)	IPG : 88,29(2015)., 88,26(2018), 88,30(2019) IDG 47,47 (2015), 50 (2018) dan (2019)	hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman dan komitmen perspektif gender	melaksanakan program dan fokus pada kebijakan kesetaraan gender
	masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga	rata-rata 6 kasus /tahun (yang dilaporkan). Kejadian tahunan : 12 (2012, 70(2013), 32(2014) 16(2015) 1 kasus (2019)	masih adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat kepada perempuan	optimalisasi pengaduan KDRT dan perlindungan anak
	masih terjadinya perkawinan usia muda dan seks pra nikah di kalangan remaja		adanya perkawinan usia muda berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga, sedangkan adanya perilaku seks pranikah cenderung menggambarkan kurangnya perhatian keluarga dan sikap masyarakat yang kurang kondusif terhadap hal ini	perlunya pencerahan dan sosialisasi akan bahaya seks pra nikah dan dampak menikah usia muda tanpa perencanaan terhadap masa depan remaja dimasa akan datang

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		menurunnya persentase perempuan di lembaga pemerintahan	82,1, (2011) 73,51 (2015) 29,93( 2017) 31,70(2018)	dari tahun 2011 hingga tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah sedikit mengalami kenaikan, namun jumlah pekerja perempuan di sektor swasta lebih menjanjikan dan menyerap lapangan pekerjaan lebih besar lagi dibanding ketersediaan instansi pemerintah	hal ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki prospek lapangan pekerjaan di sektor swasta dan mampu bersaing di sektor swasta
		Masih adanya perempuan dan anak korban dari tindakan kekerasan		banyaknya kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan belum dapat disejajarkan dengan penyelesaian kasus yang ada bahkan jumlahnya menurun	optimalisasi fungsi pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Bidang pangan				
		masih terdapatnya daerah rentan dan rawan pangan	2015 xxx nagari rentan pangan, nagari rawan pangan 2 (2016), 2 (2017), 2 (2018)	rawan pangan disebabkan oleh adanya rumah tangga miskin	pemberian bantuan makanan pangan dan makanan tambahan kepada keluarga kurang mampu
		belum adanya cadangan pangan daerah	xxx lumbung pangan, ketersediaan pangan utama 1,22 (2017), 396.904,82 (2018)	pembentukan cadangan pangan merupakan tuntutan dari PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi	pembentukan regulasi yang mengatur kemandirian pangan dan membentuk cadangan pangan

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih tingginya konsumsi beras dan kurangnya keanekaragaman pangan	110 kg/orang/tahun (provinsi 2014)	masih tingginya konsumsi beras	melakukan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari tingkat keluarga yang dilakukan melalui peningkatan peran PKK
	Bidang pertanahan				
		Masih terdapatnya tanah pemerintah/pemerintah daerah yang belum bersertifikat	Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat 64 (2016), 65 (2015), 64,38 (2017), 65,88 (2018)	dokumen kepemilikan yang asli dari OPD/pihak asset pengguna tidak lengkap/tidak ada, pengawasan (bukti) fisik lapangan tidak jelas, khusus untuk tanah yang berasal dari Fasum transmigrasi (tanah R) : dokumen penyerahan dari transmigrasi ke pemda tidak lengkap, adanya pengurusan hak pakai tanah dari transmigrasi di jadikan alasan oleh masyarakat untuk menguasai tanah dan mendirikan bangunan permanen.	Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait
		Belum seluruh tanah masyarakat memiliki sertifikat		Belum lengkapnya kepemilikan dokumen untuk pengurusan sertifikat	Fasilitasi pengurusan sertikat gratis (Prona)
	Bidang lingkungan hidup				
		tingginya tingkat pencemaran air sungai Batanghari	??? (Data SLHD Tahun 2014 dan 2015)	disebabkan oleh maraknya illegal mining di sepanjang aliran sungai Batanghari	koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan pencemaran sungai dan penanganan dampak pencemaran



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
					jangka panjang (kerusakan biotik sungai)
		pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. untuk kualitas air bersih /air minum yang berasal dari sumur belum memenuhi baku mutu air kelas I untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi	??? (Data SLHD Tahun 2014 dan 2015)	Pengelolaan limbah cair domestik yang masih belum terkelola dengan baik, sehingga terjadinya rembesan ke sumber air tanah. Masih banyak rumah tangga yang belum menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair domestik rumah tangga dan membuang ke saluran/ perairan terbuka.	Perlunya optimalisasi pengelolaan limbah cair domestik dan operasional IPLT yang ada tersedia di Kab. Dharmasraya. Menyediakan pengelolaan limbah cair domestik skala rumah tangga sehingga tidak lagi dibuang ke saluran/perairan terbuka.
		Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis akibat adanya alih fungsi lahan dan Illegal logging	??? (Data SLHD Tahun 2014 dan 2015)	Hasil analisa citra satelit tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan luas lahan kritis dan sangat kritis di Kab.Dharmasraya yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.	Pengelolaan lahan sesuai dengan peruntukan dan fungsi lahan, perlu sosialisasi terkait penghijauan, dan pelaksanaan kegiatan konservasi, serta pemulihan lahan kritis.
	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		belum semua penduduk memiliki KTP (eKTP), Kartu Keluarga, serta surat keterangan kependudukan lainnya (pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap)	KTP: 90% (2015) 98%(2018) 99,23% (2019) KK: 94%(2015) 98%(2018) 98,58(2019) pakta kelahiran	di tahun 2015 baru 90,98% penduduk di atas usia 17 tahun memiliki KTP. Artinya belum semua penduduk di atas 17 tahun memiliki KTP. untuk kepemilikan akta kelahiran baru dimiliki oleh 13% penduduk. penyebabnya diantaranya kurangnya minat dan jangkauan akses pelayanan pencatatan sipil yang saat ini dapat dilakukan di kantor camat	perlu sosialisasi pelayanan keliling, dan penertiban dokumen kependudukan secara keseluruhan
		belum semua penduduk memiliki akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta pencatatan sipil lainnya	akta kelahiran 65% (2015) 82%(2018) 85,73%(2019) akta kematian 100 orang (2015), 603 orang (2019)	pencatatan administrasi kependudukan baru dilaksanan sejak tahun 2011, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus kependudukan	meningkatkan peran pemerintahan jorong/nagari untuk ikut melaporkan dan mandata terkait peristiwa perubahan status kependudukan warganya
Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa					
		masih kurangnya kemampuan aparatur nagari/desa dalam pengelolaan pemerintahan nagari		masih relatif barunya pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana dalam hal ini pemerintah nagari dituntut untuk melaksanakan berbagai dituntut dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya, yaitu pelaksanaan 4 (empat) sub bidang urusan yang dilakukan pembinaan oleh pemerintah kabupaten, yaitu diantaranya Penataan Desa,	meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kualitas apartur pemerintah nagari

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
				Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Disamping itu desa/nagari juga dituntut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana desa maupun dana APB Nagari secara keseluruhan	
	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
		masih terdapatnya pasangan usia subur yang tidak terjangkau layanan KB	unmeet need 11,54% (2018), 10,75(2019)	masih sedikitnya peserta Metode KB jangka panjang (MKJP) yang menggunakan IUD dan MOP maupun jenis alat kb lainnya	pemenuhan alat, obat kontrasepsi (alokon), sosialisasi di tingkat jorong tentang KIE dan konseling keluarga
		kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB	PKB ASN 11 org, PLKB honorer 9 orang	jumlah PKB dan PLKB yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada, dimana seharusnya 1 orang untuk 2 nagari	penambahan jumlah PKB dan PLKB serta pelatihan tenaga penyuluh KB
		terdapatnya kasus pernikahan dini/ usia muda		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat pernikahan usia dini	Sosialisasi
	Bidang perhubungan				
		masih banyaknya jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan	63 (2014), 88 (2015), 91 (2016), 76(2017) , 61(2018)	Dharmasraya berada di jalur lintas sumatera dan memiliki traffik yang padat	pemasangan dan penambahan rambu lalu lintas serta pengaturan lalu lintas

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		terdapatnya kendaraan umum dan kendaraan truk yang tidak memiliki KIR dan tidak layak jalan	Persentase angkutan barang yang melakukan KIR 75 (2016), 77(2017), 61(2018), 87 (2019)	terdapatnya beberapa kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk beroperasi	
		banyaknya kendaraan yang melebihi tonase yang telah ditentukan		adanya kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan kelebihan tonase	
		Belum terpenuhinya standar sarana dan prasana perhubungan sesuai dengan akreditasi pada kementerian perhubungan	Akreditasi C (2018) dan (2019)	Diantara yang diatur adalah mengenai unit pengujian kendaran bermotor sesuai dengan Permenhub Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan jaminan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor serta terwujudnya kelestarian lingkungan akibat pencemaran . sehingga jika standar ini tidak dipenuhi maka unit PKB ini tidak dapat dioperasikan	Pemenuhan Unit Pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan yang ada
	Bidang komunikasi dan informatika				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	54,05(2017), 67,56(2018)	belum semua OPD memiliki jaringan internet dan website yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat	pemasangan jaringan internet terintegrasi oleh Kominfo
		masih terdapatnya OPD yang belum memiliki jaringan internet dan belum memiliki website	32,43(2017), 51,35(2018)	terdapat OPD yang masih menggunakan gedung belum tetap (kontrak) serta lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet	
	Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah				
		banyaknya koperasi tidak aktif	Koperasi aktif 38,42 (2018) 39,22(2019)	Belum adanya regulasi yang jelas tentang pembubaran koperasi tidak aktif	pembubaran koperasi yang sudah tidak beroperasi sesuai peraturan yang berlaku
		terdapatnya koperasi yang memiliki manajemen kurang baik		adanya pengurus koperasi yang belum terlatih	pelatihan pengurus koperasi dan pembinaan secara rutin
	Bidang penanaman modal				
		belum optimalnya pelaksanaan perizinan serta kurangnya koordinasi OPD terkait perizinan			Penataan alur perizinan secara terintegrasi dan jelas
		Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi			Perbaikan perencanaan hingga pelaksanaan teknis bidang penanaman modal

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang kepemudaan dan olah raga				
		kurangnya pembinaan terhadap atlet usia dini		Dharmasraya memiliki potensi atlit muda yang dapat dikembangkan dan sudah berprestasi di berbagai cabang olah raga	Pembinaan atlit berprestasi derta cabang olahraga yang berpotensi untuk dikembangkan, serta pemanfaatan sarana dan prasana yang sudah ada secara optimal
		kurangnya pembinaan terhadap cabang olah raga dan atlet berprestasi		Pemetaan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk dikembangkan	
		kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan		serta Pembinaan serta revitalisasi kelembagaan yang melaksanakan olahraga	
	Bidang statistik				
		kurangnya ketersediaan data indikator kinerja pemerintahan daerah	75% (2017) 80%(2018)	disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia di OPD dan data yang kurang akurat serta sumber yang perlu disepakati	optimalisasi/peningkatan fungsi forum data kabupaten dan pemberlakuan "one data"
	Bidang persandian				
		belum optimalnya pengamanan jaringan dan informasi publik		belum adanya aturan pelaksanaan persandian di daerah	
	Bidang kebudayaan				
		belum optimalnya inventarisasi terhadap cagar budaya daerah		Inventarisasi cagar budaya masih dalam proses	
		belum adanya penelitian dan pengembangan terhadap budaya daerah		belum terpublikasinya penelitian pengembangan budaya oleh pihak tertentu	

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang perpustakaan				
		kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah		Pustaka daerah tidak menarik untuk dikunjungi	perlu inovasi dan optimalisasi perpustakaan daerah
	Bidang kearsipan				
		masih terdapatnya OPD yang belum melakukan penataan arsip secara baku	7,89 % (2017-2019)	Adanya jangka waktu untuk pemilahan arsip aktif dan inaktif	sosialisasi dan pelatihan penataan arsip
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
	Bidang kelautan dan perikanan				
		kurangnya dukungan pemasaran terhadap produksi perikanan			Melakukan penataan kelembagaan bidang perikanan (koperasi maupun gapoktan/poktan)
		kurangnya pasokan pakan ikan yang berkualitas			
	Bidang pariwisata				
		belum ditetapkannya Rencana induk pariwisata daerah (RIPARDA)		RIPARDA merupakan dokumen strategis dalam pengembangan kepariwisataan daerah	percepatan penetapan RIPARDA
		belum tergalinya potensi wisata secara optimal		terdapatnya potensi wisata alam dan wisata lainnya yang belum dikembangkan	menggali potensi wisata daerah
	Bidang pertanian				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		harga komoditi yang fluktuatif dan kurang stabil		hal ini terjadi dominan pada komoditi karet dan sawit sebagai komoditi yang banyak diusahakan oleh masyarakat	
		adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian		terdapatnya lahan pertanian masyarakat yang berubah fungsi, diantaranya menjadi kawasan perumahan, dan pertambangan	
		tingginya tingkat pencemaran air irigasi batanghari			
	Bidang kehutanan			pindah ke provinsi	
	Bidang energi dan sumber daya mineral			pindah ke provinsi	
	Bidang perdagangan				
		masih terdapatnya prasarana dan sarana perdagangan maupun pasar dalam kondisi belum baik		adanya los/kios serta pasar tradisional yang memiliki penataan baik dan kondisi belum optimal	penataan sarpras pasar
		belum adanya pasar kabupaten			pembangunan pasar kabupaten
		belum terdatanya pedagang pasar		kurangnya pendataan pedagang pasar (termasuk PKL) sehingga adanya kebijakan yang kurang tepat sasaran	



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		Belum adanya unit/sarana yang menangani alat tera ukur di kabupaten			
	Bidang perindustrian				
		masih rendahnya cakupan binaan terhadap IKM di daerah		masih kurangnya binaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap IKM, baik dari segi fasilitasi permodalan maupun pelatihan kewirausahaan	memberikan pelatihan dan binaan kepada IKM-IKM yang berpotensi untuk berkembang dan sesuai dengan karakter IKM serta mendorong untuk naik kelas
	Bidang transmigrasi				
		Terdapat perbedaan titik lokasi untuk kawasan transmigrasi antara Dokumen RTRW dengan SKPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Dengan adanya perbedaan titik lokasi transmigrasi Padang hilalang SP 2 di kec. IX Kota,	Perbaikan/penyesuaian sejalan dengan penataan ruang daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat
	<b>urusan penunjang</b>				
	Bidang perencanaan				
		kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran		masih terdapatnya ketidak sesuaian antara dokumen perencanaan serta keterkaitan dengan dokumen APBD	meningkatkan kualitas perencanaan daerah

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih perlunya peningkatan kualitas belanja daerah		masih terdapatnya belanja yang belum dianggarkan secara efektif dan efisien	
		belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi			
		sulitnya mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan/ lima tahunan			
		kurangnya daya tampung hasil musrenbang ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran		Hasil musrenbang yang tidak didasarkan pada prioritas pembangunan dan keterbatasan APBD dalam menampung hasil musrenbang	
	Bidang keuangan				
		kurangnya realisasi pendapatan daerah terhadap target yang dicapai	berkisar 63 s/d 86%	masih kurangnya pencapaian pendapatan daerah, terutama pada pendapatan pajak	
		masih kurangnya serapan belanja daerah			
		belum adanya pemetaan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan daerah		proyeksi pendapatan daerah masih berdasarkan perkembangan realisasi sebelumnya dan masih belum mempertimbangkan potensi daerah	pemetaan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah serta pendataan objek dan

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
					potensi pajak, retibusi dan pendapatan daerah lainnya
	Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
		kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada jabatan fungsional serta struktural		masih sedikitnya jabatan struktura/fungsional yang mengikuti diklat sebelum penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	melaksanakan diklat sesuai dengan tupoksi dan jabatan yang ada
		masih perlunya peningkatan akurasi data kepegawaian			
	Bidang penelitian dan pengembangan				
		belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan daerah		bidang kelitbangan merupakan salah satu urusan baru yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014	menyusun Rencana induk kelitbangan, rencana kerja tahunan kelitbangan, membentuk Dewan Riset Daerah (DRD), dan pemanfaatan dan pengembangan hasil penetian
	Inspektorat				
		masih banyaknya temuan penyimpangan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan maupun pelanggaran administratif			

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah			
		masih belum sesuai dengan penganggaran dengan prinsip kewenangan pada perangkat daerah, bahwa satu perangkat daerah hanya boleh maksimal 3 (tiga) urusan, serta 1 (satu) urusan tidak boleh dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah		

## **BAB III**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Daerah tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dan Arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2017 hingga sampai dengan 2019 serta proyeksi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Secara umum kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) selama tahun 2020, sehingga kebijakan perekonomian lebih diarahkan untuk pemulihan ekonomi danantisipasi dampak sosial. Untuk itu akan dijelaskan masing-masing kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

##### **3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2021**

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyebaran virus ini menyebabkan penyesuaian strategi dan upaya pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Rencana pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Langkah antisipatif terus dilakukan sebagai mitigasi atas terdampaknya sejumlah target pembangunan akibat pandemi Covid-19, seperti pada target Kemiskinan karena pandemi ini menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin, adanya ancaman PHK yang berdampak pada meningkatnya persentase pengangguran. Selain itu di bidang sosial juga perlu adanya pembenahan terhadap akses pelayanan kesehatan serta perubahan pola belajar di sekolah melalui peningkatan kesiapan guru mengajar secara daring, infrastruktur TIK yang perlu dioptimalkan, dan perluasan teknologi internet bagi keluarga miskin dan rentan.

**Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017 s/d 2019  
dan proyeksi tahun 2020 s/d 2021**

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2020**		Proyeksi Tahun 2021***
		2017	2018	2019	Sebelum covid-19	covid-19	
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	13,588,797.30	14,837,357.50	15,833,943.40	-	-	-
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	37,877,774.92	39,366,884.53	40,844,017.67	-	-	-
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	10.12	9.66	9.22	8,68	9,24	9,1
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.07	5.17	5.03	5,3	2,3	5,0
5	Gini Rasio	0.391	0.384	0.382	0,378	0,379	0,376
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,5	5,34	5,28	5,0	7,8	6,3
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.81	71.39	71.92	72,51	72,30	73,24

Sumber : \* Statistik Indonesia Tahun 2020

\*\* paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020

\*\*\* paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat (sedang), Tahun 2020

Dilihat dari kondisi ekonomi makro sebagaimana tabel di atas, maka terdapat koreksi terhadap target pembangunan tahun 2020 seperti semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat covid-19 dari 5,3 persen menjadi hanya 2,3 persen, di tahun 2020 dan ditargetkan 5,0 persen di tahun 2021. Adanya peningkatan tingkat kemiskinan dari 8,68 persen naik menjadi 9,24 persen, gini rasio sedikit naik dari 0,378 menjadi 0,379, meningkatnya pengangguran akibat PHK, penyerapan tenaga kerja yang minim dengan angka tingkat pengangguran terbuka dari 5,0 persen menjadi 7,8 persen, begitupun target IPM yang juga mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan di dalam RPJMN.

Adanya koreksi terhadap target pembangunan tahun 2020 juga akan berdampak pada proyeksi pembangunan di tahun 2021, karena kebijakan ekonomi di tahun 2021 lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi atau akselerasi recovery dan reformasi pada sektor-sektor strategis terhadap dampak Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020.

### **3.1.2. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021**

**Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2020 s/d 2021**

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2020**		Proyeksi Tahun 2021***
		2017	2018	2019	Sebelum covid-19	covid-19	
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	213,889,860.25	230,528,812.65	246,422,724.77	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2020**		Proyeksi Tahun 2021***
		2017	2018	2019	Sebelum covid-19	covid-19	
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	40,193,611.27	42,832,685.72	45,288,329.90	48.190.0000	-	50.930.000
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6.75	6.55	6.29	5,83	6,06	5,85
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.29	5.14	5.08	5,88	1,37	4,17
5	Gini Rasio	0.312	0.305	0.306	0,328	0,273	0,266
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,58	5,55	5,33	5,82	7.51	7,38
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.24	71.73	72.39	72,13	71,57	72,19

Sumber : \* Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020

\*\* RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Dilihat dari kondisi ekonomi makro di atas, bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat, dan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi berada di bawah target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dengan target sebesar 5,88 persen hanya terproyeksi 1,37 persen. Dilihat dari tingkat kemiskinan dari target 5,83 persen terproyeksi sebesar 6,06 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,82 persen terproyeksi sebesar 7,51 persen, IPM yang proyeksinya sebesar 71,57 dari target RPJMD sebesar 72,13 persen Namun berbeda dengan indikator lainnya yang memperlihatkan proyeksinya berada di atas target yang ditetapkan di dalam RPJMD yaitu gini rasio yang ditargetkan sebesar 0,328 terproyeksi sebesar 0,273.

### 3.1.3. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2019 dan tahun 2021, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data proyeksi berdasarkan perkembangan ekonomi tahun sebelumnya, hal ini terkait dengan masih belum keluarnya data PDRB dan data statistik ekonomi lainnya secara resmi oleh BPS untuk tingkat Kabupaten hingga RKPD ini ditetapkan. Berdasarkan hasil proyeksi maka perkembangan nilai PDRB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2020 s/d 2021**

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2020**		Proyeksi Tahun 2021***
		2017	2018	2019	Sebelum covid-19	covid-19	
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	8,433,539.83	9,282,383.18	9,917,019.28	12,118,548.15	10.863.603,7	11.322.720,3

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2020**		Proyeksi Tahun 2021***
		2017	2018	2019	Sebelum covid-19	covid-19	
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	39,419,657	41,052,193	41,809,776.23	46,851,766	42.000.000	42.500.000
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6.68	6.42	6.29	5,89	6,06	5,85
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.48	5.32	4.95	5,90	1,10	4,17
5	Gini Rasio	0.25	0.26	0.28	0.210	0,273	0,266
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	3,69	3,94	5,08**	1,95	7,51	7,38
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.40	70.86	71.52	70,88	71,57	72,19

Sumber : \* Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020, dan Proyeksi Bappeda Tahun 2020

Ditinjau dari analisa dari indikator makro di atas, Nilai PDRB ADHB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 8.433.539,983 ditahun 2017 ke 9.917.019,28 ditahun 2019 yang menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan kondisi capaian Provinsi Sumatera Barat, meskipun ada capaian yang berada di bawah RPJMD, namun beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2017 hingga tahun 2019, berdampak terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, yaitu di tahun 2017 tercatat sebanyak 6,68 persen dan angka ini menurun menjadi 6,29 persen ditahun 2019

Melihat tingkat capaian ekonomi makro serta mempedomani kondisi kekinian terkait dengan dampak covid-19 yang terjadi di tahun 2020, dan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap aktivitas perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi dan sektor jasa. Gambaran perkiraan kondisi ekonomi makro untuk tahun 2020 dan 2021, didasari pada realisasi tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi terkini khususnya terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 yang masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini.

Pasca berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai diterapkannya skema New Normal, yang diharapkan mampu kembali menggairahkan aktifitas ekonomi masyarakat pasca penerapan PSBB dimanaberbagai aktivitas perekonomian sudah mulai bergerak dan kembali bergairah. Skema New Normal yang diterapkan dengan prokoler kesehatan di beberapa jenis aktivitas perekonomian tetap saja belum akan mampu memulihkan aktifitasmasyarakat seperti sebelum berjangkitnya Covid-19. Kondisi ini akan membuat pergerakan perekonomian sedikit melambat apalagi masih adanya kasus baru Covid-19. Tantangan yang cukup berat akibat Covid-19 diharapkan dapat dilalui bersama apalagi Pemerintah dan Dunia Global terus bekerja dalam menekan penyebaran Covid-19. Skema penerapan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) dan diiringi oleh intervensi Pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan



keuangan diharapkan kondisi perekonomian secara makro di tahun 2021 akan pulih.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan ekonomi sebagaimana sub bab 3.1 menjadi dasar utama dalam memproyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah

#### **3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah.

#### **3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

##### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam menjelaskan dan menganalisis Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 mempedomani Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebelum diterbitkannya permendagri terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sampai tahun 2019 serta APBD tahun 2020, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

**Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2019 dan APBD Tahun 2020**

Kode Rek.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>877,484,682,061</b>	<b>949,023,480,859</b>	<b>962,862,866,327</b>	<b>1,019,358,071,248</b>	<b>1,031,026,154,667</b>	<b>3.90%</b>
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56,886,658,607	98,937,393,388	80,085,859,652	78,882,919,152	104,794,164,000	9.63%
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	11,555,361,226	14,933,091,579	20,945,543,535	19,178,964,230	28,095,401,000	22.41%
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	4,770,341,793	4,186,557,034	3,869,348,325	3,054,849,682	5,351,178,000	0.08%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,209,118,945	3,834,414,130	3,860,967,792	3,590,314,080	4,641,438,000	1.60%
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36,351,836,643	75,983,330,645	51,410,000,000	53,058,791,161	66,706,147,000	6.97%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	741,390,327,942	696,906,890,931	721,410,440,413	761,630,742,880	803,020,617,367	2.57%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,292,650,624	13,255,794,542	26,825,860,482	15,828,178,551	18,349,221,367	-3.69%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	507,913,222,000	501,682,277,000	501,889,284,000	524,888,502,000	535,658,048,000	1.55%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	210,184,455,318	181,968,819,389	192,695,295,931	220,914,062,329	249,013,348,000	5.79%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79,207,695,511	153,179,196,540	161,366,566,262	178,844,409,216	123,211,373,300	7.94%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4,247,294,289	18,084,129,959	30,515,600,000	33,699,978,725	4,400,000,000	7.36%
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36,193,537,622	37,301,045,581	38,096,135,262	47,598,137,491	44,967,294,300	7.00%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,357,315,000	96,844,021,000	60,749,031,000	97,546,293,000	73,844,079,000	10.70%
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,409,548,600	950,000,000	32,005,800,000	-	-	117.95%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Dilihat dari perkembangan nilai pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 877.484.682.061 milyar di tahun 2016 menjadi 1.031.026.154.667 triliyun di tahun 2020, atau mengalami kenaikan sebesar 153,541,472,606 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 3,90 %. Pendapatan daerah disumbangkan dari kenaikan pendapatan asli daerah 47,907,505,393 milyar dengan pertumbuhan sebesar 9,63%, kenaikan dana perimbangan 61,630,289,425 milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,57% dan kenaikan lain lain pendapatan daerah yang sah 44,003,677,789 milyar dengan pertumbuhan sebesar 7,94%.

**Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2019**

Kode Rek	Uraian	2017	2018	2019
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>97.15</b>	<b>98.87</b>	<b>96.37</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>91.58</b>	<b>105.92</b>	<b>78.75</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	77.54	139.68	68.68
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	72.49	70.03	54.21
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	74.54	82.29	77.35
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.60	96.64	85.62
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>97.49</b>	<b>98.64</b>	<b>97.85</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.82	71.19	81.99
4.2.2	Dana Alokasi Umum	100.00	100.00	100.44
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	95.09	97.41	94.65
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99.44</b>	<b>98.06</b>	<b>99.82</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	105.14	98.96	109.89
4.3.2	Dana Darurat			0.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.54	99.77	97.34
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100.00	100.00	100.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100.00	0.00	0.00

Sumber : LRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya berbagai edisi

Selama periode tahun anggaran 2016–2019, realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan berfluktuatif dari tahun ke tahun, di tahun 2016 pada angka 91,69 dan 2017 menjadi 97,15, tahun 2018 angka ini meningkat cukup tinggi 98,87 dan tahun 2019 pada angka 96,37 namun hal ini belum diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal terlihat dari masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yaitu dari 6,48% di tahun 2016 sempat naik menjadi 10,43 persen di tahun 2017 angka ini kembali turun hingga 7,74 di tahun 2019 selanjutnya meningkat hingga 10,16 % di tahun 2020, pada dana perimbangan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 84,49 persen di tahun 2016, menjadi 77,89 persen di tahun 2020. Perubahan kontribusi ini lebih dominan disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam pendapatan ini termasuk dana desa yang berasal dari pusat yang dianggarkan untuk 52 nagari. Kontribusi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya selama tahun anggaran 2016-2020 ditunjukkan pada tabel 3.7 dibawah :

**Tabel 3.6 Kontribusi Pendapatan Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2020**

Kode Rek	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD Awal
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10.43</b>	<b>8.32</b>	<b>7.74</b>	<b>10.16</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	1.57	2.18	1.88	2.72
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	0.44	0.40	0.30	0.52
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.40	0.40	0.35	0.45
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.01	5.34	5.21	6.47
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>73.43</b>	<b>74.92</b>	<b>74.72</b>	<b>77.89</b>
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.40	2.79	1.55	1.78
422	Dana Alokasi Umum	52.86	52.12	51.49	51.95
423	Dana Alokasi Khusus	19.17	20.01	21.67	24.15
<b>43</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.14</b>	<b>16.76</b>	<b>17.54</b>	<b>11.95</b>
431	Pendapatan Hibah	1.91	3.17	3.31	0.43
432	Dana Darurat	-	-	-	-
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3.93	3.96	4.67	4.36
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.20	6.31	9.57	7.16
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.10	3.32	-	-

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020

Pandemi COVID-19 tahun 2020 diperkirakan berdampak pada penurunan dalam pencapaian pendapatan daerah tahun anggaran 2020 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan seperti dilihat dari tabel 3.7 dibawah ini :

**Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020**

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal	Proyeksi Covid
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>949.023.480.859</b>	<b>962.862.866.327</b>	<b>1.019.358.071.248</b>	<b>1.031.026.154.667</b>	<b>987.308.413.127</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>98.937.393.388</b>	<b>80.085.859.652</b>	<b>78.882.919.152</b>	<b>104.794.164.000</b>	<b>82.888.244.907</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	14.933.091.579	20.945.543.535	19.178.964.230	28.095.401.000	17.887.500.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	4.186.557.034	3.869.348.325	3.054.849.682	5.351.178.000	3.310.782.400
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.834.414.130	3.860.967.792	3.590.314.080	4.641.438.000	4.073.610.034
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.983.330.645	51.410.000.000	53.058.791.161	66.706.147.000	57.616.352.473

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal	Proyeksi Covid
4.2.	DANA PERIMBANGAN	696.906.890.931	721.410.440.413	761.630.742.880	803.020.617.367	741.338.362.920
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.255.794.542	26.825.860.482	15.828.178.551	18.349.221.367	20.208.713.920
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	524.888.502.000	535.658.048.000	482.461.174.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	181.968.819.389	192.695.295.931	220.914.062.329	249.013.348.000	238.668.475.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	153.179.196.540	161.366.566.262	178.844.409.216	123.211.373.300	163.081.805.300
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.084.129.959	30.515.600.000	33.699.978.725	4.400.000.000	1.500.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.301.045.581	38.096.135.262	47.598.137.491	44.967.294.300	44.967.294.300
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.844.021.000	60.749.031.000	97.546.293.000	73.844.079.000	116.614.511.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950.000.000	32.005.800.000	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Maka ditahun 2021 pendapatan daerah kabupaten Dharmasraya di proyeksikan sebesar.

**Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021  
Kabupaten Dharmasraya**

Kode Akun					Uraian Akun	APBD Awal 2020	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
-1					-2	-3	-4	-5
4					PENDAPATAN DAERAH	1,031,026,154,667.00	987,308,413,127.00	985,777,140,020.00
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104,794,164,000.00	82,888,244,907.00	96,262,716,800.00
4	1	1			Pajak Daerah	28,095,401,000.00	17,887,500,000.00	29,941,716,800.00
4	1	2			Retribusi Daerah	5,351,178,000.00	3,310,782,400.00	2,651,000,000.00
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,641,438,000.00	4,073,610,034.00	4,100,000,000.00
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	66,706,147,000.00	57,616,352,473.00	59,570,000,000.00
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	921,831,990,667.00	857,063,323,220.00	857,063,323,220.00
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	876,864,696,367.00	812,096,028,920.00	812,096,028,920.00
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	44,967,294,300.00	44,967,294,300.00	44,967,294,300.00

Kode Akun				Uraian Akun	APBD Awal 2020	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
4	3			<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4,400,000,000.00</b>	<b>47,356,845,000.00</b>	<b>32,451,100,000.00</b>
4	3	1		Pendapatan Hibah	4,400,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
4	3	2		Dana Darurat		-	-
4	3	3		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		45,856,845,000.00	30,951,100,000.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari : Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Kebijakan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi dan Inventarisasi sumber sumber Pendapatan Daerah.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

##### A. Kebijakan Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk

- mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
  - 7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- Kebijakan tersebut antar lain :
1. Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
  2. Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;
- C. Lain-lain PAD Yang Sah:
- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima:
- 1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan,

rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

- 2) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pengalokasian besaran masing-masing sumber pendanaan tersebut akan dijelaskan nantinya melalui Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2020.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Akurasi dan Validasi Data teknis pada: DBH, DAU dan DAK non fisik sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam Dana Perimbangan;
- b. Penyelarasan kebijakan daerah dengan Nasional melalui Pengusulan DAK Fisik sesuai dengan Prioritas Nasional;
- c. Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat;
- d. Peningkatan Kualitas pelaporan dan penyampaian tepat waktu

### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah sesuai Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang



memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai, yang meliputi:

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah,

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

c. Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2021 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2021 tidak dialokasikan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2021, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

D. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa  
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol  
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi tahun sebelumnya serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun berjalan dan tahun rencana, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020**

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal
5.	BELANJA DAERAH	935.591.361.565	964.654.491.196	1.036.553.410.711	1.102.724.680.352
5.1.	belanja tidak langsung	424.581.618.937	480.174.173.841	519.184.535.120	590.043.907.033
5.1.1.	belanja pegawai	316.349.165.221	361.068.202.766	383.764.182.714	427.605.641.033
5.1.2.	belanja bunga	-	-	-	-

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal
5.1.3.	belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	belanja hibah	5.621.217.579	10.894.200.000	12.357.501.489	42.459.000.000
5.1.5.	belanja bantuan sosial	184.000.000	250.000.000	3.132.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	846.609.246	1.367.000.000	3.170.650.000	3.344.652.000
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	101.202.853.891	105.094.771.075	116.736.023.992	111.934.614.000
5.1.8.	belanja tidak terduga	377.773.000	1.500.000.000	24.176.925	1.500.000.000
5.2.	belanja langsung	511.009.742.628	484.480.317.355	517.368.875.591	512.680.773.319
5.2.1.	belanja pegawai	481.418.000	781.620.000	46.376.909.869	48.066.620.000
5.2.2.	belanja barang dan jasa	240.093.762.321	255.739.788.119	242.274.872.344	208.147.033.695
5.2.3.	belanja modal	270.434.562.307	227.958.909.236	228.717.093.378	256.467.119.624

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya 2020

**Tabel 4.0 Kontribusi Jenis Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2020**

Kode Rek	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD Awal
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
51	belanja tidak langsung	45.38	49.78	50.09	53.51
511	belanja pegawai	33.81	37.43	37.02	38.78
512	belanja bunga				
513	belanja subsidi				
514	belanja hibah	0.60	1.13	1.19	3.85
515	belanja bantuan sosial	0.02	0.03	0.30	0.29
516	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0.09	0.14	0.31	0.30
517	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	10.82	10.89	11.26	10.15
518	belanja tidak terduga	0.04	0.16	0.00	0.14
52	belanja langsung	54.62	50.22	49.91	46.49
521	belanja pegawai	0.05	0.08	4.47	4.36
522	belanja barang dan jasa	25.66	26.51	23.37	18.88
523	belanja modal	28.91	23.63	22.07	23.26

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya 2020

Sesuai Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, proyeksi belanja daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

Kode Akun					Uraian Akun	2021
(1)					(2)	(3)
5					<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>729.623.649.020</b>
5	1				<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>516.046.952.725</b>
5	1	01			Belanja Pegawai	373.922.797.450
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	138.024.155.275
5	1	03			Belanja Bunga	0
5	1	04			Belanja Subsidi	0
5	1	05			Belanja Hibah	3.900.000.000
5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	200.000.000
5	2				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>98.300.846.295</b>
5	2	01			Belanja Modal Tanah	0
5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.235.498.704
5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.675.946.000
5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.000.000.000
5	2	05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.389.401.591
5	3				<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000</b>
5	3	01			Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000
5	4				<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>112.775.850.000</b>
5	4	01			Belanja Bagi Hasil	2.303.200.000
5	4	02			Belanja Bantuan Keuangan	110.472.650.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya 2020

Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja operasi pada belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.
2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun kelima, program prioritas tahun 2020 dan kegiatan prioritas sesuai dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Dukungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2021;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dari total belanja.
5. Pengalokasian belanja bersifat khusus berdasarkan pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja-belanja tertentu diantaranya :
  - Pengalokasian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota,
  - Pengalokasian bantuan keuangan kabupaten ke pemerintahan desa,
  - Pengalokasian belanja bantuan kepada partai politik
  - kegiatan yang berasal dari pendanaan bagi hasil dan DAK;
6. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
7. Lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai.

## Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham) dan sisa lebih perhitungan.

**Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021**

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>18.215.305.576</b>	<b>30.647.424.869</b>	<b>21.088.791.076</b>	<b>71.698.525.685</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>21.931.305.576</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>23.588.791.076</b>	<b>73.198.525.685</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.931.305.576	31.647.424.869	23.588.791.076	73.198.525.685
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>3.716.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3.716.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran 2020, maka diasumsikan tidak adanya pembiayaan daerah. Dilihat dari sisi penerimaan pembiayaan, maka dengan melihat struktur dan besaran APBD tahun 2020 maka diasumsikan secara cermat tidak adanya SILPA selama tahun 2020, dan apabila akan terjadi SILPA maka nilainya tidak terlalu signifikan terhadap APBD tahun 2021.

Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yang tidak dialokasikan untuk tahun 2021, belum mampunya pemerintah untuk penyertaan modal karena APBD tahun 2021 masih diarahkan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

Kode Akun					Uraian Akun	2021
(1)					(2)	(3)
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	0
6	1	02			Pencairan Dana Cadangan	0
6	1	03			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6	1	04			Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6	2				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan	0
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	0
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo	0
6	2	04			Pemberian Pinjaman Daerah	0
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0
					<b>SILPA</b>	<b>0</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari realisasi tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun 2021 tahun rencana sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021**

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	awal
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>949.023.480.859</b>	<b>962.862.866.327</b>	<b>1.019.358.071.248</b>	<b>1.031.026.154.667</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>98.937.393.388</b>	<b>80.085.859.652</b>	<b>78.882.919.152</b>	<b>104.794.164.000</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah <sup>1)</sup>	14.933.091.579	20.945.543.535	19.178.964.230	28.095.401.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah <sup>1)</sup>	4.186.557.034	3.869.348.325	3.054.849.682	5.351.178.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.834.414.130	3.860.967.792	3.590.314.080	4.641.438.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.983.330.645	51.410.000.000	53.058.791.161	66.706.147.000
4.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>696.906.890.931</b>	<b>721.410.440.413</b>	<b>761.630.742.880</b>	<b>803.020.617.367</b>

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	awal
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.255.794.542	26.825.860.482	15.828.178.551	18.349.221.367
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	524.888.502.000	535.658.048.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	181.968.819.389	192.695.295.931	220.914.062.329	249.013.348.000
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>153.179.196.540</b>	<b>161.366.566.262</b>	<b>178.844.409.216</b>	<b>123.211.373.300</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.084.129.959	30.515.600.000	33.699.978.725	4.400.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.301.045.581	38.096.135.262	47.598.137.491	44.967.294.300
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.844.021.000	60.749.031.000	97.546.293.000	73.844.079.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950.000.000	32.005.800.000	-	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>935.591.361.565</b>	<b>964.654.491.196</b>	<b>1.036.553.410.711</b>	<b>1.102.724.680.352</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>424.581.618.937</b>	<b>480.174.173.841</b>	<b>519.184.535.120</b>	<b>590.043.907.033</b>
5.1.1.	belanja pegawai	316.349.165.221	361.068.202.766	383.764.182.714	427.605.641.033
5.1.2.	belanja bunga	-	-	-	-
5.1.3.	belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	belanja hibah	5.621.217.579	10.894.200.000	12.357.501.489	42.459.000.000
5.1.5.	belanja bantuan sosial	184.000.000	250.000.000	3.132.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	846.609.246	1.367.000.000	3.170.650.000	3.344.652.000
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	101.202.853.891	105.094.771.075	116.736.023.992	111.934.614.000
5.1.8.	belanja tidak terduga	377.773.000	1.500.000.000	24.176.925	1.500.000.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>511.009.742.628</b>	<b>484.480.317.355</b>	<b>517.368.875.591</b>	<b>512.680.773.319</b>
5.2.1.	belanja pegawai	481.418.000	781.620.000	46.376.909.869	48.066.620.000
5.2.2.	belanja barang dan jasa	240.093.762.321	255.739.788.119	242.274.872.344	208.147.033.695
5.2.3.	belanja modal	270.434.562.307	227.958.909.236	228.717.093.378	256.467.119.624
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>13.432.119.294</b>	<b>-1.791.624.869</b>	<b>-17.195.339.463</b>	<b>-71.698.525.685</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>18.215.305.576</b>	<b>30.647.424.869</b>	<b>21.088.791.076</b>	<b>71.698.525.685</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>21.931.305.576</b>	<b>31.647.424.869</b>	<b>23.588.791.076</b>	<b>73.198.525.685</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.931.305.576	31.647.424.869	23.588.791.076	73.198.525.685
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>3.716.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3.716.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-



Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	awal
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	31.647.424.869	28.855.800.000	3.893.451.613	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2020

Lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari realisasi tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun 2021 tahun rencana sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

Kode Akun					Uraian Akun	2021
-1					-2	-3
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>747,108,665,020.00</b>
4	1				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>96,262,716,800.00</b>
4	1	1			Pajak Daerah	29,941,716,800.00
4	1	2			Retribusi Daerah	2,651,000,000.00
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,100,000,000.00
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	59,570,000,000.00
4	2				<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>618,394,848,220.00</b>
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	573,427,553,920.00
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	44,967,294,300.00
4	3				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>32,451,100,000.00</b>
4	3	1			Pendapatan Hibah	1,500,000,000.00
4	3	2			Dana Darurat	-
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30,951,100,000.00
5					<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>729.623.649.020</b>
5	1				<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>516.046.952.725</b>
5	1	1			Belanja Pegawai	373.922.797.450
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	138.024.155.275
5	1	3			Belanja Bunga	0
5	1	4			Belanja Subsidi	0
5	1	5			Belanja Hibah	3.900.000.000
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial	200.000.000
5	2				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>98.300.846.295</b>
5	2	1			Belanja Modal Tanah	0
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.235.498.704
5	2	3			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.675.946.000
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.000.000.000
5	2	5			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.389.401.591
5	3				<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000</b>
5	3	1			Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000
5	4				<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>112.775.850.000</b>
5	4	1			Belanja Bagi Hasil	2.303.200.000

Kode Akun					Uraian Akun	2021
-1					-2	-3
5	4	2			Belanja Bantuan Keuangan	110.472.650.000
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	0
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan	0
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6	1	4			Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6	1	5			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6	1	6			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6	2				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	0
6	2	2			Penyertaan Modal Daerah	0
6	2	3			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo	0
6	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah	0
6	2	5			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0
					<b>SILPA</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Penyusunan RKPD tahun 2021 merupakan periode akhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2016-2021. Tahun depan merupakan masa transisi dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti untuk periode 2021-2025 atau merupakan perencanaan pembangunan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 – 2025;
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019
2. Penyesuaian muatan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang menjadi pedoman terhadap penyusunan RKPD Tahun 2021;
3. Mempedomani RKP Tahun 2021 serta melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam penyusunan RKPD 2021, dan melakukan program pemulihan (recovery) pasca Covid-19. dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman penyelarasan sasaran;
4. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 pada rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021;
5. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
7. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021;
- (4) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

<b>“MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA”</b>
---

Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 adalah :

1. Pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Pandemi Covid-19
2. Transpormasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan dengan transpormasi dari perekonomian berbasis pertanian ke arah hilirisasi industri untuk mengolah SDA pertanian dan perkebunan (agroindustry)
3. Gaji tunggal/single sallary yang merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengganti sistem penggajian dan tunjangan PNS tentang Sistem Gaji dan Tunjangan untuk PNS.
4. Pemilihan kepala daerah.
5. Peremajaan perkebunan kelapa sawit masyarakat (Replanting)
6. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Pada tahun 2021 pemerintah memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat Covid-19. Terdapat empat sektor yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021 yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta sasaran ekonomi cukup tajam. Selain itu, pembiayaan pembangunan terpaksa dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Pemulihan ekonomi usai Covid-19 menjadi bagian dalam rancangan kerja pemerintah (RKP) 2021.

RKP 2021 memuat tujuh prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2021 yakni :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
3. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan berdaya saing
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. dan
7. Stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP 2021.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, di tetapkan 2 Skenario khusus penanganan Covid-19 yaitu :

1. Skenario pertama kalau Covid-19 ini masih berlanjut, maka fokus kita tetap pada penanganan Covid.

Dalam skenario pertama, pemerintah fokus mencegah penyebaran virus corona, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas kesehatan dan sistemnya, memperkuat ketahanan pangan.

Kemudian mengembangkan industri alat kesehatan, mendukung *social safety net*, bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit, dan menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup. Ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya, tidak mati sama sekali.

2. Skenario kedua, jika Covid-19 tetap berlangsung pada 2021, maka pemerintah memprioritaskan program yang mendesak bagi skala nasional maupun tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri yang tidak bisa ditunda.

Namun jika wabah tersebut berakhir tahun ini, fokus pemerintah pada 2021 adalah pemulihan ekonomi dan sektor-sektor yang memajukan

kesejahteraan rakyat, dan tetap melanjutkan visi-misi RPJMN Tahun 2020-2024.

Sebelumnya, ada lima program pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Namun, program tersebut harus terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Lima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, dan transformasi ekonomi.

Adapun tema pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

##### **"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:



**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Sumatera Barat**

<b>VISI</b> <b>Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 1:</b>  Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekati)
		4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat	5. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat
<b>Misi 2:</b>  Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
		2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
<b>Misi 3:</b>	1. Meningkatkan sumberdaya manusia	1. Meningkatnya tingkat pendidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	2. Meningkatnya integritas peserta didik
	2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja
		5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	6. Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
		8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
		9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga
		10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
		11. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis	2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan

MISI	TUJUAN	SASARAN
regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	dan meningkatkan kesejahteraan petani	3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
		4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman
	4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin
		8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		9. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
		10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
		2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
		3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		5. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
		6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
	3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	10. Berkurangnya resiko bencana
		11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan

MISI	TUJUAN	SASARAN
		pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	12. Terpeliharanya debit sungai 13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, dan berkualitas tinggi”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah”** terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **"Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan"** terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dan penetapan Tema RKP Tahun 2021 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

**"Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi, Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah".**

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya**

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya **'Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya'**. Makna dari visi ini adalah :

##### **Mandiri :**

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

##### **Berbudaya :**

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Berdasarkan ketujuh misi tersebut, keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan visi disajikan dalam Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dalam RPJMD**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021**

<b>VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan
		4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat
	2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan
		2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel
		3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan
		5. Meningkatnya tingkat pendidikan

<b>VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
	3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja
		2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari
	4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.
		2. Revitalisasi los kios pasar nagari
	2. Membangun ruang publik untuk masyarakat	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk
		2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten
	3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat	1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran
		2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar
	4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan
	5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan
		2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
		3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
		2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
		3. Meningkatkan produksi perikanan
		4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
	2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian

<b>VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
		2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian
		3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat
	3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri
	4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial
	2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
	3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis
	4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan
	5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari
	6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi
	2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur
		2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan
		2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi
	4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan



<b>VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	1. Membangun BUM Nagari	Adanya BUMNagari
	2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kehidupan beragama
	2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	2. Meningkatkan peran adat
		1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya
		2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya

Sumber : Lampiran Perda No.4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

## 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode kelima pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
4. Penyesuaian muatan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang menjadi pedoman terhadap penyusunan RKPD Tahun 2021

### 4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu tema RKP 2021 adalah **"MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL"** yang adaptif dan responsif sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19, dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara.

Sesuai dengan kondisi yang ada bahwa Tema RKP 2021 mengalami penyesuaian. Tema RKP 2021 sebelum Pandemi Covid 19: "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 telah disepakati 7 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

#### 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
- 2) Memajukan kebudayaan,
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- 5) Meningkatkan budaya literasi

#### 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

## 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

#### **5.2.1. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang didukung dengan memperkuat pengembangan hilirisasi pertanian, kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi serta pariwisata.

Tahun 2021 merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

nasional. (1) Pembangunan Manusia; (2) Penguatan Konektivitas; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021</b>	<b>Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021</b>
1.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3.	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5.	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6.	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7.	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8.	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9.	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2021	Keterangan
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Prioritas 5
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Prioritas 7
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Prioritas 3
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Prioritas 1
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Prioritas 6
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut:

## **1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian:

1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat

## **2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan**

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:



1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

### **3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan**

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya integritas peserta didik
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

#### **4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

#### **5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan

2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
3. Meningkat-nya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

#### **6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

#### **7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

#### **8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan

tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

## **9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi di bidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

## **10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
4. Berkurangnya resiko bencana
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
6. Terpeliharanya debit sungai
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

#### **4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

Kebijakan Pemerintah pusat yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal (berhasil) dan tepat sasaran. Kebijakan ini diimplementasikan dengan cara mengarahkan anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas.

Selain hal tersebut diatas hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD 2021 yakni:

1. Melakukan Reformulasi target kinerja pemerintah daerah akibat dampak pandemi Covid-19.
2. Menetapkan Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan paska pandemi Covid-19.
3. Meningkatkan ketahanan pangan.
4. Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
5. Menetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya.
6. Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial.
7. Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun RKPD Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan yang juga mempedomani prioritas pembangunan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan pokok, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang holistik (menyeluruh),

tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas).

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya serta isu strategis Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah.

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari
3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan infrastruktur
5. Memajukan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan *sustainable development*)

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dapat dijadikan delapan prioritas pembangunan (hastha utama) diwujudkan selama 5 tahun secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran.

Mengingat kondisi yang terjadi saat ini, maka terdapat 2 (dua) skenario pembangunan dalam RKPD 2021 yaitu :

Skenario pertama, apabila Covid-19 berakhir tahun 2020. Maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah :

1. Memperhatikan dan melakukan sinkronisasi serta berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (5 Arah Prioritas Presiden), dan Rancangan RKP 2021 dan Perda RPJMD yang berlaku.
2. Mempedomani RKP Tahun 2021 serta melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam penyusunan RKPD 2021, dan melakukan program pemulihan (recovery) pasca Covid-19.
3. Mengacu pada hasil pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mencapai target pembangunan Nasional.
4. Penyusunan RKPD 2021 berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah.

5. Penyusunan RKPD dan APBD menggunakan SIPD dan memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah.

Kemudian, Skenario kedua, apabila Covid-19 masih berlanjut hingga 2021, maka yang dilakukan adalah, Melanjutkan dan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19 dengan Fokus:

1. Kesehatan;
2. Dampak ekonomi; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.
4. Program-program mendesak lainnya di daerah.
5. Program-program strategis nasional

Dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan tema pembangunan setiap tahun periode 2021 adalah :

**"MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS SDM DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH"**

Penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) di Kabupaten Dharmasraya memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Refocusing dan realokasi anggaran 2020 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, investasi, kesehatan dan infrastruktur.

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 diarahkan pada proses pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus Covid-19.

Berdasarkan kondisi tersebut maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yaitu

## **“PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGUATAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”**

Sementara prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1)Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2)Urgensitas penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 pada tahun ke-5. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2011-2021</b>	<b>Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021</b>
1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah	Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah
2.	Membangun berbasis nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3.	Membangkitkan identitas daerah	Peningkatan Kualitas Pendidikan
4.	Memeratakan infrastruktur	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi
5.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan
6.	Meningkatkan derajat kesehatan	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari



No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2011-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
8.	Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan sustainable development)	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana

Penyelarasan antara prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021, Prioritas Provinsi Tahun 2021 dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah**

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2021	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2021
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 5)	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari (Prioritas 6)
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan (Prioritas 7)	
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 8)	
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 3)	Peningkatan Kualitas Pendidikan (Prioritas 3)
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 4)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Prioritas 2)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat (Prioritas 1)	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah (Prioritas 6)
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur (Prioritas 9)	Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah (Prioritas 1)
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi (Prioritas 6)	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi (Prioritas 4)

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2021	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2021
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (Prioritas 10)	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana (Prioritas 8)
7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan (Prioritas 2)	Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan (Prioritas 5)

#### 4.2.3. Kebijakan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 memberikan dampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Secara makro, kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi cukup besar pada ekonomi Kabupaten Dharmasraya seperti industri pengolahan, dan perdagangan. Pandemi ini juga berdampak pada terhambatnya investasi di Kabupaten Dharmasraya yang juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya.

Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat, bahkan diprediksikan akan muncul penduduk miskin baru, dan pengangguran baru. Kondisi ini juga dapat memberikan dampak pada tingkat kondusivitas wilayah, dimana mulai diindikasikan adanya peningkatan kasus-kasus kriminalitas di masyarakat.

Hal tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menyusun kembali kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan dinamika pandemi ini. Kebijakan pembangunan daerah sampai ke penganggaran di tahun 2020 telah dilakukan perubahan yang difokuskan pada penanganan darurat pandemi ini melalui mekanisme refocussing kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.

Adanya pandemi Covid-19 sejak dari triwulan I 2020 berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, baik secara level nasional maupun untuk

Sumatera Barat bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten/Kota.

Jika pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan IV secara nasional sebesar 4,97% (yoy), dan di Sumatera Barat sebesar 5,13% di tahun 2019, namun memasuki triwulan I tahun 2020 angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 2,97% secara nasional dan 3,92% untuk Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, pandemi ini diprediksi akan berakhir di Indonesia antara Bulan Juli – September 2020. Dengan asumsi bahwa pandemi ini akan berakhir di tahun 2020, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 fokus pada upaya pemulihan akibat pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi kemungkinan belum berakhirnya kasus Covid-19, terutama pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan hankamtibmas.

Kebijakan pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19 difokuskan pada dua hal yaitu :

- 1) secara makro adalah pemulihan kondisi perekonomian daerah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif; dan
- 2) secara mikro adalah pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 ini seperti pelaku UMKM, penduduk miskin dan rentan miskin, penganggur, dan lainnya.

Kebijakan ini tetap didukung dengan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, tetap menjaga kondusivitas wilayah, serta tetap membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pondasi pengarusutamaan pembangunan daerah.

Adanya pertimbangan asumsi dampak pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat selesai di akhir tahun 2020 dan skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 merupakan bagian penting dalam Kerangka Ekonomi Makro RKP 2021. Arah kebijakan pembangunan pemerintah adalah melihat tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound. Selain kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi Covid- 19, maka perlu kerja keras dalam percepatan pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19.

Sesuai dengan Tema RKP 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan pertimbangan mitigasi Covid-19 mengingat saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, terberat sejak krisis finansial Asia 1998/1999. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir di semua negara di seluruh dunia dan secara

global terus fokus mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Untuk itu, langkah-langkah strategis secara nasional dituangkan di dalam RKP 2021 berkaitan dengan upaya menjawab tantangan yang dihadapi khususnya dampak yang besar terhadap pembangunan nasional yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis tersebut disusun untuk mengembalikan arah pembangunan sesuai dengan target sasaran RPJMN 2020-2024 dengan melakukan koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan tentunya berpengaruh di tahun 2021.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian daerah antara lain mendorong peningkatan pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi daerah Kabupaten Dharmasraya seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan perdagangan, mendorong kembali investasi untuk masuk ke Kabupaten Dharmasraya, mendorong ekspor dan substitusi impor, serta melakukan pemberdayaan ekonomi terutama bagi pelaku UKM/IKM, dengan tetap melakukan pengendalian inflasi. Ekonomi juga akan tumbuh dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung dalam upaya meningkatkan distribusi barang dan jasa ekonomi.

Intervensi kebijakan pada jangka pendek antara lain meliputi penyelamatan UMKM, penyediaan lapangan kerja di desa dan menjaga ketahanan UMKM dan pangan. Sedangkan jangka menengah – panjang pada pemulihan dan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kapasitas ekonomi kreatif. Pada intervensi kebijakan jangka pendek, di dalamnya meliputi program/kegiatan bansos, relaksasi kredit, pemberian kredit jangka pendek, penyediaan lapangan kerja, padat karya, peningkatan SDM, pendampingan industri, bantuan pangan, bantuan stimulan (pakan ternak, benih/bibit, alsintan, alat tangkap, BBM nelayan, asuransi petani dan nelayan). Sedangkan intervensi kebijakan jangka panjang antara lain dengan program/kegiatan pemberian akses modal, kemitraan usaha, pemulihan citra pariwisata, capacity building, pelatihan dan stimulan alat paska panen, pengolahan hasil, peningkatan produksi, mendorong ekspor dan substitusi impor, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kampung/desa kreatif, pembiayaan, pemasaran dan perlindungan produk ekraf.

Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan membangkitkan perekonomian pedesaan dan UMKM melalui pemetaan berbagai potensi desa berdasarkan pada klaster UMKM (bidang usaha, tenaga kerja, dan bahan baku), pemulihan pasar lokal, mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM, kemudahan akses permodalan (tanpa bunga),

bantuan sarana produksi, subsidi energi, memperkuat kemitraan dengan perusahaan besar, serta pendampingan melibatkan akademisi dan penyuluh. Dalam penciptaan lapangan kerja untuk mengantisipasi tenaga kerja migran (termasuk yang di PHK) dan telah memiliki keterampilan tertentu maka perlu dilakukan pemanfaatan informasi kartu pra kerja, updating tenaga kerja, pelatihan melalui BLK dan kerjasama kampus, pendampingan pencari kerja, padat karya terutama di desa, serta pemulihan dan kekuatan UMKM.

Strategi pada pemulihan ekonomi memerlukan kombinasi kebijakan dengan pemerintah pusat untuk membangkitkan industri padat karya, dengan pemberian insentif super tax deduction, mempermudah izin investasi, insentif air tanah, dan bunga murah khususnya pada industri seperti industri makanan dan minuman, hotel dan restoran, industri kimia dan obat-obatan, industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan furniture. Di sisi lain produktivitas pada sektor primer (pertanian dalam arti luas) harus tetap dijaga supaya berjalan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga distribusi dan ketersediaan kebutuhan pangan melalui peningkatan ketahanan pangan dalam rangka penyediaan bahan pangan serta menjaga psikologi masyarakat akan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan harga/inflasi serta mengurangi mobilitas warga keluar dari wilayahnya.

Selanjutnya untuk mendukung upaya pemulihan tersebut di atas melalui kekuatan Koperasi dan UMKM berbasis kewilayahan serta potensi lokal yang tepat kebijakan dan sasaran, perlu kategori pemberian bantuan menjadi 4 yaitu :

- 1) UMKM yang masih memproduksi dan masih mempunyai pasar antara lain dengan menjaga daya saing, relaksasi pajak, info pasar, menjembatani hubungan tenaga kerja dan UMKM, memperluas kemitraan;
- 2) UMKM yang masih memproduksi, namun pasar terkendala antara lain dengan pasar alternatif, media online;
- 3) UMKM tidak memproduksi, namun mempunyai potensi pasar perlu akses investasi;
- 4) UMKM tidak memproduksi, dan tidak ada pasar difasilitasi dengan bansos.

Sementara strategi yang dapat dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain dengan 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, rumah layak, dan akses KB; 2) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan keperantaraan pelaku usaha kecil, dan keperantaraan akses pasar, modal, bahan baku, digital platform, dan

pelatihan/inkubasi, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat dengan padat karya dan job market. Strategi tersebut diperkuat dengan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan health security dan sistem kesehatan daerah, dan sektor pendidikan sebagai bentuk adaptasi model pendidikan pasca pandemi Covid-19 dengan pengembangan sistem pembelajaran dan teknologi.

Kebijakan tersebut didukung dengan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap berbagai perubahan termasuk perubahan akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini lebih mengarah ke perubahan pola kerja birokrasi yang menerapkan pola work from home dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, tetap memperhatikan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

Kebijakan penting lainnya yang mendukung kebijakan pemulihan Covid-19 adalah bagaimana menciptakan wilayah Kabupaten Dharmasraya agar tetap kondusif. Dalam rangka pemantauan dan menjaga kondusivitas wilayah pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor, antara lain deteksi dan cegah dini kejadian konflik sosial, pengamanan distribusi Jaring Pengaman Sosial/JPS (Social Safety Net), pengawasan terhadap pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi bagi anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, serta sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh elemen masyarakat terkait bahaya dan dampak Covid-19 terhadap kondusivitas wilayah.

Kebijakan pemulihan dampak Covid-19 dilakukan dengan berbagai program/kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan lainnya







## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2021 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rekap Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Dharmasraya (Terlampir)**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												74,000,000	0	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												74,000,000	0	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												74,000,000	0	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dok	-	0	30,000,000	0			
1	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												74,000,000	0	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	1 dok	-	0	30,000,000	0			
1	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah						Terlaksananya profil dan data pokok kependidikan	4 Dokumen			44,000,000	0			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												74,000,000	0	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya profil dan data pokok kependidikan	0 Dokumen	-	0	44,000,000	0			
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												232,054,000,000	0	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan ASN (1.898 orang) pembayaran tambahan penghasilan ASN dan insentif guru (1.898 orang)	14 bulan 12 bulan	-	0	232,000,000,000	0			
1	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						Terlaksannanya pelatihan manajemen bantuan operasional sekolah	200 orang			54,000,000	0			
1	01	01	2.03		Administrasi Umum												10,437,587,480	0	
1	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	-	0	30,000,000	0			
1	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah tagihan listrik, Telpn dan Air	12 bulan			175,000,000	0			
1	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah peralatan yang disewa	12 bulan			75,000,000	0			
1	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	1 paket			218,000,000	0			
1	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honor Satu tahun (40 THL, 30 Honor Daerah). Insentif Guru PAUD,SD dan SMP ( 1422 Orang )	12 bulan			8,328,000,000	0			
1	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah K3, Penjaga Malam dan Operator	12 bulan			211,587,480	0			
1	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Infokus, AC dll	133 Unit			55,000,000	0			
1	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Alat tulis kantor	12 bulan			150,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			150,000,000	0	
1	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan			20,000,000	0	
1	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan			19,000,000	0	
1	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas DII	12 bulan			72,000,000	0	
1	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi	12 bulan			300,000,000	0	
1	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya kendaraan operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	12 motor			230,000,000	0	
1	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Tersedianya peralatan gedung dan kantor	1 paket			150,000,000	0	
1	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya membeluer kantor	1 paket			104,000,000	0	
1	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						Terlaksananya Rehap Kantor dan Pembangunan Taman, Lapangan Parkir Kantor Dinas Pendidikan	1 paket			150,000,000	0	
1	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									546,000,000	0		
1	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pelatihan Kompetensi TIK SDM untuk pembelajaran Terlaksananya pelatihan operator sekolah Terlaksanaya pelatihan penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP Terlaksanaya Penilaian Angka Kredit Guru	15 Orang 800 orang 210 orang 200 orang 30 orang	-	0	546,000,000	0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									33,336,200,000	0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									16,476,500,000	0		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru						Jumlah pembangunan RKB SD Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD (DAK)	2 unit 5 unit	-	0	990,000,000	0	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	3 ekspempar			300,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						terlaksananya pembangunan pagar dan paving blok sekolah SD	10 paket			385,000,000	0	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas						Jumlah ruang kelas SD (DAK)	2 unit			400,000,000	0	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah						Jumlah Mobiler SD	1 paket			200,000,000	0	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Tersedianya operasional admintrasi dan PBM SD Se - Kabupaten Dharmasraya	152 SD			12,550,000,000	0	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						Terlaksananya Kegiatan Pra dan UASBN dan UASDA SD/MI	1 kegiatan			300,000,000	0	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah cabang lomba olimpiade SD yang diikuti ; OSN, O2SN, FL2SN Terlaksanananya kegiatan Jambore Penggalang SD dan SMP Terlaksananaya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Matematika SD	3 Kegiatan 1 kegiatan 1 paket			410,000,000	0	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Jumlah Guru (SD) Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional jumlah kepala Sekolah dan Pengawas dilatih (SD) Terlaksananya diklat calon kepala sekolah Terlaksananya Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SD Terlaksananya Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SD	10 orang 15 orang 1 kegiatan 8 orang 100 orang 400 orang			751,500,000	0	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Terlaksana KKG (SD) Terlaksananya Pembinaan UKS Tingkat SD	35 kelompok 2 Sekolah			190,000,000	0	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									8,461,200,000	0		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru						jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP yang di Bangun	2 unit	-	0	350,000,000	0	
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK)	2 unit			300,000,000	0	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium						Jumlah Laboratorium Baru SMP (DAK)	2 ruang			300,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah jamban/toilet yang dibangun (DAK) pembangunan pagar smp	2 unit 1 unit			60,000,000	0	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						Jumlah ruang kelas SMP (DAK)	2 unit			300,000,000	0	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah peralatan labor SMP (DAK)	2 paket			200,000,000	0	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP Se -Kabupaten Dharmasraya	34 SMP			5,100,000,000	0	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						Terlasananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP	1 kegiatan			200,000,000	0	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah cabang lomba olimpiade SMP yang diikuti ; OSN, O2SN, FL2SN  Pelatihan Game dan Robotik bagi siswa  Terlaksananaya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Matematika SLTP  Terlaksananya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	3 kegiatan 200 orang 1 paket 1 Sekolah			600,000,000	0	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Terlaksananya dan terciptanya sekolah model berbasis TIK  Terlaksananya Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)  Terlaksananya Lomba kreatifitas guru (SMP)  Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kopetensi guru B Inggris  Terlaksananya Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SMP  Terlaksananya Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SMP  Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP	300 orang 1 kegiatan 1 peringakat 34 orang 7 orang 100 orang 400 orang			851,200,000	0	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Terlaksananya MGMP (SD)  Terlaksananya pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis ICT  terlaksananya pembinaan UKS Tingkat SMP	15 kelompok 800 orang 2 Sekolah			200,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										7,313,000,000	0	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Jumlah penambahan Ruang guru (DAK) penambahan ruang kelas baru (DAK)	5 ruang 5 unit	-	0	1,000,000,000	0	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sekolah PAUD dibangun Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir PAUD Pagar Sekolah TK	1 Unit 5 Unit 80 Meter			1,040,000,000	0	
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						pembangunan jamban PAUD (DAK)	5 unit			500,000,000	0	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						Terlaksannya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya Tersedianya operasional PAUD Negeri	16 tk 115 orang			4,373,000,000	0	
1	01	02	2.03	12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD						Jumlah APE PAUD dalam (DAK)	30 Paket			300,000,000	0	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						Jumlah guru PAUD akan dilatih Jumlah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUDNI dilombakan	80 Orang 100 Dokumen			60,000,000	0	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						Jumlah Lembaga Pendidikan non Formal yang di Akreditasi Terlaksannya Pembinaan UKS Tingkat TK	10 sekolah 1 Sekolah			40,000,000	0	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										1,085,500,000	0	
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan						Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB (DAK)	2 Dokumen	-	0	500,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP dan Tutor) Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Terlaksananya Penyelengara paket A Setara SD TerlaksananyaPenyelengara paket A Setara SD Terlaksananya Penyelengara paket B Setara SMP Tersedianya Operasional SKB Tersedianya Tutor mobil Pintar	25 orang 1 Kegiatan 30 orang 30 orang 90 siswa 1 Sekolah 2 orang			335,500,000	0	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Dokumen dan data informasi pendidikan non formal	10 dokumen			30,000,000	0	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Pamong Belajar (Guru) yang dilatih Terlaksananya Pelatihan Asesor PNF	1 Orang 3 Orang			45,000,000	0	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Kelompok Pendidikan Keusahaan Mandiri yang dibina Jumlah Lembaga yang akan di Akreditasi Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Monev) Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	6 Kelompok 4 Lembaga 15 lembaga 1 Kegiatan			175,000,000	0	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										156,100,000	0	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										156,100,000	0	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Adanya KTSP SLTP yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	187 sekolah 60 orang	-	0	156,100,000	0	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										206,700,000	0	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										206,700,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					"Terlaksananya Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu"	910 orang	-	0	206,700,000	0		
TOTAL															276,884,587,480	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												252,227,095,781	0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												84,367,485,921	0	
1	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												120,000,000	0	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD, Renja PD dan pelaporan	0 dokumen	-	0	50,000,000	0			
1	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen yang dihasilkan	0 dokumen			70,000,000	0			
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan												72,451,452,921	0	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan PNS (550 orang) pembayaran tambahan pengsilan PNS (550 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	72,378,824,721	0			
1	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	0 persen			72,628,200	0			
1	02	01	2.03		Administrasi Umum												11,760,033,000	0	
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah materai yang tersedia	0 buah	-	0	7,000,000	0			
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah rekening listrik,speedy,telpon dan air yang dibayarkan	0 bulan			147,964,800	0			
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pajak/STNK kendaraan dinas yang diperpanjang/dibayarkan	0 unit			15,600,000	0			
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah honorarium tenaga pengelola kegiatan, keuangan, aset dan pegawai non ASN yang dibayarkan	0 bulan			4,893,138,000	0			
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	0 bulan			1,000,000,000	0			
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	0 jenis			85,954,800	0			
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	0 paket			84,000,000	0			
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	0 jenis			6,000,000	0			
1	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 jenis			15,811,200	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah bahan bacaan	0 paket			5,000,000	0	
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	0 orang			19,656,000	0	
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi	0 tahun			248,400,000	0	
1	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 paket			900,000,000	0	
1	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						pengadaan meubeler dan perlengkapan lainnya	0 paket			3,500,528,200	0	
1	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlag pengadaan peralatan gedung kantor yang dibeli	0 paket			200,000,000	0	
1	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah set mebeleur yang dibeli	0 paket			200,000,000	0	
1	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor (AC, Komputer, Laptop, dll) yang dipelihara	0 unit 0 paket			280,980,000	0	
1	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	0 unit			150,000,000	0	
1	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									36,000,000	0		
1	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pertemuan	0 orang	-	0	36,000,000	0	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									163,180,758,714	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota									73,007,290,443	0		
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun Jumlah pagar yang dibangun Jumlah Polindes / Poskesri /Pustu yang dibangun Jumlah taman yang dibangun	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	-	0	2,200,000,000	0	
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	0 unit			2,181,600,000	0	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit						Jumlah Sarana Rumah sakit yang dibangun	0 paket			26,884,105,832	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi/renovasi pembangunan ruang rawatan, ruang kantor,	0 unit 0 paket			5,312,000,000	0	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	0 unit 0 unit			1,250,000,000	0	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	0 unit			700,000,000	0	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK Jumlah alat rumah sakit yang tersedia Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah yang tersedia Jumlah Logistik rumah sakit yang tersedia Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia	0 Persen 0 paket 0 unit 0 paket 0 unit 0 Paket 0 paket 0 paket			32,024,851,409	0	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin						Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Fornas, DOEN, Kompedium Alkes dan BMHP)	0 Persen			2,454,733,202	0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										88,250,064,371	0	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah pendampingan ibu Hamil,Bersalin dan Nifas Resiko Tinggi oleh kader Jumlah petugas kesehatan yang di review P4K dan kelas ibu hamil Terlaksananya pertemuan pemantapan P4K nagari	0 orang 0 orang 0 orang	-	0	950,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah ANC Berkualitas dan Terintegrasi di Puskesmas Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan ibu bersalin dengan sistim APN Jumlah Petugas Puskesmas Rawatan dan Puskesmas PONED yang dilatih dalam penanganan kasus PONED Persentase kasus kematian ibu dan bayi yang terlacak dan diaudit Terlaksananya penatalaksanaan rawatan bumil, bulin dan bufas	0 orang 0 orang 0 orang 0 persen 0 persen			1,416,424,000	0	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Penatalaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0 bayi			400,000,000	0	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	0 orang			88,000,000	0	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	0 orang			136,000,000	0	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	0 kelompok			62,942,400	0	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu persentase Kabupaten kotya yg melaksanakan kebijakan KTR, minimal 50% sekolah Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM puskesmas persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini katarak	0 nagari 0 % 0 puskesmas 0 %			850,724,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						-Cakupan Penemuan Kausus Kusta Tanpa Cacat Tk II  Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M 0 % 0 orang -Pelayanan Kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV-AIDS) 0 % 0 % -Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC 0 % Persentase Pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV-AIDS			610,874,000	0		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Pelayanan pasien KLB dan KIPI  Persentase penanggulangan kasus-kasus KLB 0 % 0 %			587,000,000	0		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Nagari sadar gizi Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi 0 Nagari Jumlah Penderita Kurang Energi Protein ( KEP ), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kurang zat mikro lainnya. 0 Nagari Persentase pelaksanaan sistim SIJARI EMAS 0 Puskesmas 0 persen			1,390,200,000	0		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah perusahaan/instansi yang dibina Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBTT 0 Perusahaan Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD 0 Puskesmas 0 Puskesmas			318,000,000	0		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment) 0 Dokumen Jumlah kader/tokoh masyarakat dilatih STBM 0 Orang Jumlah laporan 0 Laporan Jumlah sarana air minum yang diawasi 0 Unit Jumlah sekolah yang dibina 0 sekolah			774,786,650	0		
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						Jumlah Sarana yang dibina dalam pengembangan obat tradisional 0 sarana			200,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Petugas Puskesmas dan Bidan Desa mendapat pelatihan SKDR Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB	0 % 0 %			82,672,000	0	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						Cakupan Pencegahan dan pelayanan Napza Persentase kasus jiwa yang tertangani	0 Persen 0 Persen			227,256,000	0	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran Jumlah anak yang melakukan sunatan masal Jumlah kasus yang terjaring Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas Jumlah masyarakat daerah terpencil yang mendapat pelayanan kesehatan gratis Jumlah penderita yang dioperasi Jumlah petugas kesehatan yang dilatih dan dibina program perawatan kesehatan masyarakat dan Keluarga Sehat Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	0 % 0 % 0 orang 0 kasus 0 Puskesmas 0 Persen 0 orang 0 Persen 0 %			1,326,904,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Cakupan Pelaksanaan 1 rumah 1 Jumantik Cakupan Pencegahan dan penegendalian rabies Jumlah petugas yang dilatih dan dibina program kesehatan jiwa Persentase Anak Sekolah dasar yang mendapat imunisasi melalui keg. BIAS Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Persentase Sekolah tersosialisasi program imunisasi Persentase WUS dengan Status T2 + Terlaksananya Fogging Terlaksananya penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	0 % 0 % 0 Puskesmas 0 % 0 % 0 % 0 lokasi 0 puskesmas			927,570,000	0	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah laporan Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase masyarakat mempunyai jaminan kesehatan mandiri	0 Laporan 0 Jiwa 0 Persen			12,595,498,000	0	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah						Jumlah Penderita Napza Yang Terjaring Oleh Puskesmas IPWL	0 Persen			119,000,000	0	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Jumlah Kawasan Sehat yang dibina	0 kawasan			250,000,000	0	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Terpenuhinya operasional PPK BLUD RSUD Sei. Rumbai Terpenuhinya operasional UPT Rumah Sakit	0 unit 0 unit			46,887,360,000	0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						Terpenuhinya operasional PPK BLUD Puskesmas Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas	0 unit 0 unit			15,236,309,876	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1		02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah Persentase jasa pelayanan kesehatan yang termanfaatkan Terpenuhinya operasional UPT IGFK Terpenuhinya operasional UPT Labkesda Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer	0 Puskesmas 0 persen 0 unit 0 unit 0 persen			1,227,553,445	0	
1		02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD)	0 puskesmas			1,584,990,000	0	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									116,403,900	0		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	0 persen	-	0	116,403,900	0	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota									1,807,000,000	0		
1		02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					Jumlah kantor pelayanan kesehatan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008 Jumlah petugas kesehatan mengikuti lomba Nakes teladan, terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten, untuk di ikutkan ke tingkat propinsi dan nasional Jumlah Puskesmas dan RSUD dengan penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	0 puskesmas 0 orang 0 puskesmas 0 puskesmas	- rsud	0	1,807,000,000	0	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									1,178,187,496	0		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota									60,000,000	0		
1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						Persentase tenaga kesehatan/pelaku praktek yang dibina dan diawasi	0 persen	-	0	60,000,000	0	
1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota									471,999,496	0		
1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						Persentase kinerja ASN yang dihasilkan (SKP)	0 persen	-	0	36,999,496	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						Jumlah petugas laboratorium yang mendapatkan Pelatihan/diklat laboratorium kesehatan  Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih dalam pelaksanaan SDIDTK.  Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang MTBM/MTBS  Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang penanganan kasus asfiksia	0 orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang			435,000,000	0	
1	02	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									620,160,000	0		
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan  Jumlah petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan/diklat ATCLS/BTLS/PPGD	0 persen 0 orang	-	0	420,160,000	0	
1	02	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan						Jumlah Bidan yang magang	0 orang			200,000,000	0	
1	02	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									26,028,000	0		
1	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						Terlaksananya pertemuan, pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	0 puskesmas	-	0	26,028,000	0	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									809,233,250	0		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									144,062,000	0		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat , toko alkes dan optikal , usaha mikro obat tradisional (umot)  Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi	0 sarana 0 persen	-	0	31,304,000	0	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						penyediaan dan pengelolaan data timndak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	0 sarana			15,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	0 Orang			97,758,000	0	
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga								400,000,000	0			
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						Jumlah Sarana yang dibina dalam penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT	0 Sarana	-	0	400,000,000	0	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								17,006,800	0			
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan	0 sarana	-	0	17,006,800	0	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								233,164,450	0			
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	0 Orang 0 puskesmas	-	0	233,164,450	0	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								15,000,000	0			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	0 sarana	-	0	15,000,000	0	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								2,691,430,400	0			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								1,038,700,400	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					Jumlah Kader yang terlatih jumlah kawasan tanpa asap rokok jumlah mediapromosi dan informasi Jumlah Rumah Tangga yang disurvey Jumlah sarana dibina tentang pangan dan bahan berbahaya Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	0 Orang 0 kawasan 0 Jenis 0 Rumah 0 sarana 0 kali	-	0	1,038,700,400	0		
1	02	05	2.02		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									385,000,000	0		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Jumlah kecamatan yang melaksanakan Germas persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	0 Kecamatan 0 Persentase	-	0	385,000,000	0		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,267,730,000	0		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskesren yang dibina Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	0 Kelompok 0 nagari 0 Unit 0 Puskesmas	-	0	1,267,730,000	0		
TOTAL															252,227,095,781	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													521,672,021,100	0	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													20,937,544,100	0	
1	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,000,000	0	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan													5,187,103,000	0	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn pembayaran tambahan penghasilan asn (55 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	5,157,103,000	0				
1	03	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan	0 bulan			30,000,000	0				
1	03	01	2.03		Administrasi Umum													15,580,441,100	0	
1	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0	0 0	-	0	5,100,000	0				
1	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0	0 0			465,600,000	0				
1	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						0	0 0			57,600,000	0				
1	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						0	0 0			367,900,000	0				
1	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						0	0 0			25,000,000	0				
1	03	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						0	0 0			11,250,000	0				
1	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						0	0 0			33,819,600	0				
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0	0 0			32,624,000	0				
1	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						0	0 0			4,827,500	0				
1	03	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0	0 0			330,000,000	0				
1	03	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0	0 0			13,487,000	0				
1	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						0	0 0			1,500,000	0				
1	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						0	0 0			23,060,000	0				
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						0	0 0			226,223,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Belanja modal pengadaan Alat Ukur-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Belanja modal pengadaan Buldozer Belanja modal pengadaan Ekskavator Belanja modal pengadaan Truck Trado Belanja modal pengadaan Truk molen Cakupan pengadaan kendaraan operasional teknis	0 paket 0 unit 0 unit 0 unit 0 paket 0 0			8,250,000,000	0	
1	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Cakupan pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/ operasional	0 0			50,000,000	0	
1	03	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						Landscape Kantor Camat Sungai Rumbai (Paving Block dan Batu Baronjong ) Lanjutan Paving Block Halaman Kantor Camat Pagar dan Taman koto besar Pagar Kantor Camat asam jujuhan Pagar Kantor Camat IX Koto Pagar Kantor Camat koto slak Paving Block Gedung/Kantor Paving Blok Kantor Camat Timpeh Pembangunan Paving block dan Rigid Beton halaman Kantor Camat Koto Baru	0 paket 0 Unit 0 paket 0 paket 0 unit 0 meter 0 Unit 0 meter persegi 0 paket			2,815,000,000	0	
1	03	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat	0 paket			2,867,450,000	0	
1	03	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										150,000,000	0	
1	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Pelaksanaan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Paket	-	0	150,000,000	0	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										10,915,477,000	0	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										3,550,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						Normalisasi rawa Pemeliharaanaaan Embung Paket I Pemeliharaanaaan Embung Paket II Pemeliharaanaaan Embung Paket III	0 paket 0 0 0 0 0 0	-	0	700,000,000	0		
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						pembangunan Embung Tabek Rajo Gunung Medan	0 unit			100,000,000	0		
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						Batu Bronjong Jembatan dan Tanah Timbunan Dam Penanggulangan Banjir Jr.Batang Tabek (tebing tinggi) Landscape Taman Sungai Baye Normalisasi Sungai (Paket) Normalisasi Sungai (timpeh) Pembangunan Bangunan Penguat / Penahan Tebing	0 nagari pulau mainan 0 meter 0 unit 0 Paket 0 unit 0 Paket			2,750,000,000	0		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											7,365,477,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						DI. Air Gemuruh DI. Aur Duri Calau DI. Batu Agung DI. Bawah Koto DI. Koto Padang Kec. Koto Baru DI. Mudik Sipotar DI. Sei. Anau Koto Baru DI. Sei. Bungin DI. Sei. Sopan DI. Sungai Alai DI Sungai Duo I Koto Baru DI.Sungai Jernih Macang DI. Tarok Jaya Jaringan irigasi nagari tebing tinggi Jaringan Irigasi Tebing Tinggi Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi "Perbaikan Jaringan Irigasi Kelompok Tani" "Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Calau Sawah Tabek" "Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sijawi-jawi" Saluran Irigasi Saluran Irigasi Koto Baru Saluran Irigasi Sialang Gaung Sawah padang mati	0 paket 0 paket	-	0	7,365,477,000	0	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										4,400,000,000	0	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										4,400,000,000	0	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						"Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Pulau Punjung"	0 0	-	0	50,000,000	0	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan						Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) 2021 Peningkatan / Pembangunan SPAM Perdesaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pamsimas) Sharing Dana Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) 2021	0 paket 0 Paket 0 paket 0 paket			2,850,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan SPAM di Kawasan Perkotaan						Pengembangan sistem pelayanan dan distribusi air minum (Operasional UPT SPAM)	0 tahun			1,500,000,000	0	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									3,619,500,000	0		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									3,619,500,000	0		
1	03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						"Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak" "Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang" Pembangunan Sapras Sanitasi "Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung" "Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung" "Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai" "Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai" "Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak"	0 paket 0 paket 0 Paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket	-	0	3,404,000,000	0	
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						Apraisal Tanah IPLT dan TPA Pengadaan Tanah IPLT dan TPA	0 ls 0 ls			215,500,000	0	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									9,595,000,000	0		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota									9,595,000,000	0		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan						Boxcover dan drainase di belakang TK Permata Bunda Dam Penahan Tanah Pemukiman Nag.Kurnia Selatan Dam Penanggulangan Banjir Jr.Batang Tabek Drainase Kantor Camat Pasangan Batu Kampung Surau Pasang Batu Penahan Badan Jalan Nag.Kurnia Selatan Pembangunan Dam dan Drenase Kawasan Pasar Nagari Pembangunan DAM (Dinding Penahanan tanah Pasar Subgai Rumbai) Pembangunan Draenase Paket X Pembuatan Drainase Induk depan Kantor Wali di Jr.Sungai Sangkir Pembuatan Drainase Induk depan Kantor Wali di Jr.Sungai Sangkir	0 PAKET 0 meter 0 meter 0 meter 0 paket 0 meter 0 meter persegi 0 Paket 0 meter 0 meter	-	0	9,595,000,000	0	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										29,589,500,000	0	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota										29,589,500,000	0	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota						" Aspal Lapen, Jorong Suko Harjo, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang " Aspal Lapen Jr. Rejo Sari Nagari Tiumang Kec. Tiumang " Aspal Lapen menuju Pulau Cinta, Jr. Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak " " DAM Jalan Jorong Marga Makmur, Nag. Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh " Drainase dan Plat Dwiker Jalan Jorong Bukit Bajang ke Lubuk Patin Jalan Lingkar Jorong Koto Kec. Koto Baru Lanjtan Rigit beton Jalan Lingkar Sungai Lukuik Lanjtan Rigit Beton Lingkar Khatib Ismail Lanjutan Jalan RSUD Pulau	0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 METER 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 PAKET 0 PAKET 0 PAKET 0 PAKET 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket	-	0	23,573,000,000	0	

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang									Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	0 paket 0 paket 0 UNIT 0 unit						
											0 unit						
		Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja	0 UNIT		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	0 UNIT						Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target			
										Punjung	0 unit						
										Lanjutan Rigit Beton Jorong	0 paket						
										Tarandam tembus Blok B	0 paket						
										Padang Tarok Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	0 paket						
										Palt Dwiker Ampang kuranji - Siraho	0 paket						
										Palt Dwiker Ampang kuranji - Siraho	0 paket						
										Palt Dwiker Sopan Jaya	0 paket						
										Palt Dwiker Sopan Jaya	0 paket						
										" Pembangunan Jalan Baru Jorong Koto Lamo Nagari Sei Kambut "	0 paket						
										Pembangunan Jalan Jorong Siluluk	0 paket						
										" Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Dinas PU "	0 paket						
										" Pembangunan Jalan Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung "	0 paket						
										Pembangunan Jalan Palo Tabek Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung	0 paket						
										Pembangunan Jembatan Plat Dwiker Sungai Keruh Nag.Amapng Kuranji	0 paket						
										" Pembangunan Plat Duiker dan Saluran Nagari Sungai Dareh "	0 paket						
										Pembangunan Plat Dwiker Nag.Batang Tabek	0 paket						
										Pembangunan Plat Dwiker Nag.Batang Tabek	0 paket						
										Pembangunan Plat Dwiker Nag.Koto Lamo	0 paket						
										Pembangunan Plat Dwiker Nag.Koto Lamo	0 paket						
										Pembanunan Plat Dwiker Jr.Sei Bulian	0 0						
										Pembuatan Plat Dwiker Kantor Nagari Batu Rijal	0 UNIT						
										Pembuatan Plat Dwiker Kantor Nagari Batu Rijal	0 unit						
										Pembuatan Plat Dwiker Nag.Bumi Raya	0 paket						
										Pembuatan Plat Dwiker Nag.Bumi Raya	0 paket						
										Pembukaan dan Pengerasan Jalan Permukiman Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur ( Jorong Kambang Baru	0 paket						

[illegible]

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang						Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021										
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																
											</					

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021										
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perataan Ruang																	
					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
		Kode							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
											Ampang Kuranji "						
											" Pengerasan Jalan Aspal Lapen, Jr. Taman Sari, Nagari Sungai Duo, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung "						
											Pengerasan Jalan, Bukit Batu Basalai koto besar						
											" Pengerasan Jalan dan Drainase Koto Baru "						
											Pengerasan Jalan (Jorong Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai)						
											" Pengerasan Jalan, Jorong Padang Tengah, Nag. Padukuan Koto Salak "						
											" Pengerasan Jalan, Jorong Setia Budi, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak "						
											Pengerasan Jalan Jor. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh						
											Pengerasan Jalan Jr. Kampung Baru (pulau Punjung)						
											Pengerasan Jalan ( Jr. Trimulya I, Nagari Panyubarangan, Kecamatan tempeh)						
											Pengerasan Jalan Koto Lamo Nagari Lubuk Karak Kec. IX Koto						
											Pengerasan Jalan Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung						
											Pengerasan Jalan Nagari Tebing Tinggi						
											Pengerasan Jalan Padang Darek Pulau Punjung						
											Pengerasan jalan Taratak Pulau Punjung						
											Peningkatan Jalan arah Perumnas Taratak Garden(Nagari Siguntur Kec. Sitiung)						
											" Peningkatan jalan Muaro Batang Mongge, Jr. Mongge, Nagari Banai, Kec. Sembilan Koto "						
											Peningkatan Kualitas Jalan Perdesaan						
											Plat Dweker Jorong Sei Kalang Blok E kec.koto baru						
											Plat Dwiker Aur Kuning						

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021							
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang															
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prakiraan Maju (Rp.)
											Plat Dwiker Aur Kuning Plat Dwiker (Jorong Mulya Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh) Plat Dwiker (sawah sarto) Jalan Sitiung - Piruko Utara Rigid Beton Rigid Beton Jalan Lingkar SD N 12 Koto Baru Rigid Beton Jr. 2, Trimulya, Rigid Beton & Pengerasan Jalan Rigit Beton dusun 1 Jr. Tabek Maju Nag. Tabek Rigit Beton Jalan Bukit Bajang Rigit Beton Jalan Jorong Ranah Panjang Kurnia Koto Salak Kec.Sungai Rumbai Rigit Beton Jalan Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi Rigit Beton Jalan MTSN Koto Baru Rigit Beton Jalan Perdesaan Rigit Beton Jorong Lubuk Pering Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru Rigit Beton Jorong Pasa Baru, Nagari Ampalu, Rigit Beton Jorong Ranah Pulau Kec. Pulau Punjung Rigit Beton Jorong Suka Jadi, Nagari Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Rigit Beton Jorong Tabek Jaya, Nagari Tabek, Rigit Beton Jr. Harapan Mulya Nag. Koto Beringin Tiumang Rigit Beton Jr. Koto Agung Nag. Koto Tinggi Rigit Beton Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang Rigit Beton Jr. Sukoharjo Nag. Tiumang Kec. Tiumang Rigit Beton Jr. Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Rigit Beton Mesjid Nurul Islam ke TK Islam Bhakti				

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																	
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perataan Ruang																	
					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
		Kode							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
											Rigit Beton Nagari Tebing Tinggi Rigit Beton Ranah Lintas Kec. Pulau Punjung Rigit Beton SP3 Tiumang Nagari Tiumang Tembok Penahan Tanah Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang						
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota						Pembayaran Rekening Listrik Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	0 0 0 dokumen			6,016,500,000	0	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										68,530,000,000	0	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										68,530,000,000	0	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						Lanjutan Pembangunan Mesjid Agung Dharmasraya Pembangunan Gedung Arsip PUPR Pembangunan Gedung Kantor Dinas Dukcapil Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung UDKP kantor camat koto salak Pembangunan GPU ( Gedung Pertemuan Umum) kantor camat koto salak Pembangunan GPU Kecamatan Padang Laweh Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Padang Laweh pembangunan rumah dinas sekretaris daerah pembangunan rumah dinas wakil bupati Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten	0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 unit 0 Paket 0 unit 0 unit 0 paket 0 paket 0 dokumen	-	0	68,530,000,000	0	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										60,000,000	0	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota										60,000,000	0	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota						Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an	0 dokumen	-	0	60,000,000	0	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										373,275,000,000	0	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										373,275,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan						Operasional Unit Stone Crusher	0 paket	-	0	1,170,000,000	0	
											Terlaksananya Operasional Unit Batching Plan	0 paket					
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan						Aspal Dari Kantor Wali Lubuk Besar ke Jorong Mangun Jaya (lubuk besar)	0 kilometer			152,950,000,000	0	
											Aspal Hotmix Jalan Jorong Setia Budi (nagari simalidu)	0 kilometer					
											Aspal Hotmix Jalan Lingkar Jorong Nagari (kurnia selatan)	0 kilometer					
											Aspal Hotmix Jalan Pemukimam Penduduk (sialang gaung)	0 kilometer					
											Aspal Jalan Jorong Rumah Padang(nagari koto salak)	0 kilometer					
											Aspal Jalan Koto Gadang (kec.koto besar)	0 kilometer					
											Aspal Jalan Pakan Senayan (nagari koto salak)	0 kilometer					
											Aspal Jalan Poros Jr.Sei Kambut II dan Jr.Kulim Basisik (sungai kambut)	0 kilometer					
											Aspal Lapen Jalan Lingkar Jr Padang Tengah (nagari padukuan)	0 kilometer					
											" Aspal Lapen Jorong Padang Tangah I Nagari Padukuan "(kec. koto salak)	0 kilometer					
											Aspal Lapen Koto Ranah (kec.koto ranah)	0 kilometer					
											Aspal Lapen Limau Sundai (kec.koto salak)	0 kilometer					
											Aspal Lapen (nagari ampalu)	0 kilometer					
											Bangunan Sayap Box Precast Koto Ranah - Blok C Sitiung IV	0 kilometer					
											Bangunan Sayap Box Precast Lubuk Karak (kec. IX koto)	0 kilometer					
											Bangunan Sayap Box Precast SP 7 Timpeh	0 kilometer					
											Jalan Aspal Hotmix Dari Marga Makmur ke Beringin Sakti (taratak tinggi)	0 kilometer					
											Jalan Lingkar Seberang Piruko (kec. sitiung)	0 kilometer					
											Jalan Siguntur	0 kilometer					
											Jalan Sitiung 4(sitiung)	0 kilometer					
											Kelanjutan Aspal Hotmix (Jr.	0 kilometer					



Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang									Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	0 paket 0 kilometer 0 kilometer 0 paket 0 paket						
											Indikator Kinerja	0 paket				Keterangan	
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	0 paket	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	0 paket Target	Tolok Ukur	Target			
												0 paket 0 kilometer					

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021							
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang															
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prakiraan Maju (Rp.)
											Pembukaan Jalan dari Jr.Padang Duri ke Jr.Ranah Pulau (empat koto plp)				
											Pengaspalan Jalan ke SDN 24 Pulau Punjung (sungai kambut)				
											Pengaspalan Jalan Lingkar Silago				
											" Pengaspalan Jalan Pulau Punjung - Siluluk "				
											(kec.pulau punjung)				
											" Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho "				
											(kec IX koto)				
											Peningkatan Jalan Batu Rijal - Padang Laweh				
											Peningkatan Jalan Blok A Piruko- Sei. Duo				
											" Peningkatan Jalan Blok E - Kantor Camat Tiumang "				
											Peningkatan Jalan Koto Salak				
											Peningkatan Jalan Koto Siitung				
											Peningkatan Jalan Koto Sikabau ( Sikabau Kec. Pulau Punjung )				
											" Peningkatan Jalan KUD - Lingkar Sit.III "(kec.sungai rumbai)				
											" Peningkatan Jalan Lingkar Kampung Surau " (kec pulau punjung)				
											Peningkatan Jalan Lingkar Siguntur (kec sitiung)				
											"Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Rumbai Timur" (kec. sungai rumbai)				
											"Peningkatan Jalan Masuk Mako Brimob" (koto baru)				
											Peningkatan Jalan Menuju Lapas (kec. sitiung)				
											Peningkatan jalan poros Nagari dari Rigid Beton ke Aspal Hotmix (alahan nan tigo)				
											Peningkatan Jalan Simpang 14 - Batu Rijal				
											Peningkatan Jalan Sungai Kilangan (kec.pualu punjung)				
											Peningkatan / Pembangunan Jalan Paket X				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang										Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021		0 unit					
												0 unit					
												0 paket					
												0 unit					
												0 paket					
												0 meter					
												0 paket					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
												0 meter					
										</							

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021		0 0			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
											Indikator Kinerja	0 meter					Prioritas Pembangunan Nasional	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		0 meter			Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			Target		
										Pasangan Batu Jalan Ampang Kuranji Nag.Silago	0 meter							
										Pasangan Batu Tebing Jalan Simpang Nag.Silago IX koto	0 paket							
										Pasangan Batu Tebing SMA IX Koto Nag.Silago IX Koto	0 meter							
										Pelebaran Jembatan Depan Kantor Pos dan Giro Sitiung	0 unit							
										Pelebaran Jembatan Lapangan Bola Kaki Jorong Sitiung	0 METER							
										Pelebaran Jembatan Sungai Lomak Jr.Lubuk Bulang pulau punjung	0 meter							
										Pembangunan Batu Bronjong Jembatan pulau mainan	0 meter							
										Pembangunan Box Cover (abai siat)	0 paket							
										Pembangunan DAM 4 Jorong Koto Ranah koto besar	0 paket							
										Pembangunan Dam Penahan Tanah SDN 03 Pulau Punjung	0 unit							
										"Pembangunan Jembatan Ampalu Koto Salak"	0 meter							
										Pembangunan Jembatan Ampalu - Koto Salak	0 meter							
										Pembangunan Jembatan Banai 2 IX koto	0 unit							
										Pembangunan Jembatan Bariang lubuk Karak IX koto	0 meter							
										Pembangunan Jembatan Batang Limbu Jr.Kampung Surau								
										Pembangunan Jembatan Batang Mimpi sikabau								
										Pembangunan Jembatan Batang Sopan 1 Nagari Sopan Jaya padang laweh								
										Pembangunan Jembatan Batang Sopan 2 Nagari Sopan Jaya								
										Pembangunan Jembatan Batang Sopan 3 Nagari Sopan Jaya								
										Pembangunan Jembatan Batang Tandum Jr.Kampung Surau pulau punjung								
										Pembangunan Jembatan Beli Marga Jaya								
										Pembangunan Jembatan								

								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021									
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																	
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perataan Ruang																	
					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)		Keterangan
		Kode							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
											Beli Penyeberangan timpeh						
											Pembangunan Jembatan						
											Beli Pulau 1						
											Pembangunan Jembatan						
											Beli Pulau 2 timpeh						
											Pembangunan Jembatan						
											Beli Ranah Palabi						
											Pembangunan Jembatan						
											Beton Tumanggung Jr.Sei						
											Pinang timpeh						
											Pembangunan Jembatan						
											Gantung Jr.Padang Bungur						
											Timur Abai Siat koto besar						
											Pembangunan Jembatan						
											Gantung Nagari Alahan						
											Nan Tigo						
											Pembangunan Jembatan						
											Gantung Nag.Koto Salak						
											Pembangunan Jembatan						
											Gantung Siguntur						
											Pembangunan Jembatan						
											Gantung Sungai Piruko						
											Jr.Batang Tabek						
											Pembangunan Jembatan						
											Jalan Baru Sungai Lukuik						
											Pembangunan Jembatan						
											Jalan Lingkar Pasar Baru						
											Nag.Ampalu						
											Pembangunan Jembatan						
											Jr.Padang Candi pulau						
											punjung						
											Pembangunan jembatan						
											Kantor pertanian (sungai						
											limau)						
											Pembangunan Jembatan						
											kayu ao						
											Pembangunan Jembatan						
											(Kayu Aro Nagari Sopan						
											Jaya Kec. Padang Laweh)						
											Pembangunan Jembatan						
											Koto Salak - Ampalu						
											Pembangunan Jembatan						
											Koto Silombik						
											Pembangunan Jembatan						
											Langkitang 1						
											Pembangunan Jembatan						
											Langkitang 2						
											Pembangunan Jembatan						
											Limau Sundai koto slaka						
											Pembangunan Jembatan						
											lubuk pendo						
											Pembangunan Jembatan						
											Ma. Sopan 1padang laweh						

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang						Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021										
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Keterangan
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
											Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 2 padang laweh					
											Pembangunan Jembatan Muaro Moreng IX Koto					
											Pembangunan Jembatan Mudiak Banai IX koto					
											Pembangunan Jembatan Mudik Lago IX Koto					
											Pembangunan Jembatan (Nagari Ampalu)					
											Pembangunan Jembatan (Nagari Lubuk Besar-Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan)					
											Pembangunan Jembatan Nunang sitiung					
											Pembangunan Jembatan Permanen Koto Salak Ampalu					
											Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Besar					
											Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Padang Rampak ke Nagari Ampalu					
											Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 1					
											Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 2 timpeh					
											Pembangunan Jembatan Piruko Jr.Padang Sari menuju Lahan Akses Terbuka Bukit Mindawa Tebing Tinggi pulau punjung					
											Pembangunan Jembatan Riolin dan Pelebaran Jalan Jr.Sei Kilangan					
											Pembangunan Jembatan Rumah Padang koto salak					
											Pembangunan Jembatan Simpang Tabek					
											Pembangunan Jembatan Sungai Aman koto salak					
											Pembangunan Jembatan Sungai Balun					
											Pembangunan Jembatan Sungai Belit pulau punjung					
											Pembangunan Jembatan Sungai Betung Batas Koto					

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021														
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang															
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				
											Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prakiraan Maju (Rp.)
															Prioritas Pembangunan Nasional
											Besar-Sungai Rumbain(10x15 M)				
											Pembangunan Jembatan Sungai Landai IX Koto				
											Pembangunan Jembatan Sungai Limbu pulau punjung				
											Pembangunan Jembatan Sungai Pinang Nagari Timpeh				
											Pembangunan Jembatan Sungai Tandun pulau punjung				
											Pembangunan Jembatan Tabek Maju timpeh				
											Pembangunan Jembatan Tabek Penyeberangan				
											Pembangunan Jembatan (Tanjung Alam Kec. Asam Jujuhan)				
											Pembangunan Jembatan Trimulya II timpeh				
											Pembuatan Dinding Penahan Tanah Mushalla Al Jihat Tj.Medan Jr.Simpang Pogang				
											Pembuatan Dinding Penahan Tanah Sawah Durian Jr.Pulau Punjung				
											Pembuatan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung				
											Pembuatan Jembatan Beton Nag.Tabek Jaya timpeh				
											Pembuatan Jembatan Gantung				
											pembuatan jembatan gantung beton nag.pulau mainan				
											Pembuatan Jembatan Gantung (Jr. Kuat Sakato)				
											Pembuatan Jembatan Jr.Banjar Makmur Nagari Sungai Langkok tiumang				
											Pembuatan Jembatan Kenagarian Jorong Cahaya Koto				
											Pembuatan Jembatan Nag.Ampalu koto salak				
											Pembuatan Jembatan Penghubung Nag.Padukuan koto salak				
											Peningkatan Jembatan				



Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												800,000,000	0	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												800,000,000	0	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota												800,000,000	0	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota						Pembangunan Drainase Perumahan Pembuatan Tanah Kuburan Atau Makam Peningkatan Kualitas Jalan Perumahan/Kawasan Permukiman	0 Paket 0 Paket 0 Paket	-	0	800,000,000	0			
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												8,665,702,500	0	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												3,939,002,500	0	
1	04	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan												1,941,054,000	0	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn ( 16 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn ( 16 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	1,941,054,000	0			
1	04	01	2.03		Administrasi Umum												1,932,948,500	0	
1	04	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya bahan jasa surat menyurat	0 bulan	-	0	22,500,000	0			
1	04	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 unit			30,000,000	0			
1	04	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0 paket			40,000,000	0			
1	04	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (3 mobil, 7 sepeda motor)	0 unit			25,600,000	0			
1	04	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya Jasa administrasi keuangan	0 bulan			510,400,000	0			
1	04	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya Jasa kebersihan kantor	0 tahun			15,884,500	0			
1	04	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	0 tahun			105,400,000	0			
1	04	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya Alat tulis kantor	0 tahun			49,537,000	0			
1	04	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	0 tahun			45,560,000	0			
1	04	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 tahun			3,885,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0 paket			25,000,000	0	
1	04	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan Rumah tangga	0 paket			5,852,000	0	
1	04	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya Makan dan minuman	0 tahun			46,840,000	0	
1	04	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 tahun			216,840,000	0	
1	04	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya kendaraan untuk kelancaran kegiatan ( 1 Mobil 2 motor )	0 unit			460,000,000	0	
1	04	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya prasarana kantor	0 paket			36,000,000	0	
1	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	0 tahun			103,650,000	0	
1	04	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						Tersedianya gedung kantor Dinas Perkimtan	0 paket			190,000,000	0	
1	04	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									45,000,000	0		
1	04	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Jumlah stel pakaian hari khusus	0 stel	-	0	15,000,000	0	
1	04	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	0 orang			30,000,000	0	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH									3,650,000,000	0		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									3,650,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR Pembangunan Baru Rumah Swadaya (Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Asam Jujuhan) Pembangunan fasilitas Rusunawa Pulau Punjung Pembangunan fasilitas Rusunawa Sungai Rumbai Pembangunan Fasum Rumah Khusus Sitiung Peningkatan kualitas Rumah Swadaya di Abai Siat Kec. Koto Besar Peningkatan kualitas Rumah Swadaya (Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Asam Jujuhan)	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	-	0	3,650,000,000	0				
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										1,076,700,000	0				
1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										1,076,700,000	0				
1	04	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						Penyusunan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lisiba/Kasiba)	0 Paket	-	0	200,000,000	0				
1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam dan Sosial Penanganan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Terlaksananya operasional rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	0 Paket 0 Dokumen 0 Paket 0 unit			876,700,000	0				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										515,000,000	0				
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										515,000,000	0				
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										515,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					Jumlah Sertipikat Tanah Pemda yang terbit Penyusunan Sistem Informasi Tanah yang Handal	0 dokumen 0 Paket	-	0	515,000,000	0		
TOTAL															9,980,702,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												9,397,982,580	0	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												8,239,982,580	0	
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,448,482,580	0	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (26 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn 26 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,448,482,580	0			
1	05	01	2.03		Administrasi Umum												5,599,000,000	0	
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						penyediaan surat menyurat	0 bulan	-	0	2,500,000	0			
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran rekening Listrik dan Speedy	0 bulan			42,000,000	0			
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Perawatan dan BBM Kendaraan Dinas	0 Kendaraan 0 unit			175,500,000	0			
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Gaji PTT, Non PNS dan Honorarium pebgelola keuangan	0 Tahun			4,248,000,000	0			
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih	0 bulan			5,000,000	0			
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Belanja Alat Tulis Kantor	0 Tahun			25,000,000	0			
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Fotocopy dan cetak Blangko, Spanduk dll	0 Tahun			12,000,000	0			
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Belanja Alat Listrik	0 Paket			5,000,000	0			
1	05	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Belanja Peralatan Rumah Tangga	0 Tahun			4,000,000	0			
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Belanja Makanan dan Minuman	0 Tahun			40,000,000	0			
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Pembayaran BBM, Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas	0 Tahun			253,000,000	0			
1	05	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Belanja Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Dinas	0 Unit			750,000,000	0			
1	05	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Tersedinya PC Komputer dan Printer	0 unit			30,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Perawatan dan Perbaikan Komputer, Laptop, Printer dan AC	0 unit			7,000,000	0	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									172,500,000	0		
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar	0 stel	-	0	97,500,000	0	
1	05	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						Pengadaan Baju Anti Api dan APAR	0 buah			15,000,000	0	
1	05	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Biaya Pelatihan Teknis, Diksar dan Diklat PPNS Pelatihan Personil Pemadam Kebakaran	0 Personil 0 personil			60,000,000	0	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									1,060,000,000	0		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									940,000,000	0		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Nasional dan Kegiatan Daerah	0 kali 0 Tahun	-	0	880,000,000	0	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						Pelatihan Linmas Nagari	0 personil			60,000,000	0	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota									120,000,000	0		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota						Terlaksananya Sosialisasi Perda	0 kali	-	0	40,000,000	0	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota						Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada	0 kali			80,000,000	0	
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN									98,000,000	0		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									98,000,000	0		
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pemadaman kejadian Kebakaran	0 Tahun	-	0	98,000,000	0	
TOTAL															9,397,982,580	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												3,488,164,075	0	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												2,233,164,075	0	
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan												837,264,075	0	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 8 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 8 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	837,264,075	0			
1	05	01	2.03		Administrasi Umum												1,258,900,000	0	
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah materai 6000 dan Materai 3000 terbeli (lembar)	0 lembar	-	0	2,700,000	0			
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah bulan pembayaran Jasa Rekening Telepon, Air, dan Listrik (bln)	0 bulan			30,000,000	0			
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Bermotor yang dibayar pajak (unit)	0 unit			70,000,000	0			
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas SAR, Sopir (orang)	0 orang kegiatan			630,000,000	0			
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Porsentase pembelian Alat kebersihan (%)	0 bulan			12,000,000	0			
1	05	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Porsentase peralatan kerja yang diperbaiki (3 unit Komputer PC, Laptop 5 unit, printer 7 unit) (%)	0 unit			9,000,000	0			
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah bulan penyediaan ATK untuk kegiatan kantor (bulan)	0 bu;an			15,500,000	0			
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (bln)	0 bulan			14,000,000	0			
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal (pkt)	0 paket			3,700,000	0			
1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (thn)	0 Unit			16,000,000	0			



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Peralatan Rumah Tangga yang tersedia (pkt)	0 jenis			8,000,000	0	
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kantor yang tersedia (thn)	0 tahun			87,000,000	0	
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah yang terlaksana (bln)	0 bulan			180,000,000	0	
1	05	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan (thn)	0 Unit			31,000,000	0	
1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Dana Sewa Kantor yang tersedia (thn)	0 tahun			37,000,000	0	
1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (mobil 4 unit, sepeda motor 9 unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boar 4 unit, perahu karet 2 unit)	0 unit			113,000,000	0	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									117,000,000	0		
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia (stel)	0 unit	-	0	72,000,000	0	
1	05	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	0 orang			45,000,000	0	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									1,255,000,000	0		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									400,000,000	0		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						Persentase (%) penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal Persentase (%) penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen	-	0	300,000,000	0	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (%)	0 lokasi			100,000,000	0	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									500,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah aparaturn dan Warga Negara yang ikut pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana (orang)	0 orang	-	0	100,000,000	0	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam yang disediakan : motor boat 1 unit, dan perahu karet 2 unit  Persentase (%) Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0 paket 0 orang			300,000,000	0	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana (laporan)  Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (laporan)	0 Paket 0 laporan apa?			50,000,000	0	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah tenaga Satgas PB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan (orang)	0 orang			50,000,000	0	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									250,000,000	0		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB dan status darurat bencana(%)	0 persentase	-	0	250,000,000	0	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									105,000,000	0		
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah masyarakat yang mengikuti simulasi/ pelatihan tanggap bencana di Kab. Dharmasraya (org)  Terbentuknya Tim JITUPASNA dan kajian kebutuhan pascabencana (dok)	0 orang 0 tim	-	0	55,000,000	0	
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Jambore PRB Tk. Provinsi Sumatera Barat yang diikuti (kegiatan)	0 kegiatan			50,000,000	0	
TOTAL															3,488,164,075	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													8,376,353,500	0	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													6,421,027,500	0	
1	06	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,000,000	0	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan													3,365,527,500	0	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (28 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (28 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	3,305,527,500	0				
1	06	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Terlaksananya Pembuatan dan Penyusunan dokumen	0 persen			60,000,000	0				
1	06	01	2.03		Administrasi Umum													2,985,500,000	0	
1	06	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya materai dan perangko	0 lembar	-	0	10,800,000	0				
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terlaksananya pembayaran rekening telpon, internet, listrik dinas serta listrik gudang KB	0 Unit			80,000,000	0				
1	06	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (roda 4 sebanyak 9 unit, roda 2 sebanyak 32 unit)	0 Unit 0 unit			266,000,000	0				
1	06	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas	0 tahun			970,900,000	0				
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya alat perlengkapan kebersihan kantor	0 bulan			25,000,000	0				
1	06	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai (laptop 16 unit, PC 14 unit, AC 3 unit, Infocus 15 unit)	0 unit			22,800,000	0				
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya alat tulis kantor	0 paket			50,000,000	0				
1	06	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetak dan penggandaan	0 kegiatan			45,000,000	0				
1	06	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Terealisasinya komponen instalasi listrik	0 Paket			15,000,000	0				
1	06	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	0 Paket			6,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 tahun			5,000,000	0	
1	06	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makan minum rapat dan tamu	0 Paket			29,000,000	0	
1	06	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	0 tahun			260,000,000	0	
1	06	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						pengadaan kendaraan operasional roda dua	0 unit			880,000,000	0	
1	06	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor										100,000,000	0	
1	06	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya mebeleur kantor (meja biro 2 unit, meja staf 15 unit,kursi staf 15 unit, kursi tamu 1 set, meja/kursi rapat 1 set, lemari arsip 2 unit, meja telpon/fax 1 unit, kursi rapat napolly 50 unit,)	0 unit			100,000,000	0	
1	06	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Terpeliharanya gedung kantor	0 paket			100,000,000	0	
1	06	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						pemeliharaan kendaraan jabatan	0 unit			20,000,000	0	
1	06	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									50,000,000	0		
1	06	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur	0 Orang	-	0	50,000,000	0	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									490,000,000	0		
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)									235,000,000	0		
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT						Jumlah Suku Anak Dalam yang Dibina	0 orang	-	0	50,000,000	0	
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT						terlaksananaya peningkatan Kemampuan Potensi TKSK (11 orang) dan PSM (52 orang)	0 orang			185,000,000	0	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									255,000,000	0		
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	0 orang	-	0	20,000,000	0	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah penilaian PSKS berprestasi	0 orang			50,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						Jumlah peserta koordinasi LKKS dan LK3 Jumlah peserta penguatan peran LKS Posdaya Persentase terselenggaranya operasional LK3	0 orang 0 orang 0 persen			185,000,000	0		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											463,626,000	0	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											463,626,000	0	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu						Jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelayanan dan pembinaan	0 orang	-	0	75,000,000	0		
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan dan perlindungan Jumlah tuna sosial dan PMKS lainnya di luar panti yang dilayani dan dibina	0 orang 0 orang			200,000,000	0		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Korban pelecehan seksual dan Anak berhadapan dengan hukum yang disabilitas	0 orang			40,000,000	0		
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Jumlah Anak terlantar yang dilatih	0 orang			50,000,000	0		
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						Tersedianya perangkat pengolah data yang mendukung Pusat Layanan Data Sosial (meubeler 1 set, AC 3 unit, Router dan aksespoint 1 unit, komputer dan printer 2 unit, laptop 2 unit)	0 Unit			98,626,000	0		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											807,000,000	0	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											97,000,000	0	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						Jumlah anak yatim dari keluarga miskin yang diberi jaminan	0 anak	-	0	97,000,000	0		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											710,000,000	0	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah fakir Miskin yang terdata dalam data BDT ( Basis Data Terpadu) yang mendapatkan Program Perlindungan Sosial Jumlah Nagari yang diberikan Bansos/BPNT	0 jiwa 0 nagari	-	0	710,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											194,700,000	0	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											194,700,000	0	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan						Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	0 orang	-	0	119,700,000	0		
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan						Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapat bantuan UEP	0 kecamatan			75,000,000	0		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											685,000,000	0	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											365,000,000	0	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											90,000,000	0	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase POKJA PUG	0 %	-	0	90,000,000	0		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											275,000,000	0	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	0 Organisasi	-	0	275,000,000	0		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											70,000,000	0	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											70,000,000	0	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	0 Orang	-	0	70,000,000	0		
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											250,000,000	0	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											250,000,000	0	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA)	0 lokasi	-	0	250,000,000	0		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											3,964,320,000	0	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											3,909,320,000	0	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal											60,000,000	0	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						Persentase pengelola KB/Kader yang mendapatkan informasi/pembinaan tentang Program KKBPK	0 %	-	0	60,000,000	0		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota											1,320,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Jumlah calon akseptor baru dan akseptor ulangan yang dilayani	0 Akseptor	-	0	121,000,000	0		
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB					Tersedianya sarana penunjang kegiatan KB di tingkat lini lapangan (MUPEN 1 unit, tempat penyimpanan alokon 30 unit, laptop 1 set, pembangunan/alih fungsi gudang alokon 4 unit)	0 %			1,174,000,000	0		
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					Jumlah akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi (obat)	0 Akseptor			25,000,000	0		
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									2,529,320,000	0		
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB					Jumlah Balai Penyuluhan KB untuk kegiatan operasional PLKB	0 Lokasi	-	0	2,529,320,000	0		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									55,000,000	0		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									55,000,000	0		
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Persentase remaja yang mendapatkan informasi tentang Kesehatan Reproduksi	0 %	-	0	25,000,000	0		
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	0 Kelompok			30,000,000	0		
TOTAL															13,025,673,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													5,400,667,418	0	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													4,660,667,418	0	
2	09	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													30,000,000	0	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	30,000,000	0				
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan													2,920,167,418	0	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 28 orang terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 28 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,920,167,418	0				
2	09	01	2.03		Administrasi Umum													1,685,500,000	0	
2	09	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Surat yang terkirim	0 Bulan	-	0	5,000,000	0				
2	09	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan	0 Bulan			70,000,000	0				
2	09	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 2 dan Roda 4 ) yang dibayar pajak	0 Unit			12,000,000	0				
2	09	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	0 bulan			600,000,000	0				
2	09	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kerja yang diservis	0 Bulan			10,000,000	0				
2	09	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	0 Bulan			45,000,000	0				
2	09	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	0 Bulan			17,000,000	0				
2	09	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	0 Bulan			2,000,000	0				
2	09	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah kebutuhan peralatan kantor yang disediakan	0 Bulan			40,500,000	0				
2	09	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia	0 Bulan			7,500,000	0				



**Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan**  
**Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan**

**Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan**  
**Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Kecamatan yang Rawan Pangan Jumlah laporan kewaspadaan Pangan dan gizi (SKPG)	0 Kecamatan 0 laporan	-	0	140,000,000	0				
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										75,000,000	0				
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										75,000,000	0				
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah sampel bahan pangan segar dan pangan olahan yang diuji	0 Sampel	-	0	75,000,000	0				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										1,210,130,000	0				
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										995,130,000	0				
3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										995,130,000	0				
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah benih dan pakan yang diberikan Jumlah luasan (ha) percontohan budidaya minapadi Jumlah Luas lahan yang cetak Kolam	0 Ekor 0 Ha 0 Ha	-	0	335,000,000	0				
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Balai Benih Ikan Aktif Jumlah Sarana prasarana BBI yang direhab Jumlah sarana prasarana percontohan budidaya ikan	0 unit 0 Unit 0 kelompok			660,130,000	0				
3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										95,000,000	0				
3	25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										95,000,000	0				
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota						Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan Umum Pembangunan pagar Lubuk Larangan	0 Kelompok 0 Unit	-	0	95,000,000	0				
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										120,000,000	0				
3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										120,000,000	0				
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Event dan Publikasi gemar makan ikan Jumlah jenis Olahan hasil Perikanan	0 Kategori 0 Jenis	-	0	120,000,000	0				
TOTAL															6,610,797,418	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												6,777,695,806	0		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												4,076,195,806	0		
2	11	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,361,195,806	0		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (23 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (23 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	2,361,195,806	0				
2	11	01	2.03		Administrasi Umum												1,680,000,000	0		
2	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Cakupan jasa surat menyurat	0 jenis	-	0	2,000,000	0				
2	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 jenis			80,000,000	0				
2	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional ( kendaraan roda 6, roda 4, roda 3 , roda 2)	0 UNIT			25,000,000	0				
2	11	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Cakupan jasa transaksi keuangan	0 JENIS			995,000,000	0				
2	11	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja ( 5 Jenis ) = (Komputer , Lapotop , printer , AC , server))	0 JENIS			30,000,000	0				
2	11	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Cakupan penyedian peralatan kantor	0 KEGIATAN			55,000,000	0				
2	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( 9 Jenis) = ( Disposisi surat, cetak spj, kwitansi NCR, map merk DLH, Baliho, Spanduk, leaflet, fotokopi dan jilid dokumen))	0 JENIS			50,000,000	0				
2	11	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan banguan kantor	0 JENIS			3,000,000	0				
2	11	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Cakupan penyedian peralatan kantor ( 13 Jenis) = ( (Pengadaan Kursi Pimpinan, Kursi tamu, kursi rapat, meja rapat, meja kerja, kursi kerja, filling kabinet, lemari arsip, PC, Printer, LCD, AC, Kamera))	0 JENIS			50,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Cakupan peralatan rumah tangga ( 24 Jenis) = ( Tabung gas, air galon, peralatan rumah tangga lainnya))	0 JENIS			5,000,000	0	
2	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Cakupan penyediaan makanan dan minuman	0 KEGIATAN			65,000,000	0	
2	11	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	0 tahun			200,000,000	0	
2	11	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor ( 1 Jenis) = (Rehabilitasi Gedung Kantor (Cat Gedung Kantor, Rehab Ruang Kantor, Rehab Kamar Mandi))	0 jenis			25,000,000	0	
2	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Cakupan pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/ operasional ( 4 Jenis (BBM roda 4, BBM roda 2, Suku Cadang roda 4, suku cadang roda 2, ))	0 JENIS			95,000,000	0	
2	11	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										15,000,000	0	
2	11	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	0 tahun	-	0	15,000,000	0	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										600,000,000	0	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										600,000,000	0	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ( 2 Dokumen (1 draft RPPLH, 1 dok KLHS RPJMD))	0 dokumen	-	0	600,000,000	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										685,000,000	0	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										645,000,000	0	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						Jumlah titik pantau kualitas air, udara dan tanah, dan Persentase Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = (22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%))	0 persen	-	0	25,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Jumlah data monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon) pada usaha/kegiatan penghasil BPO ( 1 Dokumen (2 usaha/kegiatan di Kec. Sungai Rumbai, 2 uasaha/kegiatan di Kec. Koto Baru)	0 DOKUMEN 0 jorong 0 kegiatan			620,000,000	0		
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										40,000,000	0	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					1.Jumlah Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan lahan yang harus dilindungi	0 kawasan	-	0	40,000,000	0		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										150,000,000	0	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										150,000,000	0	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					Persentase RTH yang dipelihara ( 7 kawasan (BBM operasional pertamanan, peralatan pertamanan, pemeliharaan taman hijau, penyiraman air, & honor pertamanan))	0 KAWASAN	-	0	45,000,000	0		
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan					Jumlah kawasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem ( 1 Kawasan & Dokumen KEHATI)	0 kawasan			70,000,000	0		
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					Jumlah kawasan untuk pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	0 kawasan			25,000,000	0		
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH ( 2 kelompok (Nagari Sungai Kambut & Nagri Sungai Duo))	0 kelompok			10,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										20,000,000	0	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3										20,000,000	0	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 ( 20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik)	0 KEGIATAN	-	0	20,000,000	0	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										36,500,000	0	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										36,500,000	0	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup thp usaha/kegiatan yang mengurus izin lingkungan	0 laporan 0 KEGIATAN	-	0	36,500,000	0	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH										35,000,000	0	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										25,000,000	0	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH						Jumlah kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup ( 3 kelompok (Tiumang, Timpeh, Koto Baru) & bibit tanaman)	0 kelompok	-	0	25,000,000	0	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										10,000,000	0	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH						Jumlah Nagari Prokasi/ Superkasih ( 1 Nagari (Koto Besar))	0 nagari	-	0	10,000,000	0	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										100,000,000	0	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah Kelompok masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (3 kelompok (Tiumang, Timpeh, Koto Baru) & bibit tanaman)  Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) (40 sekolah (7 Sekolah Baru dan 33 Sekolah Lama), bibit tanaman, tong sampah, & belanja hadiah) + ( Jumlah Sekolah yang mengikuti verifikasi Adiwiyata ( Tingkat Kabupaten 2 Sekolah, Tk Provinsi 2 Sekolah, Tk Nasional 1 Sekolah)	0 KELOMPOK 0 SEKOLAH	-	0	80,000,000	0		
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						Jumlah kelompok masyarakat yang teredukasi	0 KELOMPOK			20,000,000	0		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											75,000,000	0	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											75,000,000	0	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih (1 Kecamatan (1 kec. Sitiung))  Jumlah titik pantau sasaran penilaian Adipura ( 1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung (34 titik pantau), bibit tanaman & tong sampah terpilah)	0 kecamatan 0 ibu kota kabupaten	-	0	75,000,000	0		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											20,000,000	0	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											20,000,000	0	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota						Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	0 KASUS	-	0	20,000,000	0		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											980,000,000	0	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah											980,000,000	0	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						Jumlah regulasi manajemen pengelolaan sampah (2 Dokumen (1 Perbup, 1 SOP))	0 dokumen	-	0	15,000,000	0		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						Persentase timbulan sampah yang tertangani ( 2,97% dan Kendaraan roda 6 , roda 3 ,mesin rumput, tong sampah/ container )	0 persen			750,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						Jumlah kelompok peduli sampah ( 21 Kelompok dan 2 tenaga pedamping)	0 kelompok			35,000,000	0	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang layak pakai ( 7 jenis)= ( (Truck , becak motor roda 3 , tong sampah terpilah , kontainer sampah , 1 kendaraan operasional TPA roda 2, TPS 3 R) )	0 jenis			180,000,000	0	
TOTAL															6,777,695,806	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												6,635,247,450	0	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												4,815,467,450	0	
2	12	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												30,000,000	0	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan	0 Laporan	-	0	20,000,000	0			
2	12	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan						Jumlah Laporan	0 Laporan			10,000,000	0			
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,965,247,450	0	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (30 orang) pembayaran tambahan pengasilan asn (30 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	2,935,247,450	0			
2	12	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						Jumlah Laporan	0 Laporan			15,000,000	0			
2	12	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan	0 Laporan			15,000,000	0			
2	12	01	2.03		Administrasi Umum												1,795,220,000	0	
2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya Matrai	0 materai	-	0	3,000,000	0			
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah belanja listrik . Air, VPN IP dan internet kantor listrik . Air, VPN IP dan lancarnya komunikasi kantor	0 Jenis			166,320,000	0			
2	12	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	0 Jenis			35,000,000	0			
2	12	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional	0 Unit			8,000,000	0			
2	12	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honorarium pengelola keuangan	0 Orang			540,000,000	0			
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan	0 Jenis			5,500,000	0			
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	0 Jenis			30,000,000	0			
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	0 Jenis			6,300,000	0			
2	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0 Jenis			3,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah belanja surat kabar/majalah	0 EKSEMPLAR			3,600,000	0	
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu	0 Jenis			30,000,000	0	
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	0 kali			180,000,000	0	
2	12	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit			230,000,000	0	
2	12	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0 Jenis			9,500,000	0	
2	12	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah Peralatan gedung kantor	0 Jenis			200,000,000	0	
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor	0 Unit			300,000,000	0	
2	12	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit			15,000,000	0	
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	0 Unit			30,000,000	0	
2	12	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									25,000,000	0		
2	12	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Sumber Daya Aparatur	0 kali	-	0	25,000,000	0	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									958,080,000	0		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk									958,080,000	0		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						Persentase Kepemilikan KK	0 Persen	-	0	75,000,000	0	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						Persentase Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan KK Persentase Kepemilikan KTP-el	0 Persen 0 Persen 0 Persen			735,000,000	0	
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk						Jumlah Layanan pengaduan dan Informasi Kependudukan	0 Layanan			38,080,000	0	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Persentase Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	0 Persen 0 Persen			110,000,000	0	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									132,000,000	0		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									132,000,000	0		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting						Jumlah Pelayanan Dokumen Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	0 Lembar	-	0	22,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						Jumlah Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Jumlah Pengurusan Akta Kematian Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0 Lembar 0 Lembar 0 Persen			110,000,000	0	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									694,700,000	0		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									349,700,000	0		
2	12	04	2.01	01	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk						Akurasi Data Base Kependudukan	0 Persen	-	0	55,000,000	0	
2	12	04	2.01	02	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil						terlaksananya pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil dalam aplikasi SIAK	0 unit			60,000,000	0	
2	12	04	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk						Akurasi Data Base Kependudukan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0 Persen 0 Persen			81,700,000	0	
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						Akurasi Data Base Kependudukan	0 Persen			35,000,000	0	
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan						Akurasi Data Base Kependudukan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0 Persen 0 Persen			70,000,000	0	
2	12	04	2.01	06	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah						Akurasi Data Base Kependudukan	0 Persen			48,000,000	0	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan									200,000,000	0		
2	12	04	2.03	03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	0 Kali	-	0	200,000,000	0	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan									145,000,000	0		
2	12	04	2.04	03	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain						Jumlah Sosialisasi dan peserta Persentase Akta Kelahiran	0 Orang 0 Persen	-	0	145,000,000	0	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									35,000,000	0		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan									35,000,000	0		
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain						Akurasi Data Base Kependudukan	0 Buku	-	0	35,000,000	0	
TOTAL															6,635,247,450	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												2,695,410,200	0	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												1,477,933,700	0	
2	13	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	0	0			
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan												0	0	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 24 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 24 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	0	0			
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,979,324,032	0	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					pembayaran gaji dan tunjangan asn 24 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 24 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,979,324,032	0			
2	13	01	2.03		Administrasi Umum												1,452,933,700	0	
2	13	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Lancarnya Administrasi surat menyurat	0 %	-	0	0	0			
2	13	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Lancarnya Adminstrasi Perkantoran	0 %			0	0			
2	13	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Lancarnya pembayaran pajak kendaraan (5 unit mobil dan 6 motor)	0 %			0	0			
2	13	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Lancarnya dministrasi keuangan	0 %			400,000,000	0			
2	13	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Lancarnya administrasi perkantoran	0 %			9,600,000	0			
2	13	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Lancarnya administrasi perkantoran	0 %			0	0			
2	13	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						tersedianya penggandaan dan barang cetakan	0 tahun			80,000,000	0			
2	13	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						terpeliharanya 1 unit jaringan Isitrik	0 tahun			5,000,000	0			
2	13	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						tersedianya peralatan rumah tangga kantor	0 jenis			5,000,000	0			
2	13	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						tersedianya makanan dan minuman rapat	0 %			0	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						terlaksana koordinasi dan konsultasi	0 %			180,000,000	0	
2	13	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan						tersedianya mobil dinas roda 4	0 unit			450,000,000	0	
2	13	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						tersedianya peralatan kantor (AC2, Laptop 4, UPS 5, TV satu, Genset 1 Unit)	0 jenis			90,040,000	0	
2	13	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya meubeleur kantor	0 unit			58,323,300	0	
2	13	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 unit			15,000,000	0	
2	13	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						meningkatnya sarana da prasarana aparatur (5 mobil, 6 motor)	0 Unit			159,970,400	0	
2	13	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										25,000,000	0	
2	13	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Peningkatan kaasitas sumberdaya aparatur	0 %	-	0	25,000,000	0	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										118,487,750	0	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					Lancarnya administrasi perkantoran	0 %	-	0	90,987,750	0	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					tersedianya makanan dan minuman rapat	0 %			27,500,000	0	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										53,000,000	0	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					Lancarnya Administrasi surat menyurat	0 %	-	0	7,000,000	0	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					Lancarnya Adminstrasi Perkantoran	0 %			46,000,000	0	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,850,000	0	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					Lancarnya pembayaran pajak kendaraan (5 unit mobil dan 6 motor)	0 %	-	0	5,850,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA											117,000,000	0	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa											117,000,000	0	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa						Jumlah Dokumen Perencanaan PKP	0 dokumen	-	0	87,000,000	0		
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga						penerimaan mahasiswa KKN	0 %			30,000,000	0		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											885,476,500	0	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa											885,476,500	0	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan aparatur nagari	0 nagari	-	0	323,362,000	0		
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa						Dokumen yang sesuai aturan	0 nagari			32,000,000	0		
2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD						Aparatur Nagari dan PTPD yang handal	0 nagari			140,000,000	0		
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa						Jumlah BUMNag yang diberdayakan	0 bumnag			70,000,000	0		
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						Terpilihnya Wali Nagari	0 nagari			150,000,000	0		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa						Jumlah nagari yang dibina/dilombakan	0 nagari			94,803,000	0		
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa						Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong	0 nagari			75,311,500	0		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											1,360,000,000	0	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											1,360,000,000	0	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					Jumlah kelembagaaan TP-PKK yang aktif Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif terlaksananya kegiatan pokjanal posyandu	0 lembaga 0 kecamatan 0 Kecamatan	-	0	1,360,000,000	0		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											215,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat						Jumlah kelembagaaan TP-PKK yang aktif Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif terlaksananya kegiatan pokjanal posyandu	0 lembaga 0 kecamatan 0 Kecamatan	-	0	0		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan						Jumlah LPM dan Pokjanal/posyandu Nagari yang dibina/dikoordinasikan	0 nagari			145,000,000	0	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						Jumlah kelembagaan lumbung pangan Nagari	0 nagari			20,000,000	0	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						Jumlah kelembagan TTG	0 lembaga			50,000,000	0	
TOTAL															7,232,071,982	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											14,083,474,548	0			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											8,754,782,932	0			
2	15	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20,000,000	0			
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan											2,804,982,932	0			
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (34 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (34 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	2,804,982,932	0				
2	15	01	2.03		Administrasi Umum											5,869,800,000	0			
2	15	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya jasa surat menyurat	0 JASA SURAT	-	0	60,000,000	0				
2	15	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik	0 BULAN			65,000,000	0				
2	15	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	0 TAHUN			15,000,000	0				
2	15	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Lancarnya administrasi keuangan	0 12			2,158,000,000	0				
2	15	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	0 JASA			20,000,000	0				
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya alat tulis kantor	0 buah			30,000,000	0				
2	15	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	0 macam			109,000,000	0				
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	0 jaringan			20,900,000	0				
2	15	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	0 jenis			20,000,000	0				
2	15	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makanan dan minuman rapat	0 tahun			30,000,000	0				
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	0 tahun			205,700,000	0				
2	15	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya kendaraan dinas ( motor BM (2 unit), motor matic (4 unit), mottor bebek (3 unit), motor KLX (2 unit))  Tersedianya mobil operasional (derek)	0 unit 0 unit			2,780,000,000	0				



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Tersedianya peralatan gedung kantor (AC 2 PK (2 unit), TV (2 unit), kulkas (2 unit), laptop (3 unit), printer (2 unit), brankas (2 unit), kamera (1 unit) )	0 unit			50,000,000	0	
2	15	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya meja dan kursi (kursi tunggu (4 unit), kursi rapat (10 unit), kursi kerja (20 unit), kursi tamu (1 set), kursi fitura (50 unit), meja kerja (20 unit))	0 unit			40,700,000	0	
2	15	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	0 unit			115,500,000	0	
2	15	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						Terpeliharanya gedung kantor KEUR	0 PAKET			150,000,000	0	
2	15	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									60,000,000	0		
2	15	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek	0 tahun	-	0	60,000,000	0	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									5,288,691,616	0		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									10,000,000	0		
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Jumlah masyarakat yang mengikuti soaialisasi kebijakan perhubungan	0 orang	-	0	10,000,000	0	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									4,038,691,616	0		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah pelataran parkir terpadu yang dibangun Tersedianya kendaraan operasional perlengkapan jalan	0 UNIT 0 unit	-	0	350,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah cermin cembung yang terpasang di ruas jalan nasional dan kab.  Jumlah panjang marka jalan / 2500 m2 (1 pkt (marka center line 12.500 m, marka full line 50.000 m, pita pengaduh 2,600 m, zebracross 1.800 m,stop line 350 m) )  Jumlah panjang pagar pengaman jalan  Jumlah panjang pagar pengaman jalan  Jumlah tersedianya rambu-rambu lalu lintas = (kec. Tiumang, koto besar, koto salak, kec sitiung, sungai rumbai, Timpeh. P. Punjung, pdg laweh, kt baru -150 bh) + ( 440 bh (rambu perintah,larangan,peringatan (400 bh),rambu petunjuk 40 bh))  Jumlah zoss yang terpasang di ruas jalan nasional dan kab.  Terpasangnya warning lifght tenaga surya	0 unit 0 paket 0 meter 0 meter 0 unit 0 meter 0 titik			3,600,347,616	0	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						Tersedianya pemeliharaan APILL (traffic light) dan warning light (12 unit (6 warning light, 6 traffic light) jalan lintas sumatera dan jalan lintas propinsi)	0 unit			88,344,000	0	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									100,000,000	0		
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						Jumlah terpeliharanya terminal angkutan pedesaan	0 paket	-	0	100,000,000	0	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									1,005,000,000	0		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor	0 unit	-	0	750,000,000	0	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah kendaraan yang diuji  jumlah kendaraan yang di uji petik	0 unit 0 unit			135,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah terpelihara dan meningkatnya kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB dinas perhubungan	0 alat			120,000,000	0	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									10,000,000	0		
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						Jumlah pelajar SLTA/ sederajat yang diberi penyuluhan	0 orang	-	0	10,000,000	0	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									45,000,000	0		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						Jumlah terlaksanannya forum lalu lintas	0 tahun	-	0	25,000,000	0	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						Jumlah terlaksananya pengawasan terhadap angkutan barang dan penumpang dijalan propinsi dan Kab. Terlaksananya pengendalian dan pengamanan pasar tumpah	0 KEGIATAN 0 pasar			20,000,000	0	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									60,000,000	0		
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						Jumlah siswa yang diberi penghargaan	0 orang	-	0	40,000,000	0	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						Jumlah bengkel yang di data dan dibina	0 unit			20,000,000	0	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									20,000,000	0		
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						Tersedianya data tentang angkutan barang dan orang	0 bulan	-	0	20,000,000	0	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									40,000,000	0		
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau									40,000,000	0		
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau						Tersedianya bus air/ sungai	0 unit	-	0	40,000,000	0	
TOTAL															14,083,474,548	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												13,616,305,330	0	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												4,606,305,330	0	
2	16	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,309,755,330	0	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (20 orang) pembayaran tambahaan penghasilan asn (20 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	2,309,755,330	0			
2	16	01	2.03		Administrasi Umum												2,241,550,000	0	
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah materai 3000 yang tersedia Jumlah materai 6000 yang tersedia Pengiriman paket	0 lembar 0 lembar 0 lembar	-	0	3,500,000	0			
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah line internet (1 unit astinet, 17 Modem, 3 Speedy dan 4 Indihome) Jumlah rekening listrik	0 unit 0 rekening listrik			1,144,000,000	0			
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui	0 unit			3,500,000	0			
2	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						pembayaran honorarium ASN	0 bulan			378,150,000	0			
2	16	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	0 jenis			20,000,000	0			
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah alat tulis kantor	0 jenis			40,000,000	0			
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetak yg tersedia Jumlah Penggadaan yang tersedia	0 jenis 0 penggandaan			25,000,000	0			
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor	0 komponen			5,000,000	0			
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah surat kabar yang tersedia	0 eksemplar			6,000,000	0			
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Jamuan Makan Rapat Koordinasi Jumlah jamuan makan Rapat staf Jumlah jamuan makan rapat tamu	0 kali 0 kali 0 kali			38,400,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah Jumlah Kordinasi dan Konsultasi Luar daerah	0 kali 0 kali			238,000,000	0	
2	16	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang tersedia	0 unit			80,000,000	0	
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan kantor yang tersedia	0 jenis			150,000,000	0	
2	16	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Meubeler yang tersedia	0 jenis			20,000,000	0	
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	0 gedung 0 jenis			40,000,000	0	
2	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	0 unit			50,000,000	0	
2	16	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									35,000,000	0		
2	16	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundan undangan yang terkirim	0 orang	-	0	35,000,000	0	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									480,000,000	0		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									480,000,000	0		
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						15 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	0 titik	-	0	50,000,000	0	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						Jumlah masyarakat yang teryalani di Media Center Diskominfo	0 unit			200,000,000	0	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan						Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	0 tower			180,000,000	0	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						Jumlah aparatur pemerintah yang dilatih	0 orang			50,000,000	0	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									8,530,000,000	0		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									380,000,000	0		
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								-	0	380,000,000	0	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									8,150,000,000	0		
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya	0 si OPD	-	0	150,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)						Jumlah peralatan studio dan komunikasi command center, 20 Jenis (CCTV, AC, Server, Komputer/layar Koneksi, Jaringan, dll)	0 jenis			8,000,000,000	0	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									360,000,000	0		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									360,000,000	0		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									360,000,000	0		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral						Banyaknya Data dan Informasi Statistik Sektoral Jumlah Buku DDA, Buku PDRB, Buku Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Dianalisis Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Diolah	0 dok 0 dok 0 dok 0 dok	-	0	240,000,000	0	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral						Tersedianya Bank Data Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	0 dokumen			50,000,000	0	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						Peningkatan Kapasitas Forum Data dan Dharmasraya Satu Data	0 kegiatan			70,000,000	0	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									280,000,000	0		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									280,000,000	0		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									215,000,000	0		
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						tersedianya kebijakan yang mengatur tentang persandian	0 dokumen	-	0	45,000,000	0	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang memahami sistem persandian daerah Jumlah OPD yang menerapkan Sertifikat Digital untuk menjamin keasliat/keabsahan dokument elektronik	0 OPD 0 OPD			170,000,000	0	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									65,000,000	0		
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Teramankannya Server/aplikasi pada OPD, 7 Server dan 10 Aplikasi	0 server dan aplikasi	-	0	65,000,000	0	
TOTAL															14,256,305,330	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												4,679,599,850	0	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												3,849,599,850	0	
2	17	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Tersedianya RENSTRA, RENJA dan pelaporan	0 Dokumen	-	0	20,000,000	0			
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,622,250,000	0	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 21 orang terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 21 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,570,000,000	0			
2	17	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersedianya dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK dan Laporan Tahunan	0 Dokumen			44,000,000	0			
2	17	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Tersedianya laporan keuangan	0 Dokumen			8,250,000	0			
2	17	01	2.03		Administrasi Umum												1,184,555,650	0	
2	17	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						61.006.000	0 bulan	-	0	61,006,000	0			
2	17	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 bulan			38,940,000	0			
2	17	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya jasa administrasi keuangan	0 bulan			125,702,500	0			
2	17	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya jasa kebersihan kantor	0 Bulan			124,542,000	0			
2	17	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	0 Unit			15,620,000	0			
2	17	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 bulan			51,890,850	0			
2	17	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	0 Bulan			33,016,500	0			
2	17	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Bulan			2,420,000	0			
2	17	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	0 Bulan			19,133,400	0			
2	17	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	0 Bulan			3,300,000	0			
2	17	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makan minum rapat dan tamu	0 Bulan			41,800,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 Bulan			350,000,000	0		
2	17	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit			88,000,000	0		
2	17	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Terpeliharanya gedung kantor	0 Bulan			60,000,000	0		
2	17	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan					pemeliharaan mobil jabatan (kepala dinas)	0 unit			20,000,000	0		
2	17	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	0 Unit			149,184,400	0		
2	17	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									22,794,200	0		
2	17	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal					Jumlah aparatur yang terlatih	0 orang	-	0	22,794,200	0		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									110,000,000	0		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									110,000,000	0		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah koperasi sehat	0 Koperasi	-	0	50,000,000	0		
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Koperasi berkualitas / berprestasi	0 Koperasi			60,000,000	0		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									130,000,000	0		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota									130,000,000	0		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi	0 orang	-	0	130,000,000	0		
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									180,000,000	0		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									180,000,000	0		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi					Jumlah kelompok strategis yang diberikan sosialisasi dan penguatan melalui koperasi Jumlah koperasi pelaksana RAT Jumlah koperasi yang dibina oleh dekopinda	0 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok	-	0	180,000,000	0		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									410,000,000	0		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									410,000,000	0		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Jumlah UMKM yang Didata	0 Dokumen	-	0	75,000,000	0		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target														
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Bordir	0 UMK 0 Unit			135,000,000	0			
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						Jumlah pelaku usaha mikro (potensial) yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan usaha	0 UMK			200,000,000	0			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										2,155,000,000	0			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										50,000,000	0			
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										50,000,000	0			
3					Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)						Jumlah barang /bahan berbahaya tidak layak/tidak boleh edar yang ditemukan	0 Unit	-	0	50,000,000	0			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										1,550,000,000	0			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										1,470,000,000	0			
3					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						Pembangunan Los Pasar Pembangunan Pasar Pembangunan PUJASERA/Rest Area (Wisata Kuliner) Pembangunan/Revitalisasi Pasar nagari (koto laweh)	0 Unit 0 Paket 0 Paket 0 paket	-	0	1,470,000,000	0			
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya										80,000,000	0			
3					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						Jumlah SDM pengelola pasar terlatih	0 orang	-	0	50,000,000	0			
3					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						Persentase penerimaan retribusi pasar	0 Persen			30,000,000	0			
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										190,000,000	0			
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										140,000,000	0			
3					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan						Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar	0 Laporan	-	0	40,000,000	0			
3					Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						Jumlah masyarakat yang dibantu dalam pemenuhan sembako	0 Paket			100,000,000	0			
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										50,000,000	0			

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						Distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	0 Agen/Kios	-	0	50,000,000	0	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										25,000,000	0	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										25,000,000	0	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota						Jumlah fasilitasi Kerjasama kemitraan	0 Pelaku Usaha	-	0	25,000,000	0	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										200,000,000	0	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										200,000,000	0	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah	0 Alat UTTP	-	0	100,000,000	0	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						Jumlah Pemilik alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah	0 Alat UTTP			100,000,000	0	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										140,000,000	0	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										140,000,000	0	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah event promosi / festival produk UKM daerah yang dilaksanakan/diikuti Jumlah pedagang yang dibina melalui pameran produk unggulan daerah	0 Event 0 event	-	0	140,000,000	0	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										1,200,000,000	0	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										860,000,000	0	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										860,000,000	0	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri						Pengembangan SDM dan Operasional Sentra IKM Logam Tersedianya Operasional Sentra IKM Logam	0 Paket 0 Paket	-	0	300,000,000	0	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah Peningkatan nilai tambah IKM Batik Tanah Liat	0 Event 0 IKM			560,000,000	0	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										90,000,000	0	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah										90,000,000	0	
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri						Terpantaunya IKM Dalam Limbah, Legalitas dan Pemakaian bahan tambahan makanan	0 IKM	-	0	90,000,000	0	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										250,000,000	0	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota										250,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)					Tersedianya Legalitas IKM Pangan	0 IKM	-	0	250,000,000	0		
TOTAL															8,034,599,850	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													4,763,908,260	0	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													3,992,148,320	0	
2	18	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,000,000	0	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan													2,412,885,000	0	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 20 orang terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 20 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,412,885,000	0				
2	18	01	2.03		Administrasi Umum													1,540,496,600	0	
2	18	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah surat menyurat dikirim	0 bulan	-	0	720,000	0				
2	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet	0 bulan			161,640,000	0				
2	18	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	0 unit			2,520,000	0				
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	0 bulan			554,232,000	0				
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3	0 bulan			10,192,080	0				
2	18	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service	0 Unit			11,760,000	0				
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	0 bulan			54,319,320	0				
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 bulan			27,456,000	0				
2	18	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	0 bulan			9,418,200	0				
2	18	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	0 bulan			5,760,000	0				
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum	0 bulan			24,855,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	0 bulan			189,624,000	0	
2	18	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	0 unit			130,000,000	0	
2	18	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	0 persen			80,000,000	0	
2	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan kantor yang disediakan	0 Unit			24,000,000	0	
2	18	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Mebuler yang disediakan	0 Unit			20,000,000	0	
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor	0 unit			180,000,000	0	
2	18	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Terpeliharanya mobil jabatan (kepala dinas)	0 unit			20,000,000	0	
2	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara	0 unit			34,000,000	0	
2	18	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									18,766,720	0		
2	18	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Pegawai/Aparatur yang terlatih Administrasi dan Pelaporan Keuangan	0 orang	-	0	13,810,000	0	
2	18	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Aparatur yang menguasai Implementasi peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan Jumlah Aparatur yang terlatih memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan(PTSP), pengolahan data, pelaporan dan LKPM on-line	0 orang 0 orang			4,956,720	0	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									174,787,220	0		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									174,787,220	0		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi investasi daerah Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Industri	0 dokumen 0 dokumen	-	0	174,787,220	0	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									250,000,000	0		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									250,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah promosi dan pameran investasi di dalam dan luar negeri yang diikuti/diselenggarakan	0 kali	-	0	250,000,000	0	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										210,241,320	0	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										210,241,320	0	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik	0 dokumen 0 persen	-	0	194,976,120	0	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal						Jumlah Monev dan Pelaporan yang Terlaksana	0 persen			7,500,000	0	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan						Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan	0 kasus			7,765,200	0	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										84,043,800	0	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										84,043,800	0	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 kali	-	0	11,772,000	0	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						jumlah pembinaan penanaman modal Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	0 kali 0 kegiatan			57,271,800	0	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						jumlah poengawasan pelaksanaan penanaman modal	0 kali			15,000,000	0	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										52,687,600	0	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										52,687,600	0	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Jumlah dokumen pendataan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana Jumlah informasi yang tersedia (data perusahaan dan LKPM) penanaman modal daerah	0 persen 0 bulan	-	0	52,687,600	0	
TOTAL															4,763,908,260	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												4,045,815,000	0	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												1,265,494,800	0	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota												1,240,494,800	0	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor						Jumlah Parsenstasi Peningkatan Pemberdayaan Pemuda	0 persen	-	0	30,000,000	0			
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota						terpilihnya anggota paskibra kab. Dharmasraya	0 kegiatan			972,994,800	0			
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan						Jumlah Pemuda yang mengikuti Bintek	0 orang			15,000,000	0			
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi						Jumlah pemuda yang berprestasi Jumlah Pemuda yang mengikuti Kompetensi	0 orang 0 orang			122,500,000	0			
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						pengiriman pemuda berprestasi dan penurunan tingkat kenakalan remaja	0 kegiatan			100,000,000	0			
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												25,000,000	0	
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha						Jumlah organisasi pemuda yang ikut pelatihan	0 organisasi	-	0	25,000,000	0			
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												2,482,320,200	0	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												250,000,000	0	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar						Jumlah Medali Emas yang diraih	0 medali	-	0	250,000,000	0			
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												50,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan						Jumlah Cabor yang difasilitasi	0 cabor	-	0	50,000,000	0	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										787,934,400	0	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota						Jumlah Medali Emas yang diraih	0 medali	-	0	150,000,000	0	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota						Jumlah Klub yang mengikuti kompetensi	0 kegiatan			637,934,400	0	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										1,394,385,800	0	
2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi						Jumlah pembangunan sarana olahraga Jumlah Prasarana Olahraga	0 unit 0 paket	-	0	1,394,385,800	0	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										298,000,000	0	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										298,000,000	0	
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						terfasilitasinya KML Bagi pembina dan persiapan jambore Pramuka Daerah	0 kegiatan	-	0	298,000,000	0	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										6,877,056,440	0	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										3,607,186,090	0	
2	22	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,000,000	0	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0	
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan										2,688,292,910	0	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan ASN (23 orang) pembayaran tambahan penghasilan PNS (23 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	2,688,292,910	0	
2	22	01	2.03		Administrasi Umum										875,133,180	0	
2	22	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah tagihan listrik, telepon dan penambahan daya	0 bulan	-	0	180,720,000	0	
2	22	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0 bulan			12,653,400	0	
2	22	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						jumlah kendaraan yang membayar pajak	0 unit			6,000,000	0	
2	22	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah pegawai yang menerima honor	0 bulan			6,000,000	0	
2	22	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						jumlah peralatan yang diperbaiki	0 jenis			15,000,000	0	
2	22	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						jenis alat tulis kantor	0 bulan			67,120,200	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						jumlah barang cetak dan penggandaan	0 jenis			59,649,000	0	
2	22	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah komponen instalasi listrik dan alat-alat listrik	0 item			21,562,560	0	
2	22	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 bulan			4,320,000	0	
2	22	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor	0 bulan			35,820,000	0	
2	22	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	0 bulan			299,868,000	0	
2	22	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan yang diadakan	0 unit			24,000,000	0	
2	22	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah mobeleur yang diadakan	0 unit			13,800,000	0	
2	22	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah perbaikan gedung	0 unit			74,413,020	0	
2	22	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah dan Jenis Kendaraan yang diperbaiki	0 unit			54,207,000	0	
2	22	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										23,760,000	0	
2	22	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 orang	-	0	23,760,000	0	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										998,016,350	0	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										793,416,350	0	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Jumlah Rumah Beradaban yang berhasil dikembangkan Pembinaan perkembangan multi etnis di kabupaten Dharmasraya Terlaksanananya Penyusunan dan pengumpulan bahan pembuatan dokument budaya dan sejarah dharmasraya terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri terlaskananya pembangunan pengelolaan kebudayaan daerah	0 bulan 0 unit 0 bulan 0 dokumen 0 unit 0 kegiatan	-	0	741,768,350	0	

**Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**  
**Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						terlaksananya workshop	0 kegiatan			51,648,000	0			
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota									204,600,000	0				
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						terlaksananya Pelestarian adat dan budaya	0 jenis	-	0	117,600,000	0			
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						Persentase Tokoh adat yang dibina Terfasilitasinya kegiatan bundo kanduang kab. Dharmasraya Terlaksananya lomba pidato adat tingkat prlajar	0 lembaga 0 orang 0 orang			87,000,000	0			
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									361,854,000	0				
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									361,854,000	0				
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						terlaksanananya pendidikan dan pelatihan pelaku dan sanggar seni Terlaksananya event budaya daerah terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri Terlaksananya silek art festival di dharmasraya	0 bulan 0 event 0 bulan 0 kegiatan	-	0	361,854,000	0			
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									1,660,000,000	0				
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									1,645,000,000	0				
2	22	05	2.02	01	Register Cagar Budaya						Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0 kawasan	-	0	1,645,000,000	0			
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									15,000,000	0				
2	22	05	2.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya						Terbentuknya TIM Ahli Cagar Budaya Kab. Dharmasraya	0 orang	-	0	15,000,000	0			
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									250,000,000	0				
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota									250,000,000	0				
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						Jumlah Duplikat yang dibuat	0 unit	-	0	250,000,000	0			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									2,279,835,320	0				
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									1,115,114,400	0				
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									1,015,114,400	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah sarana yang dibangun	0 unit	-	0	1,015,114,400	0	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									100,000,000	0		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						jumlah pembangunan daerah tujuan wisata Jumlah pembangunan dan Pengembangan Kawasan Desinasi wisata	0 tempat 0 kawasan	-	0	100,000,000	0	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									1,076,828,620	0		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									1,076,828,620	0		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota						terlaksananya partisipasi pada event ina craft Terlaksananya partisipasi seni dan budaya TMII pada acara ekonomi kreatif di BP TMII terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab. Dharmasraya terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya terlaksananya tour d singkarak Terpilihnya Pasangan Uda-Uni Kab. Dharmasraya	0 kegiatan 0 kegiatan 0 orang 0 bulan 0 event 0 kegiatan 0 orang	-	0	1,061,828,620	0	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri						terlaksananya pemetaan dan inventarisasi usaha ekonomi kreatif seni dan budaya	0 pelaku			15,000,000	0	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									87,892,300	0		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									87,892,300	0		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						terlaksananya kegiatan dan pengembangan gerakan sadar wisata terlaskananya pembentukan forum komunikasi	0 orang 0 bulan	-	0	67,892,300	0	
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)						terlaksananya Sosialisasi TDUP	0 orang			20,000,000	0	
TOTAL															13,202,706,760	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												4,175,880,460	0	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												3,903,480,460	0	
2	23	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												15,000,000	0	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						penyusunan renstra PD	0 dokumen	-	0	15,000,000	0			
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,611,109,460	0	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 24 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 24 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,611,109,460	0			
2	23	01	2.03		Administrasi Umum												1,237,371,000	0	
2	23	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	0 bulan	-	0	37,200,000	0			
2	23	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0 unit			8,000,000	0			
2	23	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	0 bulan			380,000,000	0			
2	23	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	0 bulan			8,000,000	0			
2	23	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	0 unit			6,000,000	0			
2	23	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 bulan			35,000,000	0			
2	23	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	0 bulan			33,571,000	0			
2	23	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0 bulan			5,000,000	0			
2	23	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	0 Bulan			45,000,000	0			
2	23	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	0 bulan			3,000,000	0			
2	23	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	0 bulan			25,000,000	0			

**Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	0 bulan			240,000,000	0	
2	23	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedia kendaraan dinas roda dua	0 unit			36,000,000	0	
2	23	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Tersedianya peralatan gedung kantor	0 jenis			113,000,000	0	
2	23	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya mebeleur gedung kantor	0 jenis			131,000,000	0	
2	23	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Terpeliharanya gedung kantor	0 unit			50,000,000	0	
2	23	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Kendaraan operasional yang dipelihara	0 unit			81,600,000	0	
2	23	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										40,000,000	0	
2	23	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Aparatur yang dilatih	0 orang	-	0	40,000,000	0	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										272,400,000	0	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										172,400,000	0	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	0 pemustaka	-	0	122,400,000	0	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka						Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah	0 eksemplar			50,000,000	0	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	0	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						Jumlah Lomba yang dilaksanakan	0 kegiatan	-	0	75,000,000	0	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)	0 orang			25,000,000	0	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										348,500,000	0	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										298,500,000	0	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										128,500,000	0	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kearsipan	0 OPD	-	0	50,000,000	0	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimpan	0 daftar arsip (OPD)			78,500,000	0	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										70,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					Jumlah SDM OPD,Senag, UPT,SD/MI,SLTP pengelola Aset Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset	0 orang	-	0	70,000,000	0		
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									100,000,000	0		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN					Jumlah Arsip Daerah yang bisa di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	0 dokumen	-	0	70,000,000	0		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota					jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang SIKN dan JIKN	0 orag			30,000,000	0		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									50,000,000	0		
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota									50,000,000	0		
2	24	03	2.04	02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	0 dokumen	-	0	50,000,000	0		
TOTAL															4,524,380,460	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												42,334,472,000	0	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												19,127,172,000	0	
3	27	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												30,000,000	0	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	30,000,000	0			
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan												14,043,172,000	0	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 114 orang terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 114 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	14,043,172,000	0			
3	27	01	2.03		Administrasi Umum												5,024,000,000	0	
3	27	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat	0 Bulan	-	0	25,000,000	0			
3	27	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah penyediaan layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	0 Bulan			123,000,000	0			
3	27	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah penyediaan jasa surat-surat perizinan kendaraan dinas	0 Unit			66,000,000	0			
3	27	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan dan jasa pengelolaan operasional kegiatan	0 Bulan			1,630,000,000	0			
3	27	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	0 Bulan			20,000,000	0			
3	27	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah penyediaan jasa peralatan kerja yang siap pakai	0 Jenis			60,000,000	0			
3	27	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	0 Bulan			105,000,000	0			
3	27	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0 Bulan			59,000,000	0			
3	27	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan	0 Jenis			11,000,000	0			
3	27	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah penyediaan Kebutuhan kerja	0 Jenis			600,000,000	0			
3	27	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan Minum yang Disediakan	0 Bks			170,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti	0 Bulan			450,000,000	0	
3	27	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas	0 unit			200,000,000	0	
3	27	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Pengadaan peralatan gedung kantor	0 Jenis			275,000,000	0	
3	27	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Pengadaan maubiler	0 Jenis			250,000,000	0	
3	27	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0 Unit			400,000,000	0	
3	27	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0 unit			30,000,000	0	
3	27	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	0 Unit			550,000,000	0	
3	27	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									30,000,000	0		
3	27	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Tahun	-	0	30,000,000	0	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									2,870,000,000	0		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									180,000,000	0		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						Jumlah Brigade Alsintan dan Alsintan yang dikelola Pemdampingan PUAP Pendampingan UPJA	0 unit 0 PUAP 0 UPJA	-	0	180,000,000	0	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota									290,000,000	0		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						Jumlah dampingan penyaluran pupuk bersubsidi	0 kegiatan	-	0	15,000,000	0	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						Jumlah bibit tanaman yang diberikan ke masyarakat	0 Batang			275,000,000	0	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain									2,400,000,000	0		
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						Jumlah populasi ternak dengan sistem budidaya	0 Ekor	-	0	2,400,000,000	0	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									17,260,000,000	0		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian									945,000,000	0		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)	0 Ha	-	0	945,000,000	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian										16,315,000,000	0	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						Peningkatan Air Irigasi Pertanian	0 unit	-	0	270,000,000	0	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						Peningkatan mutu dan keamanan pangan	0 unit			1,650,000,000	0	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						Jumlah Jalan Produksi yang terbangun dan terpelihara Jumlah JUT yang terbangun dan terpelihara	0 Unit 0 Unit			11,210,000,000	0	
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						Jumlah Damparit yang terbangun dan terpelihara	0 Unit			400,000,000	0	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan						Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	0 ton/RPH			85,000,000	0	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya						Jumlah Rehab dan Renovasi Kantor BP3K/BPP	0 Unit			2,700,000,000	0	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										770,000,000	0	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										330,000,000	0	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						Pengendalian dan Penaggulangan Penyakit Strategis	0 jenis/ekor	-	0	100,000,000	0	
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	0 Kegiatan 0 Kegiatan			230,000,000	0	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota										50,000,000	0	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan						Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	0 ekor/ton	-	0	50,000,000	0	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										350,000,000	0	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						Operasional Puskesmas Pengadaan peralatan dan Obat-obatan Puskesmas Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang UPT Puskesmas	0 unit 0 jenis 0 jenis	-	0	350,000,000	0	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner										40,000,000	0	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	0 persen	-	0	40,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											85,000,000	0	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											85,000,000	0	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						Pembinaan dan koordinasi antisipasi serangan OPT	0 Kecamatan	-	0	85,000,000	0		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											105,000,000	0	
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan											105,000,000	0	
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						Operasional Pasar Ternak	0 unit	-	0	105,000,000	0		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											2,117,300,000	0	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											2,117,300,000	0	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						Jumlah programa tingkat nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Jumlah SDM Penyuluh yang meningkat	0 Dok 0 Orang	-	0	127,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						Jumlah kegiatan Sekolah Lapang Jumlah monitoring, evaluasi ,dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan Jumlah pembinaan kelompok dalam peningkatan Produk Pertanian Yang memiliki Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Penyuluhan Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Peningkatan kelembagaan petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	0 Kegiatan 0 Kecamatan 0 Kelompok 0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang 0 Kelompok 0 Kelompok 0 kelompok 0 Orang			1,263,200,000	0	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						Jumlah BP3K/BPP yang beroperasi	0 Unit			727,100,000	0	
TOTAL															42,334,472,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												1,158,512,500	0	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												90,000,000	0	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)												90,000,000	0	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						penyusunan dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	0	45,000,000	0			
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						penyusunan dokumen rencana tenaga kerja mikro	0 dokumen			45,000,000	0			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												340,752,500	0	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												340,752,500	0	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan ke Perusahaan/Instansi pemerintah  Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan mengurangi pengangguran	0 Pencaker 0 Kegiatan	-	0	340,752,500	0			
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												510,000,000	0	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota												220,000,000	0	
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						Jumlah pekerjaan padat karya yang dilkukan  Meningkatnya jumlah wirausaha baru	0 paket 0 kelompok	-	0	220,000,000	0			
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												140,000,000	0	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						Meningkatnya pelayanan bagi pencaker	0 Jenis	-	0	30,000,000	0			
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						Meningkatnya Jumlah Media Informasi Tenaga Kerja  Meningkatnya kesempatan kerja pada perusahaan	0 Informasi 0 Perusahaan			70,000,000	0			
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja						Jumlah tenaga kerja yang terdata	0 pencaker			40,000,000	0			
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota												150,000,000	0	
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan	0 Org	-	0	150,000,000	0			
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												217,760,000	0	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												80,000,000	0	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						Meningkatya Fungsi LKS dan tripartit	0 Kali	-	0	20,000,000	0			
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan						pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan perusahaan	0 perusahaan			15,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						Meningkatnya kualitas data yang tersedia	0 Perusahaan			45,000,000	0				
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									137,760,000	0					
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya fungsi dan tata kelola P2K3 di Perusahaaan Meningkatnya pemahaman pelaku usaha/ peruahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan Meningkatnya perlindungan kepada buruh/ karyawan penyusunan peraturan perusahaan	0 Kali 0 Perusahaan 0 Kelembagaan HI 0 dokumen		0	95,760,000	0				
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan	0 Kasus			42,000,000	0				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										4,236,965,840	0				
3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										4,146,965,840	0				
3	32	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,000,000	0				
3	32	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan										2,800,195,290	0				
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (27 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (27 orang)	0 bulan 0 bulan	-	0	2,750,195,290	0				
3	32	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	0 Laporan			50,000,000	0				
3	32	01	2.03		Administrasi Umum										1,226,770,550	0				
3	32	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan	-	0	95,200,000	0				
3	32	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0 kendaraan			4,500,000	0				
3	32	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	0 Bulan			431,920,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	32	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor	0 Bulan			10,376,000	0	
3	32	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Lancarnya operasional peralatan kerja kantor	0 unit			9,500,000	0	
3	32	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Lancarnya pelayanan administrasi kantor	0 Bulan			32,955,550	0	
3	32	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Lancarnya pelayanan administrasi kantor	0 Bulan			39,174,000	0	
3	32	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	0 Buah			6,905,000	0	
3	32	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	0 Bulan			16,800,000	0	
3	32	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	0 Bulan			200,000,000	0	
3	32	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya kendaraan dinas/operasional (1 unit Mobil, 2 unit Motor)	0 Unit			250,000,000	0	
3	32	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Tersedianya peralatan aula dan kantor	0 Unit			6,000,000	0	
3	32	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						" Tersedianya prasarana kantor "	0 Unit			15,000,000	0	
3	32	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						" Tersedianya prasarana kantor "	0 unit			17,550,000	0	
3	32	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						"Lancarnya operasional kantor"	0 Unit			40,000,000	0	
3	32	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						" Tersedianya kendaraan dinas operasional "	0 Unit			50,890,000	0	
3	32	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										100,000,000	0	
3	32	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						" Meningkatnya pelayanan dan kelancaran administrasi "	0 Orang	-	0	100,000,000	0	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI										90,000,000	0	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian										90,000,000	0	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						Meningkatnya pembinaan kepada transmigran	0 KK	-	0	50,000,000	0	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						Meningkatnya sarana dan prasarana sosial ekonomi transmigrasi	0 Jenis			40,000,000	0	
TOTAL															5,395,478,340	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												58,861,498,365	0	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												35,058,944,305	0	
4	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												9,287,183,000	0	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 70 orang pembayaran gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati (2 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn 70 orang	0 bulan 0 tahun 0 bulan	-	0	9,287,183,000	0			
4	01	01	2.03		Administrasi Umum												24,934,046,410	0	
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah materai dan benda pos lainnya	0 bln	-	0	50,600,000	0			
4	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	0 bln			887,480,000	0			
4	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns						Pembayaran belanja pemeliharaan kesehatan KDH/ WKDH	0 bln			100,000,000	0			
4	01	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah						Jaminan barang milik daerah	0 unit			300,500,000	0			
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						pajak kendaraan	0 unit			96,305,000	0			
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						honor pengelola keuangan, PTT dan THL	0 bln			3,704,360,000	0			
4	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi					Honor dan jenis peralatan kebersihan	0 bln			660,000,000	0			
4	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Perbaikan peralatan kerja	0 bln			58,000,000	0			
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya alat tulis kantor	0 bln			174,000,000	0			
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan, jilid dan fotokopi	0 bln			133,500,000	0			
4	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen dan pemeliharaan jaringan/ instalasi listrik kantor	0 bln			266,000,000	0			
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	0 bln			2,250,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan rumah tangga	0 bln			68,000,000	0	
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat kantor	0 bln			2,999,600,000	0	
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Rapat dan konsultasi yang diikuti	0 bln			2,499,000,000	0	
4	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan						Tersedianya kendaraan dinas pejabat negara	0 unit			1,800,000,000	0	
4	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda 2 Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4	0 unit 0 unit			480,000,000	0	
4	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Tersedianya Material penghias ruangan 1 pkt, karpet auditorium 1 pkt	0 pkt			285,000,000	0	
4	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						Tersedianya Peralatan rumah dinas : sofa 2 unit. Tempat tidur 2 unit, gorden 1 paket, kulkas 1 unit, televisi 2 unit, bed cover 2 unit, aquarium 1 set, lemari pakaian 2 unit. Mess Pemda: sofa 2 unit, karpet 1 pkt.	0 pkt			426,000,000	0	
4	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Tersedianya PC all in one 4 unit, AC 4 unit, printer 3 unit, videotron 1 pkt	0 pkt			2,272,800,000	0	
4	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya Mebeler set 5 paket, kursi futura 200 unit	0 pkt			850,000,000	0	
4	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan						Terlaksananya rehab rumah jabatan	0 unit			738,440,000	0	
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Terlaksananya rehab auditorium, 3 unit ruang asisten, 2 unit ruangan bagian	0 pkt			1,800,000,000	0	
4	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	0 unit			614,632,000	0	
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksanya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	0 unit			1,369,829,410	0	
4	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur						Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala 20 unit meja kerja, 20 unit lemari arsip	0 pkt			50,000,000	0	
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										817,714,895	0	
4	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Tersedianya Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0 stel	-	0	470,000,000	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah aparatur yang dapat mengikuti diklat bidang protokol Terlakananya bimbingan teknis bagi ASN	0 orang 0 thn			347,714,895	0	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									11,955,520,800	0		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan									2,059,920,800	0		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan						Jumlah kecamatan yang dibina dan dinilai Jumlah Koordinasi dengan intansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kependudukan, pencatatan sipil Jumlah petugas yang dilatih Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat Kabupaten	0 kecamatan 0 kali 0 orang 0 tahun 0 orang camat	-	0	454,430,300	0	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan 1 dokumen, 1 Unit Laptop, 1 Unit GPS Jumlah masalah yang difasilitasi Jumlah segmen batas nagari yang di fasilitasi	0 dokumen 0 segmen 0 segmen			669,700,000	0	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						Dokumen LPPD Jumlah peserta sosialisasi Regulasi/Aplikasi tentang 25 Buku, 1 Unit Laptop, 1 Unit UPS Jumlah aparatur penyusun LPPD yang dilatih Terpilihnya Nagari terbaik di bidang keamanan dan ketertiban Tersusunnya dokumen capaian SPM Tersusnya Buku dan Dokumen LKPj	0 dokumen 0 orang 0 nagari terbaik 0 dokumen 0 dokumen			935,790,500	0	
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									8,390,600,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						Jumlah cabang MTQ yang di lombakan Jumlah jamaah haji yang di fasilitasi Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi bidang keagamaan yang terleksana Jumlah lembaga didikan subuh yang terbina dan terlatih Jumlah Masjid/Mushallah yang dikunjungi Jumlah pembinaan LPTQ yang di bina Jumlah peringatan hari besar islam di dharmaraya Jumlah rumah tahfiz (25 unit) dan taman bacaan masyarakat (15 unit TBM) di fasilitasi Terlaksananya dan terfasilitasinya kegiatan pembinaan keagamaan	0 cabang 0 Orang 0 kali 0 lds 0 Masjid/Mushalla 0 lembaga/orang 0 kali 0 unit 0 bulan		0	7,690,600,000	0	
4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						Jumlah rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan yangg dilaksanakan bagian kesra Jumlah UKS yang dibina	0 kali 0 uks			330,000,000	0	
4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						Jumlah honorarium pimpinan basnaz (5 org), LKAAM (12 org), MUI (13 org), dan PMI (13 org) Jumlah Peserta sosialisasi	0 orang 0 orang			370,000,000	0	
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah										840,000,000	0	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						Produk Hukum Daerah (16 Perda + 50 Perbup) Produk Hukum Nagari	0 Dokumen 0 Laporan	-	0	350,000,000	0	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum						Kegiatan Perangkat Daerah berspektif HAM (1 Laporan . 1 Infocus)  Pemberian Layanan Bantuan Hukum (advokasi hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum terhadap Pemerintah Daerah, Instansi, Pejabat TUN dan ASN, dan masyarakat miskin	0 Jenis 0 Paket			390,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	0 tahun			100,000,000	0	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah									665,000,000	0		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						Jumlah MoU tentang Kerja Sama Daerah 2 Dokumen, 1 Unit Laptop Nagari pilot project binaan perantau Standard Operating Procedure (SOP) Kerjasama Daerah Tersusunnya kajian/study kelayakan kemampuan kerja sama daerah	0 dokumen 0 Nagari 0 SOP 0 dokumen	-	0	415,000,000	0	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						umlah Koordinasi terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	0 kali			250,000,000	0	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									4,503,672,760	0		
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									2,365,321,400	0		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						Jumlah koordinasi dan fasilitasi Pendirian Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD) yang dilaksanakan	0 Badan Usaha	-	0	2,150,000,000	0	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Jumlah badan usaha yang berpartisipasi TSLP/ CSR Jumlah monitoring dan pengendalian inflasi yang dilaksanakan (1 Komputer)	0 Laporan 0 Laporan 1 Komputer			115,430,400	0	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						Jumlah monitoring dan pengawasan barang bersubsidi yang dilaksanakan	0 Laporan			99,891,000	0	
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan									446,000,000	0		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	0 Dokumen	-	0	75,000,000	0	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan	0 Dokumen			121,000,000	0	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						Dokumen laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan dan keuangan	0 Dokumen			250,000,000	0	
4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa									1,600,599,000	0		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						operasional ULP	0 bulan	-	0	399,399,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						honor serta biaya operasional (7 orang) pada Pokmil, kamera digital (1 unit), dan laptop (1 unit)	0 paket			820,050,000	0	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, serta peningkatan SDM penyelenggara/penyedia barang/jasa	0 orang			381,150,000	0	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam									91,752,360	0		
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						Jumlah koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber dayaaAlam yang di laksanakan	0 Lingkup Koordinas	-	0	91,752,360	0	
4	01	04			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM									7,343,360,500	0		
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum									3,176,928,000	0		
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian						Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Terlaksananya kunjungan/ inspeksi KDH/ WKDH di dalam daerah	0 thn 0 thn	-	0	3,176,928,000	0	
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi									877,823,500	0		
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						Ranperda tentang Evaluasi Perangkat Daerah tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah tersusunnya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah	0 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	-	0	458,632,500	0	
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						tersusunnya dokumen standar pelayanan perangkat daerah	0 Dokumen			116,511,000	0	
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten tersusunnya laporan kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Tahun n	0 dokumen 0 dokumen			302,680,000	0	
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan									3,288,609,000	0		
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan						Jumlah pelayanan keprotokolan terhadap KDH/WKDH, 1 Unit Laptop, Camera 1 Unit	0 kali	-	0	1,500,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Jumlah dialog KDH/WKDH dengan masyarakat	0 kali			120,000,000	0	
4	01	04	2.03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan, Pemeliharaan Videotron 5 kali	0 dokumentasi			1,668,609,000	0	
										Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah	0 kali						
										Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa	0 kali						
										Jumlah Sarana Informasi kegiatan pimpinan serta pembangunan daerah							
TOTAL															58,861,498,365	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	02				SEKRETARIAT DPRD												43,623,819,435	0	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												20,687,929,695	0	
4	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan												14,278,265,220	0	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 18 orang pembayaran gaji, tunjangan, dan belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD ( 30 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn 18 orang	0 bulan 0 bulan 0 bulan	-	0	14,278,265,220	0			
4	02	01	2.03		Administrasi Umum												5,790,338,875	0	
4	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat	0 jenis	-	0	43,109,500	0			
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar	0 bulan			494,424,000	0			
4	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah jasa dan perlengkapan kantor	0 bulan			179,305,000	0			
4	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas	0 unit			114,995,000	0			
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan	0 bulan			1,574,478,840	0			
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan	0 bulan			70,181,830	0			
4	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 bulan			168,623,000	0			
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ATK	0 bulan			81,286,205	0			
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 bulan			193,011,750	0			
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi lsitrik penerangan kantor	0 bulan			288,217,800	0			
4	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah peralatan rumah tangga kantor	0 bulan			185,300,000	0			
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										358,610,000	0			
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makanan dan minuman tamu	0 bulan			125,132,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 kali			434,196,050	0	
4	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan gedung kantor	0 bulan			328,820,300	0	
4	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah mobiler kantor	0 bulan			266,145,300	0	
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	0 Bulan			492,592,800	0	
4	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Jumlah kendaraan pimpinan	0 unit			213,476,500	0	
4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional	0 unit			178,433,000	0	
4	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									599,325,600	0		
4	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Jumlah pakaian dinas	0 jenis	-	0	246,885,000	0	
4	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	0 kali			352,440,600	0	
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN									611,833,000	0		
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD									461,833,000	0		
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD						Jumlah rapat alat kelengkapan	0 kali	-	0	461,833,000	0	
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									150,000,000	0		
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD						Jumlah tunjangan perumahan	0 orang	-	0	150,000,000	0	
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									22,324,056,740	0		
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD									5,284,102,000	0		
4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						Jumlah ranperda yang mendapat persetujuan menjadi Perda	0 perda	-	0	5,284,102,000	0	
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									3,140,351,040	0		
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD						Jumlah Bimtek Anggota DPRD	0 kali	-	0	2,724,384,150	0	
4	02	03	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						Jumlah tenaga ahli	0 orang			415,966,890	0	
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									13,290,751,500	0		
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah						Jumlah kunjungan kerja	0 kali	-	0	12,233,942,000	0	
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses						Jumlah aspirasi ke Dapilnya	0 kali			1,056,809,500	0	
4	02	03	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah									608,852,200	0		
4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						Jumlah publikasi kegiatan DPRD	0 kecamatan	-	0	608,852,200	0	
TOTAL															43,623,819,435	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN											8,553,326,973	0	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											2,004,108,386	0	
5	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	0	0		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											40,000,000	0	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	20,000,000	0		
5	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	
5	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	0 dokumen	-	0	0	0		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											40,000,000	0	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	0 dokumen	-	0	20,000,000	0		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,059,367,140	0	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (26 orang)	0 bulan	-	0	3,049,367,140	0		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan											0	0	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (26 orang)	0 bulan	-	0	0	0		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,059,367,140	0	
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	0 dokumen	-	0	10,000,000	0		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan											0	0	
5	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	0 dokumen	-	0	0	0		
5	01	01	2.03		Administrasi Umum											1,947,605,261	0	
5	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan jasa surat menyurat	0 bulan	-	0	0	0		
5	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	0 bulan			0	0		
5	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	0 Bulan			0	0		
5	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						adm keuangan	0 bulan			674,322,075	0		
5	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Pembeliaan Alat-alat kebersihan kantor	0 Bulan			15,000,000	0		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 komputer	0 Bulan			16,978,500	0	
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Pembelian Peralatan Alat Tulis Kantor	0 Bulan			87,294,186	0	
5	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	0 Bulan			39,359,250	0	
5	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	0 Bulan			7,500,000	0	
5	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan 3 laptop, 2 infocus,3 printer, scaner , 3 AC, 1 paket CCTV	0 Paket			109,000,000	0	
5	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (tabung gas, air galon, dsb)	0 Paket			19,955,250	0	
5	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Bulan			4,630,500	0	
5	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makan minum rapat dan tamu	0 Bulan			41,013,000	0	
5	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	0 Bulan			420,052,500	0	
5	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya pengadaan kendaraan dinas roda 2 Tersedianya pengadaan kendaraan dinas roda 4	0 unit 0 Unit			328,750,000	0	
5	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Pemeliharaan kendaraan jabatan Inova BA 15 V	0 unit			15,000,000	0	
5	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional L300 BA 1847 VC Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) Pemeliharaan kendaraan operasional Isuzu Phanter BA 1930 VL	0 unit 0 unit 0 Unit			58,500,000	0	
5	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						Rehabilitasi gedung kantor Bappeda	0 Paket			110,250,000	0	
5	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										56,503,125	0	
5	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	0 Bulan	-	0	56,503,125	0	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										224,090,000	0	

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah**  
**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan jasa surat menyurat	0 bulan	-	0	8,000,000	0	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	0 bulan			216,090,000	0	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										8,441,875	0	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	0 Bulan	-	0	8,441,875	0	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										3,707,195,017	0	
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah										3,530,695,017	0	
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota						Bimtek penyusunan dokumen perencanaan tingkat PD(Renstra dan Renja PD) Jumlah dokumen RPJMD ditetapkan melalui perda Jumlah rancangan dokumen RPJMD tersusun pelaksanaan Musrenbang RPJMD Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan Terlaksananya Musrenbang RKPD	0 Kegiatan 0 Perda 0 Dokumen 0 Paket 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Kegiatan	-	0	3,021,898,692	0	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan						Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)	0 Kegiatan			200,000,000	0	
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah						Tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan tersedianya dokumen gini rasio	0 OPD 0 Dokumen			308,796,325	0	
5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah										40,000,000	0	
5	01	02	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah						Penyusunan KUA/PPAS 2022 dan KUPA/PPASP 2021 P Updating dan informasi Dana Alokasi Khusus	0 Dokumen 0 Laporan	-	0	40,000,000	0	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah										136,500,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah						Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	0 Laporan	-	0	57,750,000	0	
5	01	02	2.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah						Tersedianya profil daerah	0 Dokumen			78,750,000	0	
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA									1,092,269,050	0		
5	01	03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan									606,019,050	0		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan						Tersedianya dokumen grand design kependudukan	0 Dokumen	-	0	420,000,000	0	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan						Perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang sosial budaya	0 Laporan			186,019,050	0	
5	01	03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia									106,785,000	0		
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia						Tersedianya dokumen pembinaan kegiatan Suku Anak Dalam (SAD)	0 Laporan	-	0	47,250,000	0	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia						Teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD	0 Laporan			59,535,000	0	
5	01	03	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat									379,465,000	0		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat						Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah	0 Laporan 0 Laporan	-	0	300,715,000	0	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat						Fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian sosial budaya	0 Laporan			78,750,000	0	
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM									590,000,000	0		
5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian									590,000,000	0		
5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian						Penyusunan Profil Investasi Tersedianya buku nilai tukar petani	0 Dokumen 0 Dokumen	-	0	500,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian						perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang ekonomi	0 Persen			90,000,000	0	
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN									1,159,754,520	0		
5	01	05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup									325,662,110	0		
5					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup						Perencanaan Pembangunan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Terpetakannya kondisi dan permasalahan AMPL Kabupaten Dharmasraya Tersedianya database pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal access dan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)	0 Tahun 0 Kecamatan 0 Tahun	-	0	325,662,110	0	
5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan									834,092,410	0		
5					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan						Penetapan Perda RDTR, Renko IKK, Tersedianya informasi geospasial daerah Tersusunnya dokumen kajian pengembangan kawaan strategis / cepat tumbuh di Kabupaten Dharmasraya	0 Lokasi 0 Nagari 0 Paket	-	0	710,000,000	0	
5					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan						Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya Pengendalian dan evaluasi penataan ruang	0 Jorong 0 Tahun			124,092,410	0	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									240,000,000	0		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									240,000,000	0		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									140,000,000	0		
5					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah	0 Persen	-	0	80,000,000	0	
5					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						Terlaksananya Rakor Litbang	0 Kali			60,000,000	0	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi									100,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					Terlaksana inovasi daerah	0 Tahun	-	0	100,000,000	0		
TOTAL															12,125,225,988	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN													7,245,099,303	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													3,065,658,300	0	
5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	0	0				
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,000,000	0	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen renstra dan renja	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													19,228,271,787	0	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 46 orang (14 bulan), danBelanja luran Jaminan Kesehatan PNS/PPPK, Kecelakaan Kerja ASN/PNS, Kecelakaan Kerja PPPK, Kematian ASN/PNS/PPPK (1 tahun) terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 46 orang	0 tahun 0 bulan	-	0	19,228,271,787	0				
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan													0	0	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 46 orang (14 bulan), danBelanja luran Jaminan Kesehatan PNS/PPPK, Kecelakaan Kerja ASN/PNS, Kecelakaan Kerja PPPK, Kematian ASN/PNS/PPPK (1 tahun) terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 46 orang	0 tahun 0 bulan	-	0	0	0				
5	02	01	2.03		Administrasi Umum													2,915,658,300	0	
5	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Surat Yang dikirim	0 kali	-	0	1,800,000	0				
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pelayanan Jasa Komunikasi Pelayanan Jasa Listrik	0 bulan			241,200,000	0				
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya	0 unit			15,000,000	0				
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Pelayanan Jasa honorarium pengelola keuangan	0 bulan			825,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Pelayanan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	0 bulan			63,940,000	0		
5	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Pelayanan Jasa Service peralatan kantor	0 bulan			64,600,000	0		
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Pelayanan jasa alat tulis yang tersedia	0 bulan			167,533,000	0		
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Pelayanan Jasa pengadaan dan cetak	0 bulan			246,305,300	0		
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Pelayanan Jasa pengadaan dan cetakan	0 bulan			30,280,000	0		
5	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	0 bulan			15,000,000	0		
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jenis bacaan yang tersedia	0 bulan			5,000,000	0		
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Pelayanan Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu	0 bulan			95,000,000	0		
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan	0 bulan			450,000,000	0		
5	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan kantor	0 unit			150,000,000	0		
5	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						penyediaan mebeleur kantor	0 unit			100,000,000	0		
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Pelayanan pemeliharaan gedung kantor	0 unit			95,000,000	0		
5	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan (Kepala Badan)	0 unit			20,000,000	0		
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 unit			180,000,000	0		
5	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						jumlah gedung yg di bangun	0 unit			150,000,000	0		
5	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											150,000,000	0	
5	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						jumlah pegawai yg mengikuti bimtek	0 orang	-	0	150,000,000	0		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											550,000,000	0	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											550,000,000	0	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2022	0 dokumen	-	0	300,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1,924,510,003	0	
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS						Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2022	0 dokumen	-	0	0	0	
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						Penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2021	0 dokumen			0	0	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										550,000,000	0	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						Penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2021	0 dokumen	-	0	250,000,000	0	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1,924,510,003	0	
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD						Jumlah review RKA dan Peubahan RKA	0 laporan	-	0	192,941,667	0	
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD						Review DPA dan Perubahan DPA	0 laporan			192,941,667	0	
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD						jumlah perda dan perbup APBD Jumlah perda dan Perbup APBD	0 dokumen 0 dokumen			771,766,667	0	
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD						Jumlah perda dan perbup Perubahan APBD	0 dokumen			101,476,667	0	
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD						jumlah perbup teknis penyusunan APBD	0 dokumen			101,476,667	0	
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran						Jumlah Laporan Analisa APBD jumlah regulasi anggaran Pelayanan Jasa penatausahaan perbendaharaan	0 dokumen 0 dokumen 0 bulan			259,476,667	0	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						jumlah laporan anggaran	0 dokumen			101,476,667	0	
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						jumlah laporan belanja daerah	0 laporan			101,476,667	0	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						jumlah laporan anggaran pembiayaan	0 laporan			101,476,667	0	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										95,000,000	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP						Jumlah Penerbitan SKPP Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung	0 lembar	-	0	95,000,000	0	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										428,132,350	0	
5	02	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Jumlah dokumen kebijakan akuntansi Jumlah perda dan Perbup pertanggungjawaban APBD	0 dokumen 0 dokumen	-	0	196,132,350	0	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						Jumlah laporan semesteran	0 dokumen			67,000,000	0	
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah						Jumlah dokumen LKPD	0 dokumen			165,000,000	0	
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan										100,659,000	0	
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus						Persentase penyaluran belanja PPKD	0 persentase	-	0	100,659,000	0	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										614,907,150	0	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah										614,907,150	0	
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang						Penyusunan Standar Satuan Harga	0 dokumen	-	0	175,000,000	0	
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						Jumlah RKBMD Pengadaan	0 dokumen			24,417,950	0	
5	02	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah						jumlah RKBMD pemeliharaan	0 dokumen			24,417,950	0	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Penatausahaan	0 dokumen			55,000,000	0	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah						jumlah dokumen inventarisasi BMD	0 dokumen			55,000,000	0	
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah						jumlah BMD yg teramanakan	0 persen			55,000,000	0	
5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah						Jumlah dokumen hasil proses penilaian aset	0 dokumen			55,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah						Jumlah dokumen hasil proses penghapusan aset	0 dokumen			34,214,250	0	
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah						jumlah dokumen hasil proses pindah tangan aset	0 dokumen			34,214,250	0	
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						jumlah laporan BMD	0 dokumen			34,214,250	0	
5	02	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD						laporan rekonsiliasi semester I dan II	0 dokumen			34,214,250	0	
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah						jumlah pembinaan pengelolaan BMD	0 kali			34,214,250	0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									1,016,232,500	0		
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah									1,016,232,500	0		
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Jenis pajak dan retribusi Jumlah dokumen Produk hukum pajak dan retribusi daerah	0 dokumen 0 dokumen	-	0	271,150,000	0	
5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Penindakan papan reklame Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak Pengendalian dan pengawasan PJU Validasi data BPHTB	0 bulan			182,257,500	0	
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi						Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	0 dokumen			39,325,000	0	
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Peningkatan SDM berbasis IT dan pengembangan server termasuk pemeliharaan server	0 orang			523,500,000	0	
TOTAL															27,043,371,090	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN												7,012,975,852	0	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												5,483,639,840	0	
5	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan												4,439,500,000	0	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 46 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 46 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	4,439,500,000	0			
5	03	01	2.03		Administrasi Umum												1,024,139,840	0	
5	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran materai, surat menyurat	0 Tahun	-	0	9,900,000	0			
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	0 Tahun			80,000,000	0			
5	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	0 UNIT			2,880,000	0			
5	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Honor PA, Bendahara, honor bendahara barang,honor PPTK honor penjaga malam, honor petugas K3	0 Tahun			372,336,000	0			
5	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Pembelian sapu, sabun dan alat pendukung lainnya	0 ORANG			9,266,400	0			
5	03	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 komputer	0 Tahun			15,600,000	0			
5	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	0 Tahun			50,580,000	0			
5	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	0 Tahun			30,361,440	0			
5	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	0 Tahun			34,824,000	0			
5	03	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Pengadaan Sound system, karpet dan kipas angin	0 UNIT			35,000,000	0			
5	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan minum rapat dan tamu	0 Tahun			25,392,000	0			
5	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	0 Tahun			250,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						pengadaan kendaraan operasional roda 2	0 unit			40,000,000	0	
5	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						pemeliharaan kendaraan operasional (1 mobil dan 7 motor) pemeliharaan rutin mobil jabatan	0 unit 0 unit			68,000,000	0	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										1,529,336,012	0	
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN										74,064,000	0	
5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						Jumlah dokumen Simpeg	0 DOKUMEN	-	0	54,924,000	0	
5	03	02	2.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian						Jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi kepegawaian	0 ORANG			19,140,000	0	
5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian										764,362,000	0	
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN						Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan pelaksanaan ujian penerimaan CPNS	0 DOKUMEN 0 kegiatan	-	0	427,762,000	0	
5	03	02	2.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan						Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat	0 ORANG			100,000,000	0	
5	03	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun						Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiunnya	0 ORANG			36,600,000	0	
5	03	02	2.02	08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN						Terseleksinya Pejabat Eselon II,Terlaksananya pelantikan pejabat eselon dan fungsional tertentu, Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS	0 ORANG			200,000,000	0	
5	03	02	2.03		Peningkatan Kapastitas ASN										626,632,012	0	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN						Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	0 ORANG 0 ORANG	-	0	411,672,012	0	
5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN						Jumlah dokumen SKP PNS	0 dokumen			25,000,000	0	
5	03	02	2.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	0 ORANG			180,960,000	0	
5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	0 ORANG			9,000,000	0	
5	03	02	2.05		Pembinaan ASN										64,278,000	0	
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diproses	0 ORANG	-	0	38,790,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan						Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan	0 ORANG			25,488,000	0	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									2,187,392,000	0		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									2,187,392,000	0		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									2,187,392,000	0		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjurangan Struktural	0 ORANG 0 orang	-	0	2,187,392,000	0	
TOTAL															9,200,367,852	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01				INSPEKTORAT DAERAH													10,338,082,000	0	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													6,065,082,000	0	
6	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,000,000	0	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0				
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													3,345,482,000	0	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan ASN 28 orang pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 28 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	3,345,482,000	0				
6	01	01	2.03		Administrasi Umum													2,699,600,000	0	
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tertanganinya surat menyurat	0 bulan	-	0	15,000,000	0				
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor	0 bulan			180,000,000	0				
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	0 bulan			11,000,000	0				
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	0 kegiatan			450,000,000	0				
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga	0 bulan			90,000,000	0				
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya ATK	0 Jenis			80,000,000	0				
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	0 Jenis			20,000,000	0				
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya peralatan listrik	0 Jenis			30,000,000	0				
6	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0 Jenis			150,000,000	0				
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah bahan bacaan yang tersedia	0 Tahun			3,600,000	0				
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu	0 Tahun			75,000,000	0				
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	0 Laporan			300,000,000	0				
6	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Kendaraan dinas	0 Unit			300,000,000	0				
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya mebeleur	0 Unit			200,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Kendaraan dinas dalam kondisi baik	0 Unit			295,000,000	0	
6	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						Gedung kantor yang terpelihara	0 Unit			500,000,000	0	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									3,406,000,000	0		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal									3,406,000,000	0		
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan						Jumlah Kasus yang tertangani Jumlah LHP Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	0 Laporan 0 LHP 0 LHP	-	0	1,780,000,000	0	
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan						Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Laporan Telaah sejawat dan peningkatan kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP	0 Laporan 0 Orang 0 Laporan			865,000,000	0	
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan						Jumlah kasus pungli yang tertangani Jumlah laporan Monitoring Terlaksananya PMPRB di Lingkungan Pemda Dharmasraya	0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan			310,000,000	0	
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan						Jumlah aksi RAD PPK yang direviu Jumlah laporan aduan Gratifikasi Jumlah laporan laporan valuasi berkala temuan hasil pemeriksaan Jumlah Rakorwas dan Gelar Pengawasan Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	0 Aksi 0 Laporan 0 Laporan 0 Kali 0 Kali			451,000,000	0	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									867,000,000	0		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan									867,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						Dokumen PKPT Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah laporan sosialisasi anti korupsi Jumlah Nagari yang dbimbing dan bina level maturitas SPIP	0 Dokumen 0 Orang 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan	-	0	867,000,000	0	
TOTAL															10,338,082,000	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													2,308,154,200	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													2,242,070,400	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1,491,583,000	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn pembayaran tambahan penghasilan asn 14 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,491,583,000	0				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													678,487,400	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan penerangan kantor	0 bulan	-	0	8,616,000	0				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	0 unit			5,000,000	0				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	0 bulan			219,530,000	0				
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya peralatan kebersihan kantor	0 bulan			5,600,000	0				
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya peralatan siap pakai	0 unit			5,100,000	0				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 bulan			37,180,700	0				
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	0 lembar			10,314,200	0				
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	0 bulan			1,391,500	0				
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						penyediaan laptop (2 unit), komputer AIO (1 unit) dan infokus (1 unit)	0 unit			55,000,000	0				
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Tersedianyan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	0 bulan			3,000,000	0				
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya Makan minum rapat	0 bulan			95,000,000	0				
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	0 bulan			191,755,000	0				
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Jabatan	0 unit			20,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 unit			21,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										62,000,000	0	
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Tersedianya Pakaian Dinas ASN	0 stel	-	0	18,000,000	0	
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Tersedianya Pakaian HUTRI	0 stel			35,000,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						jumlah personil /PNS yang mengikuti pelatihan	0 kali			9,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										18,000,000	0	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										18,000,000	0	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						Pelayanan perizinan	0 bulan	-	0	9,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						Pelayanan non perizinan	0 bulan			9,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										12,083,800	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										12,083,800	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Terlaksananya Musrembang Kecamatan	0 kali	-	0	12,083,800	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										18,000,000	0	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										18,000,000	0	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	0 bulan	-	0	18,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										18,000,000	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										18,000,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari	0 nagari	-	0	18,000,000	0	
TOTAL															2,308,154,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												2,987,014,170	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												2,918,514,170	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												2,095,947,870	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 20 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 20 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	2,095,947,870	0			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum												787,566,300	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	0 bulan	-	0	12,000,000	0			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	0 unit			2,000,000	0			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	0 bulan			160,000,000	0			
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	0 bulan			3,866,000	0			
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 unit			7,967,000	0			
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan ATK	0 bulan			18,607,500	0			
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	0 Jenis			9,505,800	0			
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 jenis			3,020,000	0			
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 jenis			130,000,000	0			
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 jenis			5,000,000	0			
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan dan Minuman	0 bulan			36,600,000	0			
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	0 bulan			200,000,000	0			
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan yang diadakan	0 unit			38,000,000	0			
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Moblier yang diadakan	0 unit			18,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			123,000,000	0	
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	0 unit			10,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			10,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									35,000,000	0		
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	0 orang	-	0	25,000,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0 orang			10,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									20,000,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									20,000,000	0		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						jumlah layanan perizinan	0 tahun	-	0	10,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						Jumlah layanan non perizinan	0 tahun			10,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									15,000,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									15,000,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 kali	-	0	15,000,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									13,500,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									13,500,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturnya kecamatan	0 tahun	-	0	13,500,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									20,000,000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									20,000,000	0		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 nagari	-	0	20,000,000	0	
TOTAL															2,987,014,170	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													2,311,483,840	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													2,282,483,840	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1,748,851,840	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 17 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 17 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,748,851,840	0				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													513,632,000	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terbayarnya Tagihan Listrik Kantor	0 Bulan	-	0	8,400,000	0				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Terbayarnya pajak kendaraan roda empat dan roda dua	0 Unit			1,900,000	0				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Terbayarnya honorarium ASN dan Non ASN dan jasa transaksi keuangan	0 Bulan			231,265,000	0				
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Pembelian alat-alat kebersihan kantor	0 Jenis			4,690,000	0				
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya pembayaran jasa servis peralatan Kantor	0 Jenis			6,300,000	0				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	0 Jenis			17,042,000	0				
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						tersedianya biaya cetak, fotokopi, jilid dan penggandaan	0 Paket			6,842,000	0				
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya biaya pengadaan lampu,kabel dan pendukung lainnya	0 Jenis			2,800,000	0				
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya 1 Unit Laptop	0 Paket			12,000,000	0				
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan rumah tangga	0 Paket			1,000,000	0				
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya makan minum tamu, rapat PKK dan Kegiatan lainnya	0 Bulan			30,000,000	0				
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0 Bulan			151,393,000	0				
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Pengadaan Kendaraan dinas roda dua	0 Unit			20,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Rehab ringan gedung kantor	0 Paket			5,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Servis kendaraan roda 4 dan roda 2 kantor	0 Unit			15,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									10,000,000	0		
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Tersedianya pakaian olahraga Paskibra	0 Paket	-	0	10,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									4,000,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									4,000,000	0		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						Jumlah layan perizinan dan non perizinan	0 Bulan	-	0	4,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									15,000,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									15,000,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Persentase hasil Musrembang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 Kali	-	0	15,000,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									6,000,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									6,000,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadianrantibum yang ditangani aparaturn kecamatan	0 Bulan	-	0	6,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									4,000,000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									4,000,000	0		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 Nagari	-	0	4,000,000	0	
TOTAL															2,311,483,840	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												2,269,066,126	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												2,235,066,126	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												1,593,699,826	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 15 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 15 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,593,699,826	0			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum												594,366,300	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	0 Bulan	-	0	20,000,000	0			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	0 unit			2,000,000	0			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	0 bulan			170,000,000	0			
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	0 Bulan			3,866,000	0			
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 unit			7,967,000	0			
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan ATK	0 bulan			18,407,500	0			
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	0 jenis			9,505,800	0			
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 jenis			3,020,000	0			
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 jenis			40,000,000	0			
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan dan Minuman	0 bulan			36,600,000	0			
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	0 bulan			210,000,000	0			
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Moblier yang diadakan	0 unit			18,000,000	0			
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			40,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Kendaraan jabatan yang dipelihara	0 unit			6,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			9,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									27,000,000	0		
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	0 orang	-	0	22,000,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0 orang			5,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									10,000,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									10,000,000	0		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						Jumlah pelayanan perizinan	0 tahun	-	0	5,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						jumlah layanan non perizinan	0 tahun			5,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									14,500,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									14,500,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 kali	-	0	14,500,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									5,500,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									5,500,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturnya kecamatan	0 persen	-	0	5,500,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									4,000,000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									4,000,000	0		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 nagari	-	0	4,000,000	0	
TOTAL															2,269,066,126	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											2,110,206,720	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											2,078,674,220	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan											1,516,364,770	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 14 orang	0 bulan	-	0	1,516,364,770	0		
7	01	01	2.03		Administrasi Umum											523,589,450	0	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan jasa surat menyurat	0 lembar	-	0	1,590,000	0		
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 bulan			7,200,000	0		
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	0 Unit			3,450,000	0		
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Penyediaan jasa administrasi keuangan	0 bulan			162,180,000	0		
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	0 tahun			2,000,000	0		
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 Unit			7,150,000	0		
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan ATK	0 bulan			18,253,250	0		
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	0 bulan			13,120,000	0		
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 bulan			2,292,500	0		
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 Unit			17,500,000	0		
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 bulan			5,000,000	0		
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan dan Minuman	0 bulan			25,120,000	0		
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	0 bulan			159,606,500	0		
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan yang diadakan	0 Unit			17,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Moblier yang diadakan	0 unit			20,000,000	0	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			10,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			52,127,200	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									28,720,000	0		
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	0 stel	-	0	28,720,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									6,010,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									6,010,000	0		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						jumlah layanan non perizinan dan perizonan	0 tahun	-	0	6,010,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									12,585,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									12,585,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 kali	-	0	12,585,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									6,865,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									6,865,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturnya kecamatan	0 tahun1	-	0	6,865,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									6,072,500	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									6,072,500	0		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 Nagari	-	0	6,072,500	0	
TOTAL															2,110,206,720	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												2,051,351,586	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												1,929,351,586	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												1,220,114,886	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 12 orang pembayaran tambahan oenghasilan asn 12 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,220,114,886	0			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum												664,216,700	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	0 bulan	-	0	4,356,000	0			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	0 unit			2,600,000	0			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	0 bulan			190,369,300	0			
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	0 bulan			3,124,200	0			
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 unit			5,257,450	0			
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan ATK	0 bulan			18,159,450	0			
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	0 jenis			7,526,200	0			
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 jenis			3,224,650	0			
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 jenis			32,428,000	0			
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 jenis			2,609,900	0			
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan dan Minuman	0 bulan			36,971,550	0			
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat dan Koordinasi dan konsultasi	0 bulan			219,590,000	0			
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan yang diadakan	0 unit			40,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Moblier yang diadakan	0 jenis			32,000,000	0	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			45,000,000	0	
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	0 unit			15,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	0 unit			6,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									35,020,000	0		
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	0 orang	-	0	20,020,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0 orang			15,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									50,000,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									50,000,000	0		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						jumlah layanan perizinan	0 tahun	-	0	25,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						jumlah layanan non perizinan	0 bulan			25,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									24,500,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									24,500,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 kali	-	0	24,500,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									22,500,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									22,500,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturnya kecamatan	0 tahun	-	0	22,500,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									25,000,000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									25,000,000	0		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 nagari	-	0	25,000,000	0	
TOTAL															2,051,351,586	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												1,951,902,210	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												1,919,402,210	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												1,302,202,210	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 12 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 12 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,302,202,210	0			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum												587,200,000	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Tagihan Listrik	0 Bulan	-	0	10,500,000	0			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	0 Unit			1,700,000	0			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Honorium PNS dan Non PNS, Jasa kantor, jasa transaksi keuangan, jasa pekerja	0 bulan			180,500,000	0			
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						pembelian alat-alat Kebersihan Kantor Seperti Sapu dan Kain pel dan sejenis lainnya	0 Jenis			5,000,000	0			
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						jasa perbaikan laptop 7 unit, as 1 unit	0 unit			10,000,000	0			
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	0 Jenis			21,500,000	0			
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						cetak, foto kopi, jilid/penggandaan	0 Paket			7,500,000	0			
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	0 Jenis			5,000,000	0			
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 Laptop, komputer all in one 2	0 Paket			25,000,000	0			
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan bahan Pembersih	0 Paket			3,500,000	0			
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan minum rapat tamu, PKK, Paskibra dan MTQ	0 Bulan			45,000,000	0			
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	0 Bulan			200,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target									
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Pengadaan 1 roda dua	0 Unit			20,000,000	0	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Rehab gedung kantor camat	0 Paket			30,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Servis motor 8 unit, roda 4 1 unit, dan BBM	0 Mobil			22,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										20,000,000	0	
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Pakaian Olahraga paskibra	0 Paket	-	0	20,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,000,000	0	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										4,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						jumlah layanan non perizinan dan perizinan	0 Laporan	-	0	4,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										15,000,000	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										15,000,000	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 Kali	-	0	15,000,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										6,000,000	0	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										6,000,000	0	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan	0 Bulan	-	0	6,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										7,500,000	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										7,500,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 Paket	-	0	7,500,000	0	
TOTAL															1,951,902,210	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													2,004,507,223	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													1,963,507,223	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1,202,869,675	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 10 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 10 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,202,869,675	0				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													693,987,548	0	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Surat Masuk dan Keluar	0 Lembar	-	0	1,180,000	0				
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	0 Bulan			7,400,000	0				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak	0 Unit			2,310,000	0				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honorarium pelaksana administrasi Keuangan yang dibayarkan	0 Bulan			168,000,000	0				
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah pembayaran kebersihan kantor	0 Bulan			4,657,400	0				
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki	0 Unit			2,200,000	0				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	0 Bulan			21,451,650	0				
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	0 Jenis			10,450,000	0				
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	0 Jenis			2,112,000	0				
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	0 Jenis			14,300,000	0				
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan dan Minuman	0 Orang			67,026,498	0				
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	0 Bulan			220,000,000	0				
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pengadaan kendaran dinas Roda Dua yang sesuai spesifikasi	0 Unit			37,400,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang tersedia	0 Jenis			55,000,000	0	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah mebeleur yang tersedia	0 Unit			22,000,000	0	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	0 Unit			20,000,000	0	
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Jumlah kendaraan Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	0 Unit			25,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 unit			13,500,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									56,650,000	0		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	0 stel	-	0	38,500,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror Daerah, PTT serta pakaian paskibra	0 Stel			18,150,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									9,500,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									9,500,000	0		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						Jumlah Rekomentasi Tentang Perizinan	0 tahun	-	0	4,500,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						Jumlah pelayanan non perizinan	0 tahun			5,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									12,000,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									12,000,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Persentase Musrenbang Kecamatan yang ditampung dalam RKPD	0 Persen	-	0	12,000,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									8,500,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									8,500,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian gangguan Trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	0 Kali	-	0	8,500,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									11,000,000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									11,000,000	0		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	0 Kali	-	0	11,000,000	0	
TOTAL															2,004,507,223	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													2,180,023,154	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													2,142,023,154	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1,411,253,794	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan ASN 14 orang Pembayaran TPP ASN	0 bulan 0 bulan	-	0	1,411,253,794	0				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													688,769,360	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Tagihan Listrik dan Pulsa HP	0 Bulan	-	0	4,200,000	0				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	0 unit			2,000,000	0				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Honorium PNS dan Non PNS, Jasa kantor, jasa transaksi keuangan, jasa pekerja dan Pengadaan Meterai dan Benda pos Lainnya	0 bulan			181,500,000	0				
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						pembelian alat-alat Kebersihan Kantor Seperti Sapu dan Kain pel dan sejenis lainnya	0 jenis			3,000,000	0				
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Servis printer 2 unit, laptop 8 unit, AC 1 unit, mesin potong rumput 1 unit, Genset 1 unit, mesin tek 1 unit	0 jenis			6,600,000	0				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	0 bulan			16,000,000	0				
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						cetak, foto kopi, jilid/penggandaan	0 paket			12,000,000	0				
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	0 jenis			2,600,000	0				
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Laptop 2 unit dan printer 1 unit, AC 1 unit, Infocus 1 unit, sound sistem 1 unit	0 unit			75,000,000	0				
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan bahan Pembersih	0 paket			2,000,000	0				
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makan minum rapat, tamu, PKK, Paskibra	0 bulan			57,480,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	0 bulan			187,889,360	0	
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Pengadaan 1 roda dua	0 unit			50,000,000	0	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Pengadaan Tempat tidur,Gorden,Karpet,Lemari Pakaian dan Lemari Sambal	0 paket			15,500,000	0	
7	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan						perbaikan rumah jabatan camat	0 unit			16,000,000	0	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Rehab gedung kantor camat	0 paket			40,000,000	0	
7	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						pemeliharaan kendaraan jabatan	0 unit			5,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						pemeliharaan kendaraan operasional (motor 4 unit)	0 unit			12,000,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									32,000,000	0		
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Pakaian latihan / perlengkapan paskibra	0 paket	-	0	28,000,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Telaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 paket			4,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									20,000,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									20,000,000	0		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						jumlah layanan perizinan	0 tahun	-	0	10,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						jumlah layanan non perizinan	0 tahun			10,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									8,000,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									8,000,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 kali	-	0	8,000,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									5,000,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									5,000,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						trantibun yang ditangani aparaturnya kecamatan	0 tahun	-	0	5,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									5,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										5,000,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan nagari	0 nagari	-	0	5,000,000	0		
TOTAL															2,180,023,154	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN											1,858,304,076	0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											1,824,604,076	0			
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	0			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan											1,245,046,576	0			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn 11 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 11 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,245,046,576	0				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum											545,557,500	0			
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan jasa surat menyurat	0 lembar	-	0	3,000,000	0				
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah pembayaran Jasa penerangan Kantor	0 bulan			3,500,000	0				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	0 unit			1,800,000	0				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Penyediaan jasa administrasi keuangan	0 orang			145,000,000	0				
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0 unit			3,100,000	0				
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	0 bulan			13,700,000	0				
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kantor	0 tahun			10,500,000	0				
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah jenis Komponen instalasi Listrik Kantor yang disediakan	0 buah			1,200,000	0				
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 unit			25,000,000	0				
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga	0 bulan			2,457,500	0				
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makan dan minuman	0 bungkus			25,000,000	0				
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	0 tahun			220,000,000	0				
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua yang sesuai spesifikasi	0 unit			19,000,000	0				
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Jumlah pengadaan mobeler sesuai spesifikasi	0 unit			25,000,000	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah gedung yang akan dilakukan pemeliharaan secara rutin	0 tahun			5,000,000	0	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			42,300,000	0	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									24,000,000	0		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Jumlah Pakaian seragam pegawai di Kecamatan	0 orang	-	0	19,000,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	0 tahun			5,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									5,700,000	0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									5,700,000	0		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	0 tahun	-	0	5,700,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									15,000,000	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									15,000,000	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Persentase daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD	0 kali	-	0	15,000,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									5,000,000	0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada									5,000,000	0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian gangguan trantibun yang ditangani aparatur kecamatan	0 tahun	-	0	5,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									8,000,000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									8,000,000	0		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll)	0 nagari	-	0	8,000,000	0	
TOTAL															1,858,304,076	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											2,093,763,870	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											2,050,763,870	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	10,000,000	0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan											1,354,863,870	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembahyaran tambahan oenghasilan asn 12 orang pembayaran gaji dan tunjuangan asn 12 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	1,354,863,870	0		
7	01	01	2.03		Administrasi Umum											658,900,000	0	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	0 bulan	-	0	23,000,000	0		
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	0 unit			2,000,000	0		
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	0 bulan			210,000,000	0		
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 unit			7,967,000	0		
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	0 bulan			3,833,000	0		
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah ketersediaan ATK	0 bulan			27,500,000	0		
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	0 jenis			14,000,000	0		
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 jenis			4,800,000	0		
7	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	0 jenis			54,000,000	0		
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Makan dan Minuman	0 bulan			36,800,000	0		
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Jumlah Rapat dan Koordinasi dan konsultasi	0 bulan			245,000,000	0		
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 unit			20,000,000	0		
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	0 unit			10,000,000	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021																	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang																	
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										27,000,000	0	
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	0 orang	-	0	22,000,000	0	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0 orang			5,000,000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										10,000,000	0	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										10,000,000	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan						jumlah layanan non perizinan dan perizinan	0 bulan	-	0	10,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										14,500,000	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										14,500,000	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	0 kali	-	0	14,500,000	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										10,500,000	0	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										10,500,000	0	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparaturnya kecamatan	0 bulan	-	0	10,500,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										8,000,000	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										8,000,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	0 nagari	-	0	8,000,000	0	
TOTAL															2,093,763,870	0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												1,981,993,660	0	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												1,416,993,660	0	
8	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Penyusunan Renstra PD	0 dokumen	-	0	20,000,000	0			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												786,993,660	0	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						pembayaran gaji dan tunjangan asn (8 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn 8 orang	0 bulan 0 bulan	-	0	786,993,660	0			
8	01	01	2.03		Administrasi Umum												610,000,000	0	
8	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 bulan	-	0	3,000,000	0			
8	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 bulan			30,000,000	0			
8	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	0 unit			2,000,000	0			
8	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	0 bulan			183,500,000	0			
8	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0 unit			10,000,000	0			
8	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 bulan			35,000,000	0			
8	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 bulan			60,000,000	0			
8	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	0 bulan			4,000,000	0			
8	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya Komputer PC 1 Buah , printer 1 Buah , 1 AC	0 unit			31,890,000	0			
8	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0 bulan			12,000,000	0			
8	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya Makanan dan Minuman	0 bulan			24,000,000	0			
8	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.	0 bulan			136,500,000	0			
8	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya , Meja Resepsionis 1 Buah, Filling Kabinet 1 Buah, Lemari Arsip	0 tahun			15,000,000	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	0 tahun			30,000,000	0	
8	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional (1 Mobil,2 Motor)	0 bulan			33,110,000	0	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									70,000,000	0		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									70,000,000	0		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Terlaksananya fasilitasi rapat-rapat koordinasi Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda	0 orang 0 orang	-	0	70,000,000	0	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									175,000,000	0		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									175,000,000	0		
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Terlaksananya pelatihan administrasi Partai politik dan masyarakat	0 orang	-	0	73,168,500	0	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						Meningkatnya Pengetahuan Peraturan-peraturan bidang Politik	0 orang			34,304,500	0	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu	0 kali			26,723,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan						Jumlah Orang yang mengikuti seminar diskusi peningkatan pendidikan politik	0 orang			40,804,000	0	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									241,830,550	0		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									241,830,550	0		
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah Masyarakat yang diberikan Penyuluhan	0 orang	-	0	30,160,000	0	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah penyuluhan yang dilakukan	0 kali			49,601,550	0	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah koordinasi yang dilakukan	0 kali			162,069,000	0	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									78,169,450	0		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									78,169,450	0		
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Jumlah pemantauan yang dilakukan	0 kali	-	0	33,662,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Jumlah FKDM yang terbentuk	0 orang			44,506,950	0		
TOTAL															1,981,993,660	0	

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 6.1 :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2021</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,2
2	Angka Harapan Hidup	tahun	71,46
3	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,65
4	Harapan lama sekolah	tahun	13,24
5	persentase Ketersediaan Kalori dan Protein per kapita	persen	78,58
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	90,15
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	50,734
8	Persentase Nagari yang terkoneksi dengan jalan mantap	Persen	-
9	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	63,33
10	Rasio Rumah Layak Huni	persen	89,00
11	Akses Air Minum Layak	persen	30,08
12	Akses Sanitasi Layak	persen	42,91
13	Pertumbuhan PDRB	persen	2,00
14	PDRB Per Kapita	juta rupiah	42,00

No	Indikator	Satuan	2021
15	Persentase penduduk miskin	persen	5,62
16	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	29,00
17	Jumlah Koperasi Sehat	unit	30
18	Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	unit	40
19	Persentase IKM dengan peningkatan Omset	persen	6,5
20	Persentase Pasar dalam kondisi baik	persen	0,3
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	68,50
22	Indeks Kualitas Air	indeks	69,5
23	Indeks Kualitas Udara	indeks	87
24	Indeks Tutupan Lahan	indeks	51,5
25	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	indeks	B
26	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	persen	95
27	Opini BPK terhadap laporan keuangan	wtp/ wdp/ disclaimer	WTP
28	Hasil evaluasi AKIP	indeks	BB

No	Indikator	Satuan	2021
29	Nilai LPPD	skor, status, peringkat	3,3226 (tinggi) naik peringkat
30	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	11,54
31	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	unit	190



## 6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Dharmasraya tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 :

**TABEL 6.2**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	<b>Urusan pemerintahan wajib</b>		
<b>A</b>	<b>Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>		
<b>1</b>	<b>Bidang pendidikan</b>		
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,65
	Harapan lama sekolah	tahun	13,24
	APK PAUD	persen	67,07
	APK SD/MI	persen	108,61
	APK SMP/MTs	persen	90,93
	APM SD/MI	persen	100
	APM SMP/MTs	persen	78,33
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	101,1
	Angka mengulang di jenjang pendidikan SD/MI	persen	1,95
	Angka mengulang di jenjang pendidikan SMP/MTs	persen	0,18
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	100
<b>2</b>	<b>Bidang kesehatan</b>		
	<b>Dinas Kesehatan</b>		
	Angka Harapan Hidup	Indeks	71,46
	Prevalensi Gizi Buruk	persen	<5%
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	280
	Prevalensi stunting	persen	15
	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	22
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	20
	Persentase FKTP akreditasi Utama	persen	80
	Persentase Rumah Sakit akreditasi Utama	persen	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CDR)	persen	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Cakupan Pelayanan kesehatan Orang dengan terinfeksi HIV	persen	100
	cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat ( per 1.000 penduduk)	per 1.000 penduduk	100
	cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 tahun)	persen	100
	cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > 15 tahun)	persen	100
	Persentase Kejadian Luar Biasa yang ditangani kurang dari 24 jam	persen	100
	<b>Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sungai Dareh)</b>		
	Akreditasi rumah sakit	bobot	Pripurna
	Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	63,45
	Average Length of Stay (AVLOS)	persen	5,6
	Turn Over Internal (TOI)	persen	3
	Bed Turn Over (BTO)	persen	46
	Net Death Rate (NDR)	persen	0,005
	Gross Death Rate (GDR)	persen	0,023
<b>3</b>	<b>Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>		
	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	63,33
	Persentase Jalan yg dipelihara	persen	22,5
	Persentase Jembatan yg dipelihara	persen	23
	Persentase Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	persen	4
	Persentase Jembatan yang ditingkatkan kapasitasnya	persen	5
	Akses Air Minum Layak	persen	30,08
	Akses Sanitasi Layak	persen	42,91
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	61,58
	Cakupan Luas Sawah teraliri Jaringan Irigasi	persen	100
	Kesesuaian rencana penataan ruang dengan perencanaan pembangunan	Persen	96
	Cakupan permukiman layak huni	persen	85,85
	Cakupan rumah layak huni	persen	89
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	persen	80
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	persen	80
	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	persen	9
	Persentase permukiman yang tertata	persen	77
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	13
	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	100
<b>5</b>	<b>Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>		

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Persentase Cakupan Penegakan PERDA	persen	1
	Cakupan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	persen	1
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persen	288 kali
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	persen	1
6	<b>Bidang sosial.</b>		
	Persentase penduduk Miskin	persen	6
	Persentase PMKS yang tertangani	persen	93
B	<b>Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</b>		
1	<b>Bidang tenaga kerja</b>		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	1,65
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	68,29
2	<b>Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>		
	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	persen	76,47
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	persen	95,23
	Kota Layak Anak (KLA)	Point	450
	Rasio KDRT	persen	0,01
	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	0,12
	Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	persen	0,12
3	<b>Bidang pangan</b>		
	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Kkal/kapita/th	78,58
	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	ton	2
	Skor Pola Pangan Harapan (pph)	persen	90,3
4	<b>Bidang pertanahan</b>		
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	persen	78
	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	75
5	<b>Bidang lingkungan hidup</b>		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	bobot	68,50
	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	48
	Jumlah Kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	kawasan	22
	Jumlah kawasan sumber daya Lahan yang harus dilindungi	kawasan	6
	Persentase menurunnya lahan kritis	persen	1,00
6	<b>Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>		
	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	persen	100
	Persentase kepemilikan KTP-el	persen	100
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	70
	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	persen	92
	Jumlah pengurusan akta kematian	dokumen	1000

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Akurasi Data Base Kependudukan	persen	99
<b>7</b>	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa</b>		
	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	11,54
	Persentase nagari yang memanfaatkan sistem informasi	persen	92,31
	Persentase aplikasi profil desa yang dimanfaatkan dalam pembangunan nagari	persen	100
	Persentase BUMNag yang aktif	persen	100
	Persentase Kelompok PKK yang aktif	persen	100
	Persentase Strata Pasyandu yang aktif mandiri	persen	55,1
	Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan	persen	100
<b>8</b>	<b>Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>		
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,23
	angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)		84,1
	angka kebutuhan ker-KB tidak terlayani (unmet- need)		9,86
	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif		100
	Persentase kelompok tribina yang aktif		100
<b>9</b>	<b>Bidang perhubungan</b>		
	Jumlah kasus kecelakaan	kasus	58
	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	persen	100
	Persentase keterpasangan marka jalan	persen	100
	Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	kecamatan	5
	Jumlah trayek	izin	1
	Jumlah terminal	unit	1
	Jumlah fasilitas parkir umum	unit	10
	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	akreditasi	B
	Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	persen	90
<b>10</b>	<b>Bidang komunikasi dan informatika</b>		0
	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	persen	100
	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	persen	100
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	persen	100
	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	persen	100
<b>11</b>	<b>Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>		0
	Persentase Koperasi Aktif	unit	90
	Jumlah Koperasi Sehat	koperasi	30
	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	umkm	40
<b>12</b>	<b>Bidang penanaman modal</b>		

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Nilai realisasi Investasi	rupiah	173.783.422
	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	perusahaan	72
	Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)	hari	14
<b>13</b>	<b>Bidang kepemudaan dan olah raga</b>		
	Persentase kelompok olahraga yang aktif	persen	88
	jumlah cabang olahraga yang dibina	cabang olahraga	33
	peringkat dalam Porprov	rangking	0
	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali	cabang olahraga	15
	persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	40
<b>14</b>	<b>Bidang statistik</b>		
	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	persen	100
<b>15</b>	<b>Bidang persandian</b>		0
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	persen	100
<b>16</b>	<b>Bidang kebudayaan</b>		
	Jumlah event budaya yang dikembangkan	Unit	20
	tersedianya museum budaya	Unit	1
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	unit	190
	Persentase grup kesenian yang dibina	persen	25
	Persentase tokoh dan pemangku adat yang dibina	persen	95
<b>17</b>	<b>Bidang perpustakaan</b>		
	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	146,425
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah	orang	450
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling	orang	10
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah	orang	135
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari	orang	450
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM	orang	525
	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	persen	11,03%
<b>18</b>	<b>Bidang kearsipan.</b>		
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	7,89%
	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	persen	5,77%

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
<b>C</b>	<b>Urusan pemerintahan pilihan</b>		
<b>1</b>	<b>Bidang kelautan dan perikanan</b>		
	Produksi Perikanan (Ton)	ton	26,327
<b>2</b>	<b>Bidang pariwisata</b>		
	jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	orang	74,944
	jumlah destinasi pariwisata daerah	kawasan	45
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	usaha	289
<b>3</b>	<b>Bidang pertanian</b>		
	Produksi padi	ton	60,631
	Produksi jagung	ton	16,5
	Produksi Kedelai	ton	90
	Produksi Duku	ton	6,829
	Produksi Jeruk	ton	365
	Produksi Cabe	ton	205
	Produksi Karet	ton	37,321
	Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	ton	89,197
	Produksi Kakao	ton	2,858
	Produksi daging	ton	1,161
	produktivitas padi sawah	ton/Ha	5
	indeks penanaman padi sawah	kali/tahun	2,2
	luas panen padi	Ha	15.328
	produktivitas sawit	ton/Ha/bulan	3,00
	produktivitas karet	ton/Ha/bulan	1,00
	Luas sawah	ha	6.866,89
	Luas Perkebunan sawit (kebun rakyat)	Ha	34,003
	Luas Perkebunan karet	ha	44,352
	Luas perkebunan kakao	ha	4,225
	Populasi sapi/kerbau	ekor	48,4
	Panjang jalan usaha tani	km	10
	panjang jalan produksi	km	110
	Kelompok tani naik kelas	kelompok	50
	Penumbuhan Kelembagaan Petani	kelompok	5
<b>4</b>	<b>Bidang kehutanan</b>		
<b>5</b>	<b>Bidang energi dan sumber daya mineral;</b>		
<b>6</b>	<b>Bidang perdagangan</b>		
	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	persen	0,3
	Koefisien variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	persen	≥8
	Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	unit	800
<b>7</b>	<b>Bidang perindustrian</b>		
	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	persen	7

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Persentase Pertumbuhan IKM	persen	8
	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	ikm	35
<b>8</b>	<b>Bidang transmigrasi</b>		
<b>1</b>	Terbangunnya kawasan transmigrasi	kawasan	1
<b>D</b>	<b>fungsi penunjang urusan pemerintahan</b>		
<b>1</b>	<b>Bidang Pengawasan</b>		
	Level kapabilitas APIP	level	3
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level)	level	3
	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	persen	24
	Hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persen	84
	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah yang material	persen	83
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	bobot	67
<b>2</b>	<b>Bidang perencanaan</b>		
	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah		95
	Penilaian Penghargaan Pembangunan daerah (PPD)	Peringkat	Nominasi provinsi
	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	persen	40
	Persentase ketersediaan data perencanaan daerah	persen	95
	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	persen	95
<b>3</b>	<b>Bidang keuangan</b>		
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	77,34
	Persentase perkembangan PAD	persen	5
	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	2,5
<b>4</b>	<b>Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>		
	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	85
	Persentase PNS dengan tingkat pendidikan S1, S2 dan S3	persen	75%
	Persentase pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti Diklat PIM	persen	85%
	Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti Diklat fungsional	persen	57%
	Persentase PNS yang memiliki kinerja sangat baik dan baik (SKP dan PKP)]	persen	99,50%
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	persen	100%
<b>5</b>	<b>Bidang penelitian dan pengembangan</b>		
<b>1</b>	Jumlah pengkajian kelitbangan daerah	Kajian	1



No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
2	Jumlah fasilitasi inovasi daerah	Inovasi	1
	<b>Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>		
6	<b>Sekretariat Daerah</b>		
	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	persen	100
	Persentase pencapaian realisasi keuangan kegiatan tahunan	persen	100
	Nilai LPPD	skor, status, peringkat	31,226 (tinggi) naik peringkat
	hasil evaluasi AKIP	bobot	BB
	Persentase Barang Subsidi yang diawasi	persen	100
	Nilai PPID	peringkat	1
	Persentase tingkat Pelayanan Keprotokolan	persen	99
	Peringkat penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi	ranking	sepuluh besar
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi penyusunannya	dokumen	15
	Jumlah penanganan perkara hukum	perkara	5
	Persentase pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai RUP	persen	100
7	<b>Sekretariat DPRD</b>		
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan	persen	90
	APBD yang ditetapkan menjadi Perda	persen	100
	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	rekomendasi	20
8	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		
	Persentase kelompok masyarakat/nagari di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	persen	7
	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	persen	1
	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	jam	1
	Persentase daerah pascabencana yang bisa dipulihkan	persen	6
9	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
	Jumlah Konflik Sosial	kasus	7
	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat	kasus	5
10	<b>Kecamatan</b>		
	<b>Kecamatan Pulau Punjung</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	100%
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100%
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	6

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	1.2
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	50
	<b>Kecamatan Sitiung</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	300
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	20
	<b>Kecamatan Koto Baru</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	1400
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	30
	<b>Kecamatan Sungai Rumbai</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	1.4
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	30
	<b>Kecamatan IX Koto</b>	-	
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	400
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	35
	<b>Kecamatan Timpeh</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	1.2
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	35
	<b>Kecamatan Koto Salak</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	65
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	5
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	1.4
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	30
	<b>Kecamatan Asam Jujuhan</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	5
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	86
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	30
	<b>Kecamatan Koto Besar</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	110
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	7
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	86
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	100
	<b>Kecamatan Padang Laweh</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	300
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	4

No	Urusan/ Indikator	Satuan	2021
	<b>Kecamatan Tiumang</b>		
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60
	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur kecamatan	usulan	100
	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	usulan	4
	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	persen	400
	Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	kasus	30



# **BAB VII**

## **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2016-2021. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya 2021 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, yang diakhiri dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2021 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Dharmasraya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha dan stakeholder terkait dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Demikian RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 .

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**SUTAN RISKHA**